



KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan penegasan komitmen Bupati, Dr. Yansen TP, M.Si, dan Wakil Bupati, Topan Amrullah, S.Pd.,M.Si dalam melaksanakan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), dan sekaligus acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Malinau. RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memuat program dan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Malinau selama lima tahun mendatang.

Kunci keberhasilan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021 adalah kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, keberhasilan pencapaian visi dan misi juga dipengaruhi dukungan manajemen pemerintahan terutama kelengkapan dan kesiapan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malinau. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan penataan organisasi perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, perubahan kapasitas fiskal, dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malinau. Proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga tetap memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat, serta komitmen global mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Peran serta, keterlibatan dan dukungan berbagai pihak baik seluruh aparat perangkat daerah dan pemerintah desa, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kaum perempuan dan kaum muda, pelaku usaha, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan juga pemerintah pusat. Oleh sebab itu, mari kita membangun kerjasama dan kemitraan menuju Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun.

Malinau, September 2018

Bupati Malinau

Dr. Yansen TP, M.Si



DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
Bab 1 Pendahuluan	1.1
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Dasar Hukum	1.4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1.8
1.4 Maksud dan Tujuan	1.11
1.4.1 Maksud	1.11
1.4.2 Tujuan	1.12
1.5 Sistematika	1.13
Bab 2 Gambaran Kondisi Umum Daerah	2.1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	2.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2.2
2.1.2 Topografi	2.6
2.1.3 Geologi	2.7
2.1.4 Hidrologi	2.7
2.1.5 Klimatologi	2.7
2.1.6 Penggunaan Lahan	2.8
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2.13
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	2.18
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2.20
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2.22
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	2.22
2.3.2 Fokus Layanan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.31
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	2.57
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	2.67
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2.67
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	2.72
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	2.81
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	2.83
Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah	3.1



3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu	3.1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	3.1
3.1.2 Neraca Daerah	3.8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3.11
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	3.13
3.2.2 Analisis Pembiayaan	3.15
3.3 Kerangka Pendanaan	3.17
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3.17
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	3.24
Bab 4 Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah	4.1
4.1 Permasalahan Pembangunan	4.1
4.1.1 Permasalahan Geografi dan Demografi	4.1
4.1.2 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat	4.2
4.1.3 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	4.5
4.1.4 Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah	4.6
4.2 Isu Strategis	4.7
4.2.1 Telaahan Isu Internasional dan Nasional	4.8
4.2.2 Telaahan Isu atau Kebijakan Provinsi Kaltara	4.13
4.2.3 Telaahan Kebijakan Pembangunan Daerah	4.14
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Malinau	4.15
Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	5.1
5.1 Visi Pembangunan	5.1
5.2 Misi	5.2
5.3 Tujuan dan Sasaran	5.6
Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pengembangan Daerah	6.1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	6.1
6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu	6.1
6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua	6.3
6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga	6.4
6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keempat	6.5
6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kelima	6.6
6.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keenam	6.7
6.1.7 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketujuh	6.8
6.1.8 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedelapan	6.9
6.1.9 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesembilan	6.10
6.1.10 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesepuluh	6.11



6.1.11 Stretegi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesebelas	6.12
6.1.12 Stretegi dan Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keduabelas	6.13
6.2 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	6.14
6.2.1 Tahapan Tahun 2016	6.15
6.2.2 Tahapan Tahun 2017	6.15
6.2.3 Tahapan Tahun 2018	6.16
6.2.4 Tahapan Tahun 2019	6.17
6.2.5 Tahapan Tahun 2020	6.18
6.2.6 Tahapan Tahun 2021	6.19
6.3 Program Pembangunan	6.20
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	6.36
6.4.1 Stategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan	6.39
6.4.2 Stategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan	6.46
Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	7.1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	7.1
Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.1
Bab 9 Penutup	9.1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	9.4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan Tahun 2017	2.2
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.4
Tabel 2.3 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Malinau	2.5
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja di Kabupaten Malinau 2013-2015	2.6
Table 2.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau tahun 2012-2016 (Rp.Miliar)	2.13
Tabel 2.6 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)	2.14
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016 (%)	2.16
Table 2.8 Persentase Distributions PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2012-2016 (%)	2.17
Tabel 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.18
Tabel 2.10 Angka Melek Huruf Tahun 2017 Usia Diatas 15 Tahun	2.18
Tabel 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.19
Tabel 2.12 Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.19
Tabel 2.13 Banyaknya Sarana Kesenian di Kabupaten Malinau Tahun 2013-2017	2.20
Tabel 2.14 Banyaknya Kelompok Seni di Kabupaten Malinau Tahun 2013-2017	2.21
Tabel 2.15 Banyaknya Sarana Gedung/Tempat Kesenian di Kabupaten Malinau Tahun 2013-2017	2.21
Tabel 2.16 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.22
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.23
Tabel 2.18 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016 Kabupaten Malinau	2.23
Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	2.23
Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	2.24
Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	2.24
Table 2.22 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun	2.25



2016	
Tabel 2.23 Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Malinau	2.26
Table 2.24 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Kabupaten Malinau	2.27
Table 2.25 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang berwenang Di Kabupaten Malinau (Km). 2012-2016	2.27
Table 2.26 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Malinau (km) 2012-2016	2.28
Table 2.27 Banyaknya Anggota Hansip Sesuai Kualifikasi Tugas dan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Malinau	2.29
Table 2.28 Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.30
Table 2.29 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.31
Table 2.30 Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menurut tingkat pendidikan, status dan jenis kelamin Kabupaten Malinau tahun 2016	2.32
Table 2.31 Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Malinau Tahun 2013-2015	2.32
Tabel 2.32 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2015	2.33
Tabel 2.33 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2015	2.33
Tabel 2,34 Jumlah Pencari Kerja, Jumlah Usaha Kecil/Menengah, Jumlah Perusahaan penerap (K3), Jumlah Sengketa Pengusaha-pekerja Kabupaten Malinau Tahun 2015-2017	2.34
Tabel 2.35 Jumlah RTS-PM, Target dan Realisasi Rasda Kabupaten Malinau Tahun 2016-2018*	2.35
Tabel 2.36 Luas lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Hektar)	2.36
Tabel 2.37 Luas lahan padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Hektar)	2.36
Tabell 2.38 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut jenis hak Hak Atas Tanah dan Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016*	2.37
Tabel 2.39 Jumlah Sertifikat Menurut Kecamatan dan Permohonan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Malinau Tahun 2016*	2.38
Tabel 2.40 Status Pengaduan dan Penangan Kasus Laporan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan Kabupaten Malinau Tahun 2017	2.39
Tabel 2.41 Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, Sumber Mata Air Baku, dan Tenaga Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.40



Tabel 2.42 Jumlah Kepemilikan KTP, Belum Memiliki KTP, Rasio Penduduk ber- KTP, Rasio Bayi Berakta Kelahiran, Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2017	2.41
Tabel 2.43 Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perwakinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.41
Tabel 2.44 Banyaknya Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.42
Tabel 2.45 Banyaknya Desa dan RT Menurut Kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2017*	2.43
Tabel 2.46 Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Status Desa Kabupaten Malinau Tahun 2017*	2.44
Tabel 2.47 Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2017*	2.45
Tabel 2.48 Jumlah Peserta KB Aktif dan Peserta Baru dan Persentasenya Terhadap Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.46
Tabel 2.49 Jumlah Peserta KB Aktif dan Peserta Baru dan Persentasenya Terhadap Pasangan Usia Subur Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.46
Tabel 2.50 Nama, Panjang, Kondisi, dan Status Lapangan Terbang Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.48
Tabel 2.51 Nama, Panjang, Kondisi, dan Status Lapangan Terbang Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.48
Tabel 2.52 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teregistrasi dan Teridentifikasi Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Malinau (Unit) Tahun 2011-2016	2.49
Tabel 2.53 Banyaknya Surat Pos yang dikirim Menurut Tujuan dan Sifat Pengiriman di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.49
Tabel 2.54 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Koperasi di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.50
Tabel 2.55 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.50
Tabel 2.56 Realisasi Investasi Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	2.51
Tabel 2.57 Banyaknya Sarana Gedung/Tempat/Lapangan Olahraga dan Jenis Olahraga Di Kabupaten Malinau	2.52
Tabel 2.58 Banyaknya Kelompok Olahraga di Kabupaten Malinau	2.53
Tabel 2.59 Banyaknya Kelompok Kesenian Kabupaten Malinau 2010-2014	2.54
Tabel 2.60 Banyaknya Anggota Kelompok Seni Kabupaten Malinau 2010-2014	2.55
Tabel 2.61 Banyaknya Sarana Gedung/ Tempat Kesenian Kabupaten Malinau 2010-2014	2.55
Tabel 2.62 Banyaknya Perpustakaan Menurut Jenisnya Kabupaten Malinau 2013-2017	2.56
Tabel 2.63 Banyaknya pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan	2.56



Daerah Kabupaten Malinau 2013-2017	
Tabel 2.64 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang (Hektar) Tahun 2011-2016 Di Kabupaten Malinau	2.57
Tabel 2.65 Luas Panen Tanaman Palawija (Hektare) Tahun 2011-2016 Di Kabupaten Malinau	2.58
Tabel 2.66 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.58
Tabel 2.67 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Diatas 200 Kuintal Tahun 2016 Di Kabupaten Malinau	2.59
Tabel 2.68 Luas Tanaman Perkebunan (Ha) Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.60
Tabel 2.69 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.60
Tabel 2.70 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.61
Tabel 2.71 Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (Ekor) Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.61
Tabel 2.72 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sub Sektor Perikanan Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau	2.62
Tabel 2.73 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	2.62
Tabel 2.74 Banyaknya Industri, Tenaga kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.63
Tabel 2.75 Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Industri Kabupaten Malinau Tahun 2013-2016	2.63
Tabel 2.76 Banyaknya Perusahaan Yang Terdaftar Menurut Daftar Hukum Di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015	2.64
Tabel 2.77 Banyaknya Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	2.64
Tabel 2.78 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015	2.65
Tabel 2.79 Banyaknya Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016	2.66
Tabel 2.80 Aset Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016	2.66
Tabel 2.81 Banyaknya Produksi Batu Bara Kabupaten Malinau Tahun 2010-2016	2.67
Tabel 2.82 Realisasi dan Nilai Ekspor Batubara Kabupaten Malinau Tahun 2010-2016	2.67
Tabel 2.83 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Malinau 2012-2016	2.68
Tabel 2.84 Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Malinau tahun 2016-2021	2.68
Tabel 2.85 Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Di Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	2.69
Tabel 2.86 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Kelompok Bukan Makanan Menurut Jenisnya 2014-2016 Kabupaten Malinau	2.69



Tabel 2.87 Data Luas Potensi Lahan Pertanian Pangan (Padi) Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 Kabupaten Malinau	2.70
Tabel 2.88 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Malinau (Ha) tahun 2012-2016	2.71
Tabel 2.89 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malinau (Ton) 2012-2016	2.71
Tabel 2.90 Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kabupaten Malinau 2012-2016 (km)	2.73
Tabel 2.91 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Malinau 2016	2.73
Tabel 2.92 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Malinau 2015 (km)	2.73
Tabel 2.93 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Teregistrasi Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2011-2016	2.74
Tabel 2.94 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telpon Seluler, PC Komputer Tahun 2012-2016	2.75
Tabel 2.95 Jumlah Pelanggan dan Sumber Air Minum Menurut Kategori Di Kabupaten Malinau 2012-2016	2.76
Tabel 2.96 Persentase rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Di Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016 (%)	2.76
Tabel 2.97 Banyaknya Daya Yang Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Di Kabupaten Malinau 2012-2016 (Dalam MWH)	2.77
Tabel 2.98 Luas Hutan Zonasi TNKM (Ha) Di Kabupaten Malinau 2017	2.78
Tabel 2.99 Luas Hutan Zonasi (Ha) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Malinau 2017	2.79
Tabel 2.100 Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (Ha) Di Kabupaten Malinau	2.79
Tabel 2.101 Luas Wilayah Produktif Tahun 2013-2017 Di Kabupaten Malinau	2.80
Tabel 2.102 Luas Wilayah Produktif Menurut Kecamatan Tahun 2017 Di Kabupaten Malinau	2.80
Tabel 2.103 Angka Kriminalisasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Malinau	2.81
Tabel 2.104 Jumlah Demonstran 2013-2017 Kabupaten Malinau	2.83
Tabel 2.105 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013-2017 Kabupaten Malinau	2.83
Tabel 2.106 Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017 Kabupaten Malinau	2.83
Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2012-2016	3.3
Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malinau Menurut Jenis Belanja Tahun 2012-2016 (Rp.Juta)	3.7
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016	3.8
Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016	3.10
Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	3.13
Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	3.14



Table 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau	3.15
Table 3.8 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Mlinau Tahun 2014-2016	3.16
Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defifisit Rill Anggaran Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016	3.17
Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021	3.18
Table 3.11 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021	3.24
Table 3.12 Rencana Pembangunan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau 2017-2021	3.25
Tabel 5.1 Tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	5.6
Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021	5.8
Table 6.1 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu Kabupaten Malinau 2016-2021	6.2
Table 6.2 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua Kabupaten Malinau 2016-2021	6.3
Table 6.3 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga Kabupaten Malinau 2016-2021	6.4
Table 6.4 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat Kabupaten Malinau 2016-2021	6.5
Table 6.5 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima Kabupaten Malinau 2016-2021	6.6
Table 6.6 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam Kabupaten Malinau 2016-2021	6.7
Table 6.7 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketuju Kabupaten Malinau 2016-2021	6.8
Table 6.8 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan Kabupaten Malinau 2016-2021	6.9
Table 6.9 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan Kabupaten Malinau 2016-2021	6.10
Table 6.10 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesepuluh Kabupaten Malinau 2016-2021	6.11
Table 6.11 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesebelas Kabupaten Malinau 2016-2021	6.12
Table 6.12 Tujuan Saran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keduabelas Kabupaten Malinau 2016-2021	6.13
Table 6.13 Program Prioritas Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021	6.21
Tabel 6.14 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kabupaten Malianu Tahun 2016-2021	6.37
Table 7.1 Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau	7.2
Table 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021 Kabupaten Malinau	7.6
Table 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016	7.7



Table 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021	7.38
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malinau	8.2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Malianu	8.4
Tabel 9.1 Program Utama Transisi	9.2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	1.9
Gambar 1.2	Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	1.10
Gambar 2.1	Kerangka Pikir potensi pengembangan kawasan budidaya	2.2
Gambar 5.1	Paradigma Gerakan Desa Membangun Kabuapten Malinau Tahun 2016-2021	5.5
Gambar 6.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	6.14



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang telah dicanangkan sejak tahun 2011 dan dijalankan secara sadar, sungguh-sungguh dan nyata mulai dari tingkat desa telah membawa perubahan positif pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat di Kabupaten Malinau. GERDEMA didasarkan pada semboyan atau tekad **Malinau Berubah Maju Sejahtera** yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau agar bersama-sama Berubah dalam meraih Kemajuan dan Kesejahteraan. BERUBAH untuk MAJU dan MAJU untuk menggapai KESEJAHTERAAN. GERDEMA juga berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau itu harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Malinau. Desa yang maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

GERDEMA adalah paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu, "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. GERDEMA menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Pelaksanaan GERDEMA selama beberapa tahun hingga tahun 2017 menegaskan bahwa masyarakat desa dan pemerintah desa telah mampu menjadi pelaku utama pembangunan dan menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan desa, dan pada akhirnya akan menjadi dasar terwujudnya kemajuan bangsa dan negara.

Kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Malinau secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang. Kemajuan tersebut telah membangkitkan harapan dan optimisme bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bahwa dinamika pembangunan telah memberikan arah yang lebih jelas menuju tata kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan selain diukur dari hasil nyata juga dinilai dari perubahan sikap, perilaku dan tindakan masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Dinamika pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Kabupaten Malinau telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat



desa, terbangunnya prasarana dan sarana, tertatanya perumahan dan permukiman, serta meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh semakin luasnya investasi dan perdagangan internasional terutama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut Kabupaten Malinau berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malinau menjadi lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel yang memberikan peluang lebih luas bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Malinau yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Sementara, pelaksanaan GERDEMA menegaskan komitmen untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa.

Tantangan pembangunan Kabupaten Malinau dalam kurun waktu lima tahun hingga tahun 2021 mendatang adalah menjaga momentum pembangunan dengan mendorong percepatan pembangunan desa dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia agar dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Malinau terutama masih terbatasnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, masih adanya kemiskinan dan pengangguran, belum tuntasnya kesenjangan antarwilayah kecamatan dan desa, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu. Selain itu, tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang lebih maju, modern dan bermartabat; menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs-*Sustainable Development Goals*); serta memperkuat keunggulan dan daya saing daerah dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai tantangan tersebut perlu diatasi melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Malinau yang terencana, terukur, terpadu dan merata antar desa dan antar kecamatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan



yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kabupaten Malinau telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada bulan Desember 2015 dan telah terpilih Dr. Yansen TP, M.Si sebagai Bupati dan Topan Amrullah, SPd, M.Si sebagai Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021, dan dilantik pada tanggal 4 April 2016. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Malinau. Rangkaian dari penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau terpilih ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Malinau. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi.

Kunci keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, keberhasilan pencapaian visi dan misi juga dipengaruhi dukungan manajemen pemerintahan terutama kelengkapan dan kesiapan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malinau. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan penataan organisasi perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



pada Pasal 342 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan terjadi perubahan yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 342 ayat (3). Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan kebijakan nasional. Perubahan terhadap kebijakan nasional ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disamping itu diundangkannya Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap daerah untuk menyesuaikan kembali sistematika dan tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan permendagri dimaksud.

Perubahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 juga dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dari hasil evaluasi didapat beberapa indikator kinerja daerah yang diperkirakan akan sulit dicapai sehingga perlu penyesuaian dengan kondisi perekonomian global dan nasional saat ini, diantaranya perubahan target pencapaian pertumbuhan ekonomi, PDRB atas harga konstan dan harga berlaku menurut lapangan usaha, tingkat pengangguran dan beberapa target pencapaian indikator makro telah terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan diantaranya jumlah dan persentase penduduk miskin, Indeks pembangunan manusia.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian target pembangunan sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, perubahan kapasitas fiskal, dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malinau. Proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga tetap memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat, serta komitmen global mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- (14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (18) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- (23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
- (24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
- (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
- (26) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
- (27) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012



Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);

- (28) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3)
- (29) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- (30) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau 2005-2025 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan. Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Perubahan RPJMD ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar tercipta keserasian dokumen untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 memperhatikan dan mengacu pada tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara mempertimbangkan dan mengacu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.



Perubahan RPJMN 2015-2019 juga memberikan arah kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara juga memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs=*sustainable development goals*). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga memperhatikan, mengacu dan mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nawacita dan SDGs.

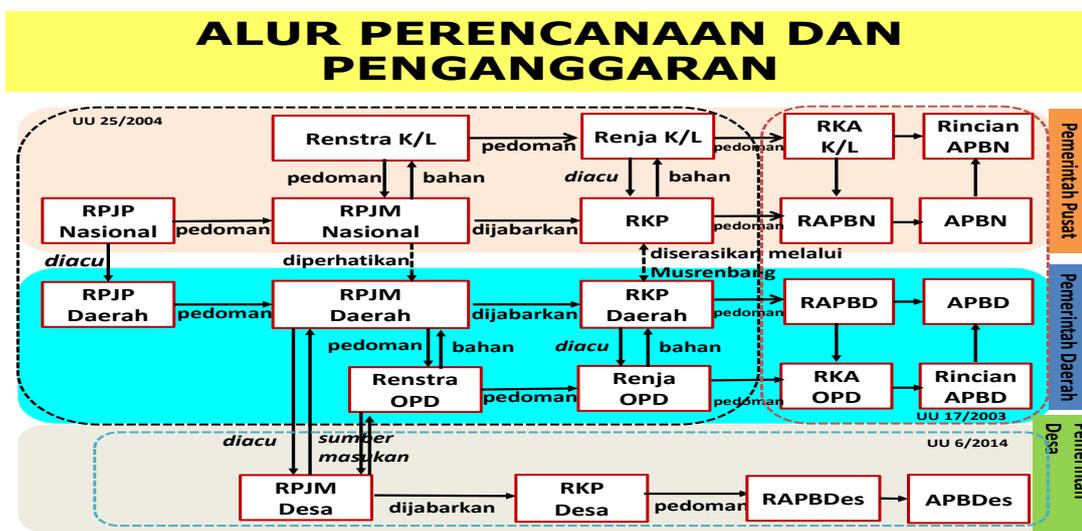
Perubahan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan secara teknis kedalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021.

Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selain itu RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya





Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, untuk memastikan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.2

Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021





Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memperhatikan hasil kajian terhadap potensi daerah baik sumber daya pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan pariwisata terutama menyangkut ketersediaan lahan, kapasitas produksi dan pelaku usaha baik rumah tangga maupun swasta dalam mengelola sumber daya. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga memperhatikan kajian terhadap permasalahan daerah terutama keterbatasan usaha, kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, keterisolasian, kesenjangan dan kerusakan lingkungan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memperhatikan berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan baik tokoh masyarakat, DPRD, masyarakat sipil, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dihimpun melalui diskusi, rapat koordinasi, dan media informasi.

Penataan manajemen kinerja juga menjadi penentu keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Penataan manajemen kinerja mencakup kemampuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau. Penataan manajemen kinerja juga mensyaratkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDesa) sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau. Selain itu, penataan manajemen kinerja juga mencakup pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, pelaporan, pengendalian dan evaluasi (*e-planning, budgeting, monitoring dan evaluasi*) secara terpadu dan konsisten.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2016-2021 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten Malinau, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun



2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 juga dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 bertujuan antara lain untuk:

- (1) Acuan dan pedoman resmi bagi aparat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa; serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Malinau secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Malinau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau, APBD Provinsi Kalimantan Utara, APBN dan sumber dana lainnya;
- (3) Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
- (4) Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
- (5) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;



- (6) Mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
- (7) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan (SDG's);
- (8) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarPerangkat Daerah; antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Kalimantan Utara; serta antara Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Pusat;
- (9) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- (10) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- (11) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malinau, pelaku usaha dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu



- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAMPERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

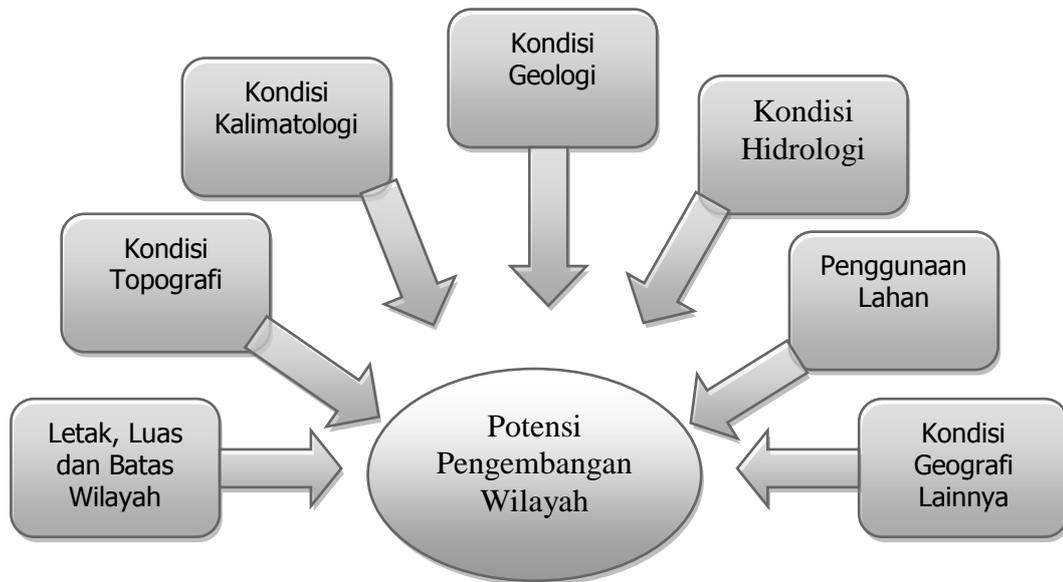
Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak antara $114^{\circ}35'22''$ sampai dengan $116^{\circ}50'55''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'36''$ sampai dengan $4^{\circ} 10'55''$ Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Kabupaten Malinau Malinau mempunyai garis perbatasan negara di daratan yang terpanjang di Kalimantan Utara sehingga dapat dikatakan Kabupaten Malinau Merupakan Beranda terdepan negara karena berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Kabupaten Malinau tidak memiliki garis pantai sehingga seluruh desa yang ada di Kabupaten Malinau merupakan desa bukan pesisir. Topografi Kabupaten Malinau sangat bervariasi, terlihat dari ketinggian di atas permukaan laut yang memiliki rentang yang panjang yaitu antara 62-744,4 m.

Selain itu, Perkembangan kondisi kependudukan menggambarkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar.2.1
Kerangka Pemikiran Potensi
pengembangan Kawasan Budidaya



2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah administrasi Kabupaten Malinau berbatasan dengan Kabupaten Nunukan di sebelah utara; Kabupaten Mahakam Hulu dan Kutai Kartanegara di sebelah selatan; Kabupaten Bulungan, Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Tana Tidung di sebelah timur; Malaysia Timur (Sarawak) dan Sabah di sebelah barat. Kabupaten Malinau mempunyai 109 desa dan 15 kecamatan dengan kecamatan terluas Kayan Hilir dan Pujungan, dan terkecil adalah Malinau Kota.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			km ²	%
1	Mentarang	9	535,15	1,33
2	Malinau Kota	6	142,07	0,35
3	Pujungan	9	6.539,39	16,31
4	Kayan Hilir	5	11.863,19	29,59
5	Kayan Hulu	5	735,40	1,83
6	Malinau Selatan	9	1.153,35	2,88
7	Malinau Utara	12	1.091,19	2,72



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

8	Malinau Barat	9	767,12	1,91
9	Sungai Boh	6	3.112,18	7,76
10	Kayan Selatan	5	3.138,59	7,83
11	Bahau Hulu	6	3.098,98	7,73
12	Mentarang Hulu	7	2.924,65	7,30
13	Malinau Selatan Hulu	8	2.171,14	5,42
14	Malinau Selatan Hilir	8	572,20	1,43
15	Sungai Tubu	5	2.243,78	5,60
Jumlah		109	40.088,38	100,00

Sumber: Data Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017

Luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 40.088,38 Km² yang merupakan daratan, dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40 %) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40 %) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7-1.000 m.

Data kependudukan tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 80.619 jiwa yang terdiri dari 43.375 laki-laki dan 37.244 perempuan dengan rasio penduduk menurut jenis kelamin adalah 116,46, dan angka kepadatan penduduk 2,01 jiwa/km². Persebaran penduduk di Kabupaten Malinau menunjukkan ketidakmerataan yang sebagian besar terpusat di Kecamatan Malinau Kota, yaitu 30,76 persen kemudian disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing-masing sebesar 16,18 persen dan 13,03 persen. Sedangkan persentase penduduk terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu dan Kecamatan Mentarang Hulu dengan persentase masing-masing sebesar 1,30 persen dan 1,21 persen. Persebaran penduduk di sebelas kecamatan lainnya berkisar antara 2-7 persen.



Tabel 2.2
Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, dan Kepadatan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah		Penduduk		Angka kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
		RT	Desa	Km ²	%	Jumlah	%	
1	Sungai Boh	15	6	3.112,18	7,76	2.768	3,43	0,89
2	Kayan Selatan	13	5	3.138,59	7,83	2.205	2,73	0,70
3	Kayan Hulu	20	5	735,40	1,83	3.266	4,05	4,44
4	Kayan Hilir	15	5	11.863,19	29,59	1.742	2,16	0,15
5	Pujungan	21	9	6.539,39	16,31	2.318	2,88	0,35
6	Bahau Hulu	13	6	3.098,98	7,73	1.881	2,33	0,61
7	Sungai Tubu	13	5	2.243,78	5,60	1.047	1,30	0,47
8	Malinau Selatan Hulu	27	8	2.171,14	5,42	2.495	3,09	1,15
9	Malinau Selatan	32	9	1.153,35	2,88	5.044	6,26	4,37
10	Malinau Selatan Hilir	21	8	572,20	1,43	2.763	3,43	4,83
11	Mentarang	34	9	535,15	1,33	5.770	7,16	10,78
12	Mentarang Hulu	11	7	2.924,65	7,30	974	1,21	0,33
13	Malinau Utara	49	12	1.091,19	2,72	13.043	16,18	11,95
14	Malinau Barat	43	9	767,12	1,91	10.509	13,03	13,70
15	Malinau Kota	54	6	142,07	0,35	24.794	30,76	174,52
Jumlah		381	109	40.088,38	100,00	80.619	100,00	2,01

Sumber: Data Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017

Pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kabupaten Malinau adalah 2,01 jiwa/km². Kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan hampir tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Penduduk Kabupaten Malinau masih terpusat di Kecamatan Malinau Kota dan kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengannya. Kepadatan penduduk di Kecamatan Malinau Kota tercatat sebesar 174,52 jiwa/km², Kecamatan Malinau Utara sebesar 11,95 jiwa/km², Kecamatan Malinau Barat sebesar 13,70 jiwa/km², Kecamatan Mentarang sebesar 10,78 jiwa/km², Kecamatan Kayan Hulu sebesar 4,44 jiwa/km², Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebesar 4,83 jiwa/km², sedangkan Kecamatan, Sungai Boh dan Kayan Hulu berkisar 1-2 jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, Bahau Hulu dan Mentarang Hulu tercatat kurang dari 1 jiwa/km².



Tabel 2.3
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Kecamatan di Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Boh	1.497	1.271	2.768	117,78
2	Kayan Selatan	1.117	1.088	2.205	102,67
3	Kayan Hulu	1.789	1.477	3.266	121,12
4	Kayan Hilir	960	782	1.742	122,76
5	Pujungan	1.311	1.007	2.318	130,19
6	Bahau Hulu	1.029	852	1.881	120,77
7	Sungai Tubu	562	485	1.047	115,88
8	Malinau Selatan Hulu	1.315	1.180	2.295	111,44
9	Malinau Selatan	3.012	2.032	5.044	148,23
10	Malinau Selatan Hilir	1.441	1.322	2.763	109,00
11	Mentarang	2.970	2.800	5.770	106,07
12	Mentarang Hulu	515	459	974	112,20
13	Malinau Utara	6.944	6.099	13.043	113,85
14	Malinau Barat	5.550	4.959	10.509	111,92
15	Malinau Kota	13.363	11.431	24.794	116,90
	Jumlah	43.375	37.244	80.619	116,46

Sumber: BPS, Data Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau 2017

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016, jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang berusia lebih dari 15 tahun yang tercatat sebanyak 52.944 jiwa dengan rincian sebanyak 37.743 jiwa termasuk angkatan kerja dan 15.201 jiwa termasuk bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun dari 75,82 persen pada tahun 2014 menjadi 71,29 persen pada tahun 2015. Sementara, jumlah pengangguran meningkat dari 1.296 jiwa pada tahun 2014 menjadi 3.220 jiwa pada tahun 2015. Dengan kenaikan jumlah pengangguran, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,58 persen pada tahun 2014 menjadi 8,53 persen pada tahun 2015. Kenaikan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh melambatnya permintaan produksi hasil pertambangan dan perkebunan yang diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016-2021 adalah mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, meningkatkan program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan mengembangkan kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.



Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja di
Kabupaten Malinau 2013-2015

Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015
I. Angkatan Kerja	36.631	36.189	37.743
1. Jumlah Penduduk Bekerja	33.248	34.893	34.523
2. Jumlah Pengangguran	3.383	1.296	3.220
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	11.962	11.539	15.201
Jumlah	48.593	47.728	52.944
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,38	75,82	71,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,24	3,58	8,53

Sumber: BPS. Data Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan daerah dengan topografi bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 0-2.000 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya di kawasan sepanjang sungai, khususnya di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang kiri kanan Sungai Malinau, kiri kanan Sungai Semendurut, Sungai Sembuak dan Salap, serta sebagian di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Wilayah Kabupaten Malinau berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 500-2.000 meter di atas permukaan laut sebagian besar ditumbuhi hutan belantara yang berada di Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.

Kemiringan tanah di Malinau cukup bervariasi dari 0-2 persen sampai lebih dari 40 persen. Dataran rendah terdapat di daerah Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat yang terletak di pinggiran aliran sungai. Sedangkan sebagian besar dataran tinggi terdapat di Kecamatan Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu, Sungai Boh dan sebagian Kecamatan Mentarang serta Kecamatan Mentarang Hulu, mulai dari Paking, Semamu, Long Berang sampai dengan Long Pala.

Daerah dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen jarang terjadi erosi dan sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Namun lahan dengan kemiringan kurang dari 2 persen ternyata luasnya relatif kecil. Sementara pemanfaatan lahan rawa yang tergenang permanen harus memerlukan rekayasa lahan melalui pembuatan kanal atau saluran drainase.



Daerah dengan kemiringan lahan 3-15 persen adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan peruntukan daerah dengan kemiringan lahan 15-40 persen terbatas hanya untuk perkebunan dengan konservasi tanah.

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Mentarang, Sungai Tubu, Sungai Boh, Sungai Bengalun dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan airbaku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2.1.3 Geologi

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

2.1.4 Hidrologi

wilayah aliran sungai di Kabupaten Malinau terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya kawasan perbukitan terjal terdapat

di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m-1.500 m di atas permukaan laut.

2.1.5 Klimatologi

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim di Kabupaten Malinau termasuk iklim tropika humida dengan curah hujan berkisar antara 2500 > 4500 milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam yang cukup tinggi. Temperatur



minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu:

- Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang ke arah Kecamatan Malinau.
- Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.
- Zone 3 : Zone dengan curah hujan antara 3.500-4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Malinau sampai Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.
- Zone 4 : Zone dengan curah hujan > 4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.

Saat ini kondisi iklim di Kabupaten Malinau, baru dapat diamati dari stasiun meteorologi yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Secara rata-rata, pada tahun 2016 curah hujan di sekitar Kabupaten Malinau adalah sebesar 299,8 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada September 2016 (510,1 mm) dan terendah pada April 2016 (98,5).

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Malinau mengacu pada Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012-2032 serta SK Menteri Kehutanan Nomor 718 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur dimana Wilayah Kabupaten Malinau masih dalam ruang lingkup Kalimantan Timur dan Kawasan Hutan Kalimantan Utara belum ditetapkan.

Adapun muatan Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012-2032 akan mengalami Peninjauan Kembali mengacu pada Penetapan Peraturan Provinsi Kalimantan Utara tentang RTRW Kalimantan Utara 2016-2036, sehingga beberapa hal prinsip yang tidak mengalami perubahan dalam Proses Peninjauan Kembali yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.



a) Kawasan Lindung

Menurut Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, penetapan kawasan lindung yaitu seluas kurang lebih 672.572 Ha, meliputi ;

1. kawasan hutan lindung Pasilan Tabah- Hulu Sungai Sembakung terletak di Kecamatan Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang dengan luas sekitar 153.370 Ha;
2. kawasan hutan lindung Long Ketrok terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Mantarang dengan luas sekitar 43.636 Ha;
3. kawasan hutan lindung Gunung Laung-Gunung Belayan terletak di Kecamatan Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan dengan Luas sekitar 169.000 Ha;
4. kawasan hutan lindung Hulu sungai Kayan-Hilir sungai Bahau terletak di Kecamatan Pujungan dan Kayan Hilir dengan luas sekitar 34.056 Ha;
5. kawasan hutan lindung Gunung Kopol-Gunung Jamik terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 32.149 Ha;
6. kawasan hutan lindung Kayaniot terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 48.250 Ha;
7. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan-Hulu sungai Laham terletak di Kecamatan Kayan Hilir dan Sungai Boh dengan luas sekitar 65.276 Ha;
8. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan-Hulu Sungai Langan terletak di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan selatan, dan Sungai Boh dengan luas sekitar 47.282 Ha;
9. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan-Hulu sungai Pangean terletak di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan luas sekitar 64.568 Ha;
10. Kawasan Hutan lindung Hulu Sungai Tekwai terletak di Kecamatan Kayan Selatan dengan luas sekitar 14.985 Ha;
11. Kawasan hutan lindung lainnya meliputi ; kawasan hutan penelitian Lalut Birai di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dengan luas kurang lebih 6.000 Ha, kawasan hutan lindung tradisional Tanah Ulen di Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir dengan luas kurang lebih 5.300 Ha, dan Kawasan hutan penelitian/arboretum KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 225 Ha.

Selain itu itu, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 718 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan, penetapan kawasan lindung di Wilayah Kabupaten Malinau meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau;
2. Kawasan Suaka Alam dalam hal ini adalah Taman Nasional Kayan Mentarang yang berada di sebagian wilayah beberapa kecamatan antara



lain: Kecamatan Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Bahau Hulu, Pujungan, dan Kayan Hilir.

b) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan ruang wilayah Kabupaten Malinau di Luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan Budidaya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau areal Penggunaan lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha.

Rencana pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau No. 11 Tahun 2012, Bagian Ketiga mengenai Kawasan Budidaya yakni terdiri atas :

1. **Kawasan peruntukan hutan produksi**, yakni (a). Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 367.368n Ha tedapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir, (b) Hutan Produksi Tebatas (HPT) dengan luas Kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, dan (c) Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang.
2. **Kawasan peruntukan hutan rakyat**, yakni kawasan berhutanan diluar kawasan budidaya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan masyarakat setempat.
3. **Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan**, meliputi :
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dan kawasan lahan cadangan. Kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dikembangkan di beberapa desa antara lain ; Desa Kaliamok, Respen Tubuh, Lubak Manis, Putat, Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Keminci, Mantarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras seberang, Sempayang, long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha. Sementara kawasan lahan cadangan adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan kurang lebih 17.334 Ha.
 - b. Kawasan pertanian horikultura dan palawijayakni jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan yang



- terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan masyarakat lokal tersebar dalam skala kecil dengan luas kurang lebih 500 Ha.
- c. Kawasan perkebunan yakni diprioritaskan dikembangkan di kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama : kopi, kakau, sawit dan karet dengan luas kurang lebih 302.355 Ha.
 - d. Kawasan peternakan yakni diarahkan pada seluruh wilayah kecamatan meliputi ; ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas.
4. **Kawasan peruntukan Perikanan**, terdiri atas :
- a. Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau.
 - b. Budidaya perikanan meliputi; (a) kawasan budidaya perikanan darat (kolam) yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang. (b) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara. (c) pengembangan kawasan minapolitan di Malinau seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha. (d) pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) di Respen Tubuh Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan dan Lidung Keminci di Kecamatan Mentarang. (e) penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha.
 - c. Pengelolaan ikan yakni diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.
5. **Kawasan Peruntukan Sumberdaya Air**, adalah kawasan perairan umum yang meliputi sungai besar dan sungai kecil yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 12.595 Ha. Adapun pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan sumber air baku, transportasi sungai, pembangkit listrik dan keperluan pertanian serta perikanan dan perlindungan DAS serta pengendalian kegiatan budidaya atau aktifitas masyarakat yang berisiko menurunkan kualitas air sungai.
6. **Kawasan peruntukan pertambangan**, yakni kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas yang terdapat di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan luas kurang lebih 51.991 Ha dan kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batu bara yang terdapat di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 29.143 Ha dan pertambangan bahan galian c berupa sirtu,



batu gunung, batu padas, tanah liat dan bahan urugan lainnya yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten.

7. **Kawasan peruntukan pemukiman**, terdiri atas :
 - a. Kawasan pemukiman perkotaan yang tersebar di beberapa wilayah yakni Malinau Kota, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, Malinau Seberang, Kuala Lapang, Tanjung Lapang dan Pulau Sapi dengan luas kurang lebih 3.002 Ha.
 - b. Kawasan pemukiman pedesaan yaitu kawasan pemukiman yang terdapat pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau dengan luas kurang lebih 5.263 Ha.
 - c. Rencana Kawasan permukiman pada kawasan khusus meliputi (a) kawasan yang terletak disekitar pintu masuk perbatasan negara di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, yang akan dikembangkan melalui peningkatan perdagangan lintas batas dan didorong pertumbuhannya sebagai kawasan beranda depan negara, (b) Kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah, baik yang terdapat didalam Taman Nasional Kayan Mentarang maupun di dalam hutan lindung, (c) kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerjaan tambang dan energi, dan (d) kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerjaan di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada disekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata.
8. Kawasan Peruntukan industri, terdiri atas :
 - a. Industri kecil berupa industri kerajinan rumah tangga terdapat di seluruh ibu kota Kecamatan.
 - b. Industri menengah berupa industri pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak dan kayu olahan yang terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan.
 - c. Kawasan industri pengolahan batubara yakni kawasan pengolahan dan tempat penimbunan sementara batubara di Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1.047 Ha.
9. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kawasan wisata budaya, meliputi ; (a) kawasan rumah adat tradisional/Lamin di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sungai Boh, Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan, (b) Desa Budaya, Long Alango dan Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan, Setulang di Kecamatan Malinau Selatan dan Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang.



- b. Kawasan wisata alam, meliputi ; (a) air terjun Sungai Jempolon, air panas Sekelibon, dan arung jeram Giram Kayan di Kecamatan Menatarang, (b) padang rumput Long Tua dan kuburan kuno Berini dan Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, (c) air terjun Marthin Billa, air terjun Sungai Udang, arung jeram Sungai Semuda dan hutan lindung Tana Ulen Setulang di Kecamatan Malinau Selatan, (d) arung jeram Sungai Bahau di Kecamatan Bahau Hulu dan Sungai Pujungan di Kecamatan Pujungan, dan (e) hutan penelitian Lalut Birai di Kecamatan Bahau Hulu dan hutan penelitian/arboretum KM.8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

(1) Pertumbuhan PDRB

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Malinau selama kurun waktu 2012-2016 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2012, nilai PDRB Kabupaten Malinau sebesar Rp.5.445,16 Triliun meningkat menjadi Rp.7.249,65 Triliun pada tahun 2016. Kenaikan yang cukup besar ini dipicu oleh peningkatan nilai tambah dari kegiatan primer, yaitu pertambangan dan penggalian terutama pertambangan batu bara, konstruksi, dan pertanian. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2012-2016 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	858,69	851,09	870,69	936,87	1.024,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2.301,14	2.750,36	3.131,05	3.277,94	3.290,65
C	Industri Pengolahan	174,07	181,60	194,72	211,60	225,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,35	1,35	1,49	2,00	2,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	3,66	3,97	4,20	5,24
F	Konstruksi	843,29	924,73	1.025,05	1.064,55	1.175,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199,88	219,81	244,50	253,48	273,12
H	Transportasi dan Pergudangan	192,41	196,76	211,52	219,44	228,82



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86,24	99,43	108,73	118,60	124,30
J	Informasi dan Komunikasi	26,24	20,84	20,75	22,65	23,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,55	11,90	12,77	15,35	16,56
L	Real Estat	14,79	15,94	16,01	17,59	18,58
M, N	Jasa Perusahaan	10,96	10,39	11,96	12,20	13,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547,59	640,66	528,07	516,16	551,08
P	Jasa Pendidikan	90,75	100,56	129,75	159,12	174,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,09	72,70	75,79	88,90	96,70
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,50	3,65	3,93	4,41	4,92
PDRB		5.445,16	6.105,52	6.590,83	6.925,12	7.249,65

Sumber : BPS. Data Pembangunan Daerah 2017

Keterangan : *)Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sementara nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 juga terus meningkat dari Rp. 5.101,64 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.6.555,93 Triliun pada tahun 2016 sehingga pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012-2016 tercatat sebesar 6,49 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan yang memberi andil cukup besar dalam memacu pertumbuhan.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	809,41	779,02	762,33	776,72	792,03
B	Pertambangan dan Penggalan	2.285,52	2.773,31	3.277,29	3.486,33	3.453,59
C	Industri Pengolahan	162,12	157,87	159,56	164,83	173,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	1,57	1,73	2,05	2,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	3,72	4,00	4,11	4,71
F	Konstruksi	725,49	790,07	873,04	857,65	907,85
G	Perdagangan Besar dan	195,35	207,94	223,19	228,83	241,69



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	178,71	178,96	187,93	191,12	197,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76,97	81,39	91,01	93,17	98,22
J	Informasi dan Komunikasi	25,17	22,29	20,99	21,53	23,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,21	10,04	9,99	11,16	11,33
L	Real Estat	12,73	13,06	13,66	13,97	14,70
M,N	Jasa Perusahaan	9,72	9,17	9,64	9,72	10,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	448,32	504,46	414,16	402,83	431,72
P	Jasa Pendidikan	83,83	91,58	105,14	113,54	118,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,89	63,42	60,29	64,56	70,83
R,S, T,U	Jasa lainnya	3,10	3,08	3,19	3,41	3,69
PDRB		5.101,64	5.691,02	6.217,21	6.445,61	6.555,93

Sumber: BPS. Data Pembangunan kab. Malinau Tahun 2017.

Keterangan : *)Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Perubahan tahun dasar penghitungan nilai PDRB menyebabkan terjadinya perubahan dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau. Data BPS menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mencapai 8,37 persen kemudian meningkat menjadi 11,55 persen pada tahun 2013 yang merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sejak terbentuknya Kabupaten Malinau. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dan perkebunan, serta sektor sekunder dari sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dalam beberapa tahun terakhir, penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah percepatan dan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, mengoptimalkan program dan kegiatan dari seluruh SKPD, dan mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.



Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(10,42)	(3,75)	(2,14)	1,89	1,97
B	Pertambangan dan Penggalian	11,84	21,34	18,17	6,38	-0,94
C	Industri Pengolahan	(6,08)	(2,62)	1,07	3,30	5,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,02	4,36	10,28	18,95	7,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,51	5,14	7,45	2,79	14,44
F	Konstruksi	8,79	8,90	10,50	(1,76)	-5,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,09	6,45	7,33	2,53	5,62
H	Transportasi dan Pergudangan	37,15	0,14	5,01	1,70	3,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48	5,75	11,82	2,38	5,41
J	Informasi dan Komunikasi	10,98	(11,46)	(5,83)	2,59	8,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,89	9,08	(0,05)	11,64	1,56
L	Real Estat	15,96	2,59	4,58	2,27	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	36,21	(5,65)	5,17	0,86	5,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,62	12,52	(17,90)	(2,74)	7,17
P	Jasa Pendidikan	30,20	9,25	14,81	7,98	4,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,35	(10,54)	(4,93)	7,08	9,71
R,S, T,U	Jasa lainnya	24,20	(0,60)	3,68	6,88	8,01
PDRB		8,37	11,55	9,25	3,67	1,71

Sumber : BPS. Data Pembangunan kab. Malinau Tahun 2017

Keterangan : *)Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Hingga saat ini sektor pertambangan dan penggalian sub sektor non-migas (batu bara) masih merupakan andalan bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau, dengan kontribusi sebesar 45,39% pada tahun 2016.

Ketergantungan pada pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.



Tabel 2.8

Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,77	13,94	13,21	13,53	14,13
B	Pertambangan dan Penggalian	42,26	45,05	47,51	47,33	45,39
C	Industri Pengolahan	3,20	2,97	2,95	3,06	3,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi	15,49	15,15	15,55	15,37	16,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,67	3,60	3,71	3,66	3,77
H	Transportasi dan Pergudangan	3,53	3,22	3,21	3,17	3,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,58	1,63	1,65	1,71	1,71
J	Informasi dan Komunikasi	0,48	0,34	0,31	0,33	0,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,19	0,20	0,19	0,22	0,23
L	Real Estat	0,27	0,26	0,24	0,25	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,06	10,49	8,01	7,45	7,60
P	Jasa Pendidikan	1,67	1,65	1,97	2,30	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,19	1,15	1,28	1,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS. Data Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017

Keterangan : *)Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Selama tahun 2012-2016 sumbangan kegiatan konstruksi, perdagangan, dan akomodasi restoran terus mengalami peningkatan. Pergeseran struktur ekonomi menunjukkan adanya perluasan basis kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau. Struktur ekonomi Kabupaten Malinau yang didominasi oleh sektor-sektor yang umumnya lebih padat modal telah mengurangi kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor-sektor ekonomi tersebut juga lebih berorientasi jangka pendek sehingga perlu pengembangan sektor-sektor produktif dalam jangka panjang untuk mendorong ekonomi daerah. Tantangan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah perluasan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Tantangan lainnya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah



pemberdayaan perekonomian masyarakat dan perluasan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dengan mengutamakan revitalisasi pertanian.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

(1) Angka Melek Huruf

Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Kualitas SDM itu sendiri sangat ditentukan oleh pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan non formal sedangkan pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Selain itu, tingkatan angka melek huruf merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia di daerah, berikut secara rinci dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel. 2.9
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Malinau tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Jumlah penduduk usia 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	46.040	47.975	49.972	52.003	54.105
2	Angka Melek Huruf	92.97	94.11	96.33	93.35	92.85

Sumber : BPS Kabupaten Malinau

Tabel. 2.10
Angka Melek Huruf Tahun 2017
Usia diatas 15 Tahun

Uraian	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
Angka Melek Huruf Menurut Usia diatas 15 Tahun	92-85	54.105	92.85

Sumber : BPS Kabupaten Malinau



(2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel. 2.11
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Malinau	7.75	8.27	8.27	8.29	8.56

Sumber : BPS Kabupaten Malinau

(3). Kemiskinan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan Persentase penduduk miskin yang terus menurun dari kisaran 11,68 persen hingga 7,15 persen dari total penduduk Kabupaten Malinau. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat desa di Kabupaten Malinau mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Tantangan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; melakukan revitalisasi pertanian; serta mengembangkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 2.12
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malinau 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	393.652	428.015	448.944	473.906	516.247
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	8,30	7,23	7,63	5,63	5,71
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,68	10,48	10,12	7,26	7,15

Sumber: BPS Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2017.



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

(1) Seni budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Malinau yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 desa, Memiliki beraga etnis dan beragam budaya yang tentunya berdampak terhadap beragamnya kesenian daerah yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dapat dipromosikan sebagai daya tarik dibidang pariwisata.

Pada Tahun 2013 terdapat 38 kelompok kesenian musik dan tari di Kabupaten Malinau dengan anggota berjumlah 877 orang. Jumlah ini menurun pada Tahun 2014 dan tahun 2015, hal ini diakibatkan beberapa kelompok musik dan tari yang tidak lagi aktif berkegiatan. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 peningkatan kesenian terus meningkat hingga mencapai 1.040 orang anggota Kelompok seni tari dan Musik, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah menumbuhkan semangat masyarakat untuk melestarikan kesenian daerah dan beberapa Kebijakan Daerah menetapkan beberapa desa menjadi desa wisata. Tantangan yang harus dihadapi tiga tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau adalah menumbuhkan semangat kreatifitas masyarakat dalam menjaga kearifan budaya lokal dan kesenian Daerah.

Tabel 2.13
Banyaknya Kelompok Kesenian di Kabupaten Malinau
Tahun 2013-2017

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	38	0	38	0	0
2014	25	0	25	0	0
2015	25	0	25	0	0
2016	28	0	28	0	0
2017	28	0	28	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Tabel 2.14
Banyaknya Anggota Kelompok Seni di Kabupaten Malinau
Tahun 2013-2017

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	877	0	877	0	0
2014	586	0	586	0	0
2015	750	0	750	0	0
2016	1.040	0	1.040	0	0
2017	1.040	0	1.040	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.15
Banyaknya Sarana Gedung/Tempat Kesenian di Kabupaten Malinau
Tahun 2013-2017

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	33	0	0	0	0
2014	56	0	0	0	0
2015	56	0	0	0	0
2016	56	0	0	0	0
2017	56	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(2) Pemuda dan Olah Raga

Untuk Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, kader bangsa, kader masyarakat dan kader keluarga, peran pemuda menjadi sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah menyiapkan pemuda yang handal sejak dini dengan meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal.



Tabel 2.16
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Klub olahraga per 10.000 penduduk	123	123	164	194	194
2	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	208	210	210	225	225

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

(1) Pendidikan

Pengembangan pendidikan yang merata, terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan produktivitas daerah. Peningkatan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh penyediaan gedung sekolah, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pembinaan tenaga pengajar, dan penyediaan buku dan peralatan sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) jumlah siswa setiap jenjang pendidikan menurut kelompok umur usia sekolah dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100.

Angka partisipasi untuk jenjang pendidikan SD/Mi di Kabupaten Malinau baik diukur dengan APK, APM maupun APS termasuk tinggi atau lebih dari 96 persen. Sementara APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA tercatat rendah atau kurang dari 77 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Tantangan yang harus diatasi pada lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau.



Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Malinau Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	APM	APK	APS
SD/MI (7-12 tahun)	92,62	105,11	99,47
SMP MTs (13-15 tahun)	80,33	103,74	94,61
SMA/MA (16-18 tahun)	65,46	78,79	81,52

Sumber: BPS Kab. Malinau Tahun 2017

Tabel 2.18
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)
menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016
Kabupaten Malinau

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni			
	2013	2014	2015	2016
Sekolah Dasar	94,99	95,68	96,25	95,06
Sekolah Menengah Pertama	63,57	70,28	76,69	80,43
Sekolah Menengah Atas	60,92	65,24	60,34	56,42

Sumber : Data Pembangunan Kabupaten Malinau 2017

a) Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2012-2016
Kabupaten Malinau

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 Tahun	10.641	11.338	10.098	10.475	10.475
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	0	98.84	99.44	99.30	99.39
1.3	APS SD/MI	96.27	0	99.44	99.30	99.39
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 Tahun	3.721	3.867	4.204	4.123	4.123
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun		97.30	96.93	91.05	98.81
2.3	APS SMP/Mts	86.87	0	96.93	90.66	98.81



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah

b) Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.20
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012-2016
Kabupaten Malinau

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	91	92	94	101	106
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	9.585	9.740	9.887	9.991	10.117
1.3	Rasio		1.096			
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	26	27	29	30	35
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun		3.992	4.558		
2.3	Rasio					

c) Rasio Guru/murid

Tabel 2.21
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	998	751	1.009	1.128	1.108
1.2	Jumlah Murid	10.641	11.338	10.098	10.475	10.517
1.3	Rasio	10.66	15.09	10.01	9.29	22.79
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	473	298	306	442	444
2.2	Jumlah Murid	3.721	3.867	4.204	4.123	4.277
2.3	Rasio	7.87	12.98	13.74	9.33	19.43



(2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata dan bermutu merupakan hak dasar rakyat dan sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Status kesehatan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu daerah dalam usaha pemenuhan hak dasar rakyat. Manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan modal utama dalam pembangunan.

Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah; serta mendorong kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2016 di Kabupaten Malinau adalah Rumah Sakit sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 16 unit, Puskesmas Pembantu 82 unit, Posyandu 53 unit. Jumlah prasarana dan sarana kesehatan masih terbatas karena dua kecamatan belum ada Puskesmas. Tantangan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, revitalisasi Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; serta peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 516 orang terdiri dari dokter 31 orang, perawat 249 orang, bidan 193 orang, tenaga farmasi 25 orang dan ahli gizi 18 orang. Selain itu jumlah dokter spesialis sebanyak 12 orang dan Dokter gigi sebanyak 14 orang dan Dokter Umum sebanyak 42 orang. Jumlah tenaga kesehatan tersebut masih jauh dari memadai untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah penambahan dokter khususnya dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi.

Tabel 2.22
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskemas Pembantu	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan
1. Sungai Boh	0	1	5	0	0
2. Kayan Selatan	0	1	3	1	0
3. Kayan Hulu	0	1	3	8	0
4. Kayan Hilir	0	2	2	0	0



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

5. Pujungan	0	1	5	2	0
6. Bahau Hulu	0	1	5	0	0
7. Sungai Tubu	0	0	5	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	4	0	0
9. Malinau Selatan	1	1	9	10	0
10. Malinau Selatan Hilir	0	2	5	6	0
11. Mentarang	0	1	13	10	0
12. Mentarang Hulu	0	1	7	1	0
13. Malinau Utara	1	1	11	0	0
14. Malinau Barat	0	2	2	7	0
15. Malinau Kota	0	1	3	8	0
Jumlah	2	16	82	53	0

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.23
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2016
Kabupaten Malinau

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Ahli Gizi
1. Sungai Boh	2	15	12	1	1
2. Kayan Selatan	2	14	8	1	1
3. Kayan Hulu	1	12	12	1	1
4. Kayan Hilir	2	18	11	1	2
5. Pujungan	1	18	15	1	1
6. Bahau Hulu	1	12	10	2	3
7. Sungai Tubu	0	0	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	0	0	0
9. Malinau Selatan	4	22	21	2	2
10. Malinau Selatan Hilir	3	30	19	3	2
11. Mentarang	3	31	19	3	1
12. Mentarang Hulu	2	9	9	1	0
13. Malinau Utara	3	31	28	3	0
14. Malinau Barat	4	23	18	4	2
15. Malinau Kota	3	14	11	2	2
Jumlah	31	249	193	25	18

Sumber : Data Pembangunan 2017



Tabel 2.24
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi
Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2016
Kabupaten Malinau

Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
Puskesmas	0	31	10
Rumah Sakit	12	11	4
Institusi Diknakes	0	0	0
Sarana Kesehatan Lain	0	0	0
Dinas Kesehatan	0	3	0
Jumlah	12	42	14

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Melihat dari data yang tersedia panjang di Kabupaten Malinau secara kumulatif dari jenis jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten Panjang jalan sampai tahun 2016 yakni 1.421,33 Km (belum termasuk jalan desa). Permukaan jalan terpanjang adalah tanah yang mencapai 60,69 persen dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Malinau. Sementara itu, untuk jalan aspal mencapai 32,67 persen. Pemenuhan kondisi jalan yang baik tentu menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi daerah oleh sebabnya Prasaran jalan menjadi prioritas utama pembangunan.

Tabel 2.25
Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang berwenang
Di Kabupaten Malinau (km), 2012-2016*

Uraian	Jumlah Panjang Jalan per-Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Panjang Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten	1.105,98	1.467,99	1.640,49	1.841,20	1.421,33

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017, data diolah



Tabel 2.26
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
Di Kabupaten Malinau (km), 2012-2016*

Uraian	Jumlah Jenis Permukaan (Aspal, Kerikil, Tanah dan Lainnya)		
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Tahun 2016*	255,00	247,10	919,23
Tahun 2015	255,00	247,10	1.339,10
Tahun 2014	255,00	247,10	1.138,39
Tahun 2013	255,00	247,10	965,89
Tahun 2012	255,00	247,10	603,88

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017, data diolah

*Belum termasuk jalan desa

(4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan daerah Kabupaten malinau dalam kurun waktu 2016-2021 juga mengarah pada pengembangan kawasan permukiman menjadi perkotaan hal ini dapat dilihat dari salah satu empat Komitmen pembangunan daerah kabupaten malinau yakni menjadikan Ibu Kota Malinau menjadi kota mandiri. Melihat visi dan misi kepala daerah yang terpilih bahwa Visi dan Misi Gerakan Desa Membangun menunjukkan pemerintah daerah serius dalam meningkatkan pembangan daerah baik desa maupun perkotaan. Bila melihat pada pola Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang dijadikan landasan pembangunan daerah sebagaimana telah tertuang menjadi visi dan misi kepala daerah sudah jelas bahwa pembangunan mengarah pada kemandirian Desa dalam pengelola dan penataan kawasan pemukiman. Program RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Indah dan Harmonis) merupakan program unggulan daerah dalam meningkatkan pembangunan.

Merujuk pada peraturan daerah kabupaten malinau nomor 11 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Malinau pasal 32 bahwa kawasan peruntukan permukiman terdiri atas ;a)Kawasan permukiman perkotaan, b) kawasan permukiman perdesaan dan ; c) kawasan permukiman pada kawasan khusus. Adapun kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud terdapat di desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, Malinau Seberang, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, dan Pulau Sapi dengan luas kurang lebih 3.002 Ha. Sementara kawasan permukiman perdesaan terdapat pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau dengan luas kurang lebih 5.263 Ha. Selain itu kawasan permukiman pada kawasan khusus yakni ;a) kawasan permukiman yang terletak disekitar pintu masuk perbatasan negara di Long Nawang



Kecamatan Kayan Hulu, yang akan dikembangkan melalui peningkatan perdagangan lintas batas dan didorong pertumbuhannya sebagai kawasan beranda depan negara; b) kawasan perbatasan dan pedalaman yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara ; c) kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah, baik yang terdapat di dalam Taman Nasional Kayan Mentarang maupun di dalam hutan lindung; d) kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi ; dan e) kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata.

(5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu indikator pencapaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien adalah dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas. Peran pembangunan sumberdaya manusia sangat penting, terutama melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur petugas lapangan. Berikut disajikan beberapa data petugas keamanan daerah serta kualifikasi tingkat pendidikan.

Tabel. 2.27
Banyaknya Anggota Hansip sesuai Kulasifikasi Tugas dan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Malinau

Kecamatan	Kualifikasi Tugas	Tingkat Pendidikan		
	Linmas	SD	SMP	SMU
1. Sungai Boh	7	0	1	6
2. Kayan Selatan	3	0	0	3
3. Kayan Hulu	14	0	4	10
4. Kayan Hilir	7	0	0	7
5. Pujungan	4	0	0	4
6. Bahau Hulu	8	1	0	7
7. Sungai Tubu	2	0	0	2
8. Malinau Selatan Hulu	13	0	2	11
9. Malinau Selatan	5	0	0	5
10. Malinau Selatan Hilir	11	0	1	10
11. Mentarang	43	3	4	35
12. Mentarang Hulu	5	0	2	3
13. Malinau Utara	115	16	16	85
14. Malinau Barat	39	5	5	29



15. Malinau Kota	194	16	19	158
Jumlah	470	41	54	375

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017

(6) Sosial

Aspek Sosial merupakan hal yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Selain dari pembangunan sarana prasarana jalan, peningkatan sarana dan prasarana ibadah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembangunan Gedung Ibadah menjadi hal utama mengingat selain pembangunan Infrastruktur yang penting, pembangunan Moral kerohanian masyarakat juga menjadi hal prioritas perhatian Pemerintah Daerah. dengan dipenuhinya kebutuhan sarana ibadah, maka akan berdampak pula pada kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Pembangunan Manusia menjadi hal utama dalam pembangunan pemerintah yakni melalui Revolusi Mental. Melihat data-data yang ada pengembangan Sarana tempat ibadah dari tahun ketahunnya meningkat, secara lengkap dapat dilihat pada data tabel berikut.

Tabel. 2.28
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Malinau Tahun 2016

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Sungai Boh	-	-	7	3	-	-
Kayan Selatan	-	-	6	3	-	-
Kayan Hulu	1	-	5	1	-	-
Kayan Hilir	1	-	6	-	-	-
Pujungan	1	-	10	-	-	-
Bahau Hulu	-	-	9	-	-	-
Sungai Tubu	-	-	6	-	-	-
Malinau Selatan Hulu	-	-	7	2	-	-
Malinau Selatan	4	-	18	6	-	-
Malinau Selatan Hilir	-	-	8	4	-	-
Mentarang	1	-	12	2	-	-
Mentarang Hulu	-	-	10	-	-	-
Malinau Utara	8	3	20	8	-	-
Malinau Barat	3	-	28	4	-	-
Malinau Kota	15	10	22	2	-	-
Kabupaten Malinau 2016	34	13	174	35	1	1
2015	31	12	176	33	1	-
2014	21	14	157	33	0	1
2013	30	13	176	33	0	1

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017



Tabel. 2.29
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama
yang Dianut di Kabupaten Malinau Tahun 2016

Kecamatan	Islam	Protestas	Katholik	HIndu	Budha
Sungai Boh	17	1.710	675	-	-
Kayan Selatan	3	1.259	710	-	-
Kayan Hulu	14	2.664	12	-	-
Kayan Hilir	33	1.327	2	-	-
Pujungan	16	1.760	15	-	-
Bahau Hulu	6	1.337	3	-	-
Sungai Tubu	5	678	1	-	-
Malinau Selatan Hulu	81	1.809	321	-	-
Malinau Selatan	549	3.057	397	2	1
Malinau Selatan Hilir	168	2.265	447	-	-
Mentarang	232	5.263	69	-	1
Mentarang Hulu	15	939	2	-	-
Malinau Utara	6.203	5.542	1.702	33	3
Malinau Barat	1.490	8.277	1.027	12	20
Malinau Kota	16.672	6.491	1.013	32	224
Kabupaten Malinau 2016	25.504	44.378	6.396	79	249

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Tenaga Kerja merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi dalam hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan penghargaan akan kemampuan seseorang. Mengingat akan pentingnya hal tersebut, sudah pantas jika setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Jumlah pencari kerja terdatar di Kabupaten Malinau pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Malinau pada tahun 2016 sebesar 114 pekerja dengan penurunan 60,96 persen. Dari 114 pekerja yang terdaftar, sebesar 70 telah ditempatkan bekerja. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, terdaftar 81 laki-laki dan 33 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Berikut secara jelas disajikan pada tabel berikut :



Tabel. 2.30
Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan Menurut
Tingkat Pendidikan, Status dan Jenis Kelamin
Kabupaten Malinau Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Terdaftar		Ditempatkan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
SD/Sederajat/tidak tamat SD	5	2	3	2
SITP/Sederajat	6	0	3	0
SLTA/Sederajat	34	8	22	3
Diploma I/II/III	17	11	10	7
Sarjana/DIV ke Atas	19	12	13	7
Jumlah/Total	81	33	51	19

Sumber : MDA Tahun 2017, data Diolah

Selanjutnya Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau adalah 37.743 orang atau sekitar 71,29 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angka ini juga menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang berarti sekitar 71,29 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi

Tabel. 2.31
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kabupaten Malinau Tahun 2013-2015

Jenis Kegiatan Utama		2013	2014	2015
I.	Angkatan Kerja	75,38 (36,631)	75,82 (36,189)	71,29 (37,743)
	1. Bekerja	90,76 (33.248)	96,42 (34.893)	91,47 (34.523)
	2. Pengangguran	9,24 (3.383)	3,58 (1.296)	8,53 (3.220)
II.	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	24,62 (11.962)	24,18 (11.539)	28,71 (15.201)
Jumlah		100,00 (48,593)	100,00 (47,728)	100,00 (52,944)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		75,38	75,82	71,29
Tingkat Pengangguran Terbuka		9,24	3,58	8,53



(TPT)			
--------------	--	--	--

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

Tabel. 2.32

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Jenis Kegiatan Utama		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I.	Angkatan Kerja	85,34	53,85	71,29
	1. Bekerja	91,07	92,26	91,47
	2. Pengangguran	8,93	7,74	8,53
II.	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	14,66	46,15	28,71
Jumlah		100,00	100,00	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		85,34	53,85	71,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		8,93	7,74	8,53

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

Tabel. 2.33

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-24	2.756	1.693	4.449
25-54	17.478	8.550	26.028
55 +	2.552	1.494	4.046
Jumlah	22.786	11.737	34.523

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

Sementara dari aspek keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malinau Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan instrumen Keselamatan (K3) terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan Komitmen pemerintah daerah untuk menekankan pentingnya memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan besar yang menerapkan (K3)



ditahun 2013 sebanyak 21 Perusahaan meningkat menjadi 29 perusahaan di tahun 2017. Selain memperhatikan Instrumen Keselamatan Kerja, Aspek keamanan dan Kenyamanan Tempat bekerja juga tidak kalah penting. Untuk meningkatkan produktifitas usaha dalam suatu pekerjaan diperlukan keharmonisan antar pengusaha dan pekerja. Merujuk pada data dapat dilihat bahwa kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempegnaruhi sebagaimana dimaksud antarlain kesempatan kerja yang kurang, besaran upah, maupun kualitas barang maupun jasa yang kurang memuaskan pemilik usaha. Oleh karena itu, angka sengketa pengusaha-pekerja menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Berikut secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut .

Tabel. 2.34
Jumlah Pencari Kerja, Jumlah Usaha Kecil/Menengah, Jumlah Perusahaan penerap (K3), Jumlah Sengketa Pengusaha-pekerja Kabupaten Malinau Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017	Total
Jumlah Pencari Kerja	295	114	226	635
Jumlah Usaha Kecil	13	15	12	40
Jumlah Usaha Menengah	59	96	68	223
Jumlah Perusahaan Besar yang menerapkan (K3)	28	19	29	76
Jumlah kasus Perselisihan antar Perusahaan dan Karyawan	59	96	8	163

Sumber : DPPTSP & TK 2018

2) Pangan

Sesuai ketentuan umum Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. sesuai dengan Undang-undang Nomor Nomor 7 tahun 1996 pasal 2 dan 3 bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 3 tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah :



- 1) Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
- 2) Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
- 3) Terwujudnya tingkat kecukuan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan Program Kepala daerah kabupaten malinau bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan perlu dibutuhkan keseriusan sgenap satkeholder yang ada. Secara khusus pemerintah daerah meluncurkan program unggulan daerah yang salah satunya adalah Program Beras Daerah (Rasda). Program Beras Daerah Sebagaimana dimaksud adalah bentuk nyata kinerja pemerintah untuk meningkatkan mutu Dasar Kualitas Pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan regulasi Produksi dan Distribusi Beras Daerah yang secara langsung menopang kesejahtraan masyarakat. Melihat data yang ada jumlah Target distribusi Beras Daerah (Rasda) pada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) terus mengalami peningkatan. Target tahun 2016 78.210 Kg Meningkat menjadi 155.420 Kg pada Tahun 2017. Sementara Realisasi di tahun 2016 sebanyak 44.970 Kg menjadi 129.090 Kg di Tahun 2017 dari 869 RTS-PM yang ada dikabupaten Malinau. Berikut lebih lengkap dilihat dari data Tabel Berikut :

Tabel. 2.35
Jumlah RTS-PM, Target dan Realisasi Rasda
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2018*

Uraian	2016	2017	2018*
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Daerah (RASDA)	869	869	698
Target dan Realisasi Distribusi RASDA :			
a. Target (Kg)	78.210	156.420	125.640*
b. Realisasi (Kg)	44.970	129.090	65.415*

Sumber : Bagian. Ekonomi, Data diolah
***data sementara, per-Agustus 2018**

Melihat potensi Kabupaten Malinau dari sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani tentu sektor unggulan yang dapat menjadi pilar pembangunan adalah Pertanian Pangan (Sawa/Ladang). Memperhatikan berbagai sumber yang ada luas panen dan produksi padi ladang di Kabupaten Malinau



lebih besar daripada padi sawah. Sebagai contoh pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Kabupaten Malinau adalah sebesar 2.371,0 Ha, sedangkan luas panen padi ladang sebesar 4.821,0 Ha. Berikut data secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.36
Luas lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan
Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Hektar)

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1	Sungai Boh	-	29	29
2	Kayan Selatan	-	44	44
3	Kayan Hulu	-	50	50
4	Kayan Hilir	-	79	79
5	Pujungan	-	25	25
6	Bahau Hulu	-	26	26
7	Sungai Tubu	-	14	14
8	Malinau Selatan Hulu	-	36	36
9	Malinau Selatan	17	430	447
10	Malinau Selatan Hilir	-	35	35
11	Mentarang	389	1.105	1.494
12	Mentarang Hulu	-	147	147
13	Malinau Utara	379	577	956
14	Malinau Barat	172	749	921
15	Malinau Kota	-	553	553
MALINAU		957	3.899	4.856

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

Tabel. 2.37
Luas lahan padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan
Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Hektar)

No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang
1	Sungai Boh	0,00	35,00
2	Kayan Selatan	28,90	464,00
3	Kayan Hulu	15,00	417,00
4	Kayan Hilir	18,90	300,00
5	Pujungan	2,00	335,00
6	Bahau Hulu	0,00	320,00
7	Sungai Tubu	0,00	0,00
8	Malinau Selatan Hulu	11,00	237,00



9	Malinau Selatan	128,70	248,00
10	Malinau Selatan Hilir	9,00	400,00
11	Mentarang	794,60	269,00
12	Mentarang Hulu	50,80	234,00
13	Malinau Utara	297,10	109,00
14	Malinau Barat	813,60	357,00
15	Malinau Kota	201,50	96,00
MALINAU		2.371,10	4.821,00

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

3) Pertanahan

Dalam urusan pertanahan terdapat tiga indikator yang menjadi urusan pertanahan yakni persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Di kabupaten Malinau jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau selama tahun 2015 adalah sebanyak 89, sedangkan jumlah sertifikat tanah menurut permohonan pendaftaran tanah sebanyak 70.

Tabel. 2.38
Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut jenis hak Hak Atas Tanah dan Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016*

No	Kecamatan	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Guna Usaha	Hak Pakai	Hak Penggunaan Lahan	Jumlah
1	Sungai Boh	-	-	-	-	-	-
2	Kayan Selatan	-	-	-	1	-	1
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-
4	Kayan Hilir	-	-	-	1	-	1
5	Pujungan	-	-	-	-	-	-
6	Bahau Hulu	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Tubu	-	-	-	-	-	-
8	Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-	-	-
9	Malinau Selatan	2	-	-	-	-	2
10	Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-	-	-
11	Mentarang	-	-	-	1	-	1
12	Mentarang Hulu	-	-	-	-	-	-
13	Malinau Utara	16	1	-	-	-	17
14	Malinau Barat	5	-	-	1	-	6



15	Malinau Kota	59	2	-	-	-	61
Kab. Malinau 2016*		82	3	-	4	-	89

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

Tabel. 2.39
Jumlah Sertifikat Menurut Kecamatan dan Permohonan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Malinau Tahun 2016*

No	Kecamatan	Jual Beli	Hibah	Pemisa-han	Akte Pemberian Hak Tanggungan	Jumlah
1	Sungai Boh	-	-	-	-	-
2	Kayan Selatan	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-
4	Kayan Hilir	-	-	-	-	-
5	Pujungan	-	-	-	-	-
6	Bahau Hulu	-	-	-	-	-
7	Sungai Tubu	-	-	-	-	-
8	Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-	-
9	Malinau Selatan	1	-	-	-	1
10	Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-	-
11	Mentarang	1	-	-	-	1
12	Mentarang Hulu	-	-	-	-	-
13	Malinau Utara	6	-	1	2	9
14	Malinau Barat	1	1	-	-	2
15	Malinau Kota	28	4	14	11	57
Kab. Malinau 2016*		37	5	15	13	70

Sumber : Data Pembangunan Tahun 2017

4) Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Melihat sumber data yang tersedia secara khusus penanganan kasus pengaduan masyarakat



terkait Persampahan dan Pencemaran Sungai secara langsung mendapat respon dan tanggapan dari pemerintah daerah. Dimana dapat diketahui Salah satu sumber PAD Kabupaten Malinau adalah bersumber dari Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam hal ini sektor Pertambangan batu bara, menjaga kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas pembangunan di kabupaten malinau serta dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan data penanganan kasus pencemaran lingkungan.

Tabel. 2.40
Status Pengaduan dan Penangan Kasus Laporan Masyarakat
terkait Pencemaran Lingkungan Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Jenis Permasalahan/Kasus yang Dilaporkan	Lokasi	Status Penanganan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kasus persampahan yang belum diangkut	Desa Batu Lidung	Tertangani
2	Kasus persampahan yang belum diangkut	Desa Lubuk Manis	Tertangani
3	Kasus persampahan yang belum diangkut di jl. Swadaya	Malinau Kota	Tertangani
4	Kasus persampahan yang belum diangkut	Malinau Kota	Tertangani
5	Kasus Pencemaran Sungai Malinau oleh perusahaan Tambang	Malinau	Tertangani
6	Pencemaran ladang masyarakat akibat penutupan gorong-gorong di jalan batu bara desa Batu Lidung	Desa Batu Lidung	Tertangani
7	Pencemaran tumpahan BBM (solar) PT. BDMS	Malinau	Tertangani

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Data diolah 2017

Sementara itu, untuk kebutuhan air minum dan air bersih di Kabupaten Malinau seluruhnya bersumber dari air Sungai dan ketersediaan air minumnya dipenuhi oleh PDAM. Melihat data yang ada sumber air Minum adalah aliran sungai, tentu menjaga terkontaminasinya aliran sungai terhadap limbah batu bara menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah menjaga kualitas air minum. Untuk pengelolaan Sumber air Minum dilakukan Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malinau.



Tabel. 2.41
Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, Sumber Mata Air Baku, dan Tenaga Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perusahaan	1	1	1	1	1
2	Status Perusahaan					
	• Pemerintah	1	1	1	1	1
	• Swasta	-	-	-	-	-
3	Kapasitas Produksi (ltr/detik)					
	• Potensial	142,5	115	130	150	130
	• Efektif	89	115	106	110	114
8	Sumber Air (tempat)					
	• Sungai	1	1	1	1	1
10	Jumlah Tenaga Kerja					
	• Pekerja teknis	20	21	-	21	19
	• Pekerja administrasi	23	-	-	18	18
	• Tenaga Keamanan	2	2	-	1	1

Sumber : Data Pembangunan Daerah 2017

5) Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam suatu wilayah administratif keberhasilan pembangunan tentu akan didukung dengan data-data yang valid. Data yang baik dan benar akan berdampak pada pencapaian tujuan dan target pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) adalah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). dimana surat dimaksud akan memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan dan dapat digunakan sebagai syarat dalam pembuatan berbagai surat-surat penting seperti Pembuatan Surat Ijin Mengemudi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan pengurusan Dokumen lainnya. Data Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2013 kabupaten malinau 68,88 persen menurun pada Tahun 2017 64,69 persen.

Selain Kartu tanda Penduduk (KTP) setiap warga Negara yang melaksanakan perwakinan, serta jumlah kelahiran tentu harus memiliki surat-surat yang secara administratif di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil misalnya Akta Nika, Akta Kelahiran. Data-data pribadi ini dijadikan dasar dalam kepengurusan Surat-surat penting lainnya yang tentu memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dengan ketersediaan berbagai data setiap warga negara maka akan



memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan startegis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lengkap dapat dilihat pada data berikut :

Tabel. 2.42
Jumlah Kepemilikan KTP, Belum Memiliki KTP, Rasio Penduduk ber-KTP, Rasio Bayi Berakta Kelahiran, Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Memiliki KTP	35,363	34,813	30,988	22,748	33,847
2	Jumlah Penduduk belum Memiliki KTP	15,976	13,789	20,312	28,356	18,471
3	Rasio Penduduk ber-KTP	68,88	71,63	60,41	44,51	64,69
4	Rasio Pasangan Berakta Nikah	0,443	0,435	0,436	0,436	0,437
5	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0,11	0,12	0,14	0,18	0,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Data Diolah 2018

Tabel. 2.43
Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perwakinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2016

Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	45,91	50,65	1,28	2,16	100,00
Perempuan	32,33	59,49	1,13	7,05	100,00
Laki-Laki + Perempuan	39,75	54,66	1,21	4,38	100,00

Sumber : Data Pembangunan 2017



Tabel. 2.44
Banyaknya Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Boh	524	465	989
2	Kayan Selatan	540	476	1.016
3	Kayan Hulu	752	695	1.447
4	Kayan Hilir	359	291	650
5	Pujungan	611	523	1.134
6	Bahau Hulu	529	441	970
7	Sungai Tubu	187	155	342
8	Malinau Selatan Hulu	435	383	818
9	Malinau Selatan	989	844	1.833
10	Malinau Selatan Hilir	635	565	1.200
11	Mentarang	1.336	1.256	2.592
12	Mentarang Hulu	298	265	563
13	Malinau Utara	3.023	2.593	5.616
14	Malinau Barat	2.516	2.374	4.890
15	Malinau Kota	5.190	4.864	10.054
Kab. Malinau 2016*		17.924	15.899	34.114

Sumber : Data Pembangunan 2017

Merujuk pada aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan ketentuan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Secara khusus di kabupaten Malinau telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK sehingga hal ini diharapkan mempermudah dalam proses administrasi kependudukan.

Selain itu, Ketersediaan *database* kependudukan juga sangat penting terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data kependudukan. Ketersediaan *database* akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Untuk kabupaten Malinau ketersediaan Database kependudukan sudah ada. Sehingga hal ini diharapkan mempermudah segenap pemangku kepentingan dalam pembuatan data administrasi kependudukan yang lebih Akuntabel.



6) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau priode pertama 2011-2016 sampai dengan priode kedua 2016-2021 pemerintah daerah Kabupaten Malinau Tetap konsisten dengan Visi dan Misi yakni terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). GERDEMA menjadi Paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat". Filosofi yang terkandung dalam paradigma ini adalah suatu sikap yang tulus dan ikhlas percaya kepada rakyat bawa rakyat akan mampu berbuat untuk membangun dirinya.

Sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di undangkan yang secara eksplisit memberikan Otonom Khusus Kepada Desa untuk Mengurus Desanya sendiri sesuai kewenangan yang telah diberikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau lebih dahulu melaksanakannya lebih awal dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, dan juga sebagai bentuk konsistensi dalam penerapan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menempatkan desa sebagai suatu daerah otonom.

Selain Pola Pembangunan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang telah berjalan 5 Tahun kurun waktu 2011-2016 dan dirasakan telah berhasil oleh warga masyarakat, pada priode kedua tahun 2016-2021 kepemimpinan kapala daerah Kabupaten Malinau tetapn berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan GERDEMA dengan memberikan peran warga RT (Rukun Tetangga) yang lebih besar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang RAPI, TERTIB, BERSIH, SEHAT, INDAH dan HARMONIS (RT BERSIH).

RT-BERSIH merupakan penajaman dan perluasan GERDEMA yang mendorong setiap anggota masyarakat mulai dari tingkat RT dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. RT-BERSIH juga memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dari pembangunan desa sehingga tidak ada satu orangpun anggota masyarakat yang tertinggal atau terlupakan. Berikut disajikan tabel Jumlah Desa, Perangkat Desa, RT di setiap Kecamatan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel. 2.45
Banyaknya Desa dan RT Menurut Kecamatan
Kabupaten Malinau Tahun 2017*

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Banyaknya	
			Desa	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Boh	Mahak Baru	6	15
2	Kayan Selatan	Long Ampung	5	13



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

3	Kayan Hulu	Long Nawang	5	20
4	Kayan Hilir	Data Dian	5	15
5	Pujungan	Long Pujungan	9	21
6	Bahau Hulu	Long Alango	6	13
7	Sungai Tubu	Long Pada	5	13
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	8	27
9	Malinau Selatan	Long Loreh	9	32
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	8	21
11	Mentarang	Pulau Sapi	9	34
12	Mentarang Hulu	Lung Barang	7	11
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	12	49
14	Malinau Barat	Tanjung Lapang	9	43
15	Malinau Kota	Malinau	6	54
Kabupaten Malinau			109	381

Sumber : Data Pembangunan 2017

***) Data awal tahun**

Tabel. 2.46
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Status Desa
Kabupaten Malinau Tahun 2017*

No	Kecamatan	Status Desa				Jumlah
		Tertinggal	%	Tidak Tertinggal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sungai Boh	1	16,67	5	83,33	6
2	Kayan Selatan	0	0,00	5	100,00	5
3	Kayan Hulu	1	20,00	4	80,00	5
4	Kayan Hilir	1	20,00	4	80,00	5
5	Pujungan	8	88,89	1	11,11	9
6	Bahau Hulu	6	100,00	0	0,00	6
7	Sungai Tubu	5	100,00	0	0,00	5
8	Malinau Selatan Hulu	7	87,50	1	12,50	8
9	Malinau Selatan	7	77,78	2	22,22	9
10	Malinau Selatan Hilir	8	100,00	0	0,00	8
11	Mentarang	8	88,89	1	11,11	9
12	Mentarang Hulu	7	100,00	0	0,00	7
13	Malinau Utara	12	100,00	0	0,00	12
14	Malinau Barat	7	77,78	2	22,22	9
15	Malinau Kota	2	33,33	4	66,67	6
Kabupaten Malinau		80	73,39	29	26,61	109

Sumber : Data Pembangunan 2017



Tabel. 2.47
Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan
Kabupaten Malinau Tahun 2017*

No	Kecamatan	Jumlah Perangkat Desa		
		Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kasi & Kaur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Boh	6	6	18
2	Kayan Selatan	5	5	15
3	Kayan Hulu	5	5	15
4	Kayan Hilir	5	5	15
5	Pujungan	9	9	27
6	Bahau Hulu	6	6	18
7	Sungai Tubu	5	5	15
8	Malinau Selatan Hulu	8	8	24
9	Malinau Selatan	9	9	27
10	Malinau Selatan Hilir	8	8	24
11	Mentarang	9	9	27
12	Mentarang Hulu	7	7	21
13	Malinau Utara	12	12	26
14	Malinau Barat	9	9	27
15	Malinau Kota	6	6	18
Kabupaten Malinau		109	109	327

Sumber : Data Pembangunan 2017

***) Data awal tahun**

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kesehatan adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kesehatan yang baik memberikan kesempatan kepada penduduk untuk aktif bekerja dan berkreasi. Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, tenaga kerja kesehatan, dan penyuluh kesehatan merupakan contoh usaha yang diambil oleh pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan pengendalian penduduk melalui Program Keluarga Berencana dapat dilihat bahwa kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Malinau untuk mengikuti program KB terpantau menurun. Pada tahun 2012 persentase Peserta KB sebanyak 74,95 Persen turun menjadi 13,55 Persen di Tahun 2016. Sementara Persentase peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Pada Tahun 2016 yang paling aktif adalah Kecamatan Kayan Hulu sebesar 90,81 persen, disusul Kecamatan sungai Boh 55,32 Persen, Kecamatan malinau Selatan 44,02 persen dan yang paling kecil



persentasenya adalah Kecamatan Malinau Kota 3,03 Persen dan bahkan terdapat 4 (empat) Kecamatan yang Persentase KB Aktifnya nol persen hal ini dampak dari Pasangan Usia Subur yang tidak mengikuti program KB.

Tabel. 2.48
Jumlah Peserta KB Aktif dan Peserta Baru dan Persentasenya
Terhadap Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan
Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Peserta KB			
			Baru	%	Aktif	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sungai Boh	479	232	48,43	265	55,32
2	Kayan Selatan	565	205	36,28	216	38,23
3	Kayan Hulu	381	345	90,55	346	90,81
4	Kayan Hilir	302	23	7,62	40	13,25
5	Pujungan	401	-	-	48	11,97
6	Bahau Hulu	325	129	39,69	131	40,31
7	Sungai Tubu	-	-	-	-	-
8	Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-	-
9	Malinau Selatan	1.304	542	41,56	574	44,02
10	Malinau Selatan Hilir	642	85	13,24	32	4,98
11	Mentarang	1.180	29	2,46	81	6,86
12	Mentarang Hulu	168	3	1,79	27	16,07
13	Malinau Utara	2.257	-	-	-	-
14	Malinau Barat	1.654	-	-	-	-
15	Malinau Kota	4.290	362	8,44	130	3,03
Kabupaten Malinau 2016		13.948	1.955	14,02	1.890	13,55

Sumber : Data Pembangunan 2017

Tabel. 2.49
Jumlah Peserta KB Aktif dan Peserta Baru dan Persentasenya
Terhadap Pasangan Usia Subur Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Uraian	Pasangan Usia Subur	Peserta KB			
			Baru	%	Aktif	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tahun 2016	13.948	1.955	14,02	1.890	13,55
2	Tahun 2015	14.648	-	-	6.577	44,90



3	Tahun 2014	15.025	-	-	8.981	59,77
4	Tahun 2013	13.914	2.134	15,34	7.470	53,69
5	Tahun 2012	13.974	6.275	44,90	10.473	74,95

Sumber : Data Pembangunan 2017

8) Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan Sarana dan prasarana Perhubungan, Akses Telekomunikasi Merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malinau. Melihat Kondisi Antar Wilayah Kecamatan yang secara letak Geografis berjauhan serta Akses Transportasi sulit terjangkau melalui darat, udara, Sungai tentu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembangunan Jalan konkesi antar wilayah kecamatan, Desa dan Kecamatan perlu mendapatkan Keseriusan Pemerintah Daerah, peningkatan sarana jalan, sarana Penerbangan dan sarana Sungai menjadi utama dalam pembangunan. Kemudahan dan keterjangkauan Akses transportasi akan meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudahan hilir mudiknya aktifitas usaha masyarakat merupakan tolak ukur peningkatan perekonomian di daerah. Sementara itu sarana Komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting, di era globalisasi dan modernisasi alat Komunikasi menjadi hal utama penunjang ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. ketergantungan masyarakat terhadap alat Komunikasi sudah tidak terlepas dari kebutuhan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Sudah Membangun beberapa tower telekomunikasi di beberapa wilayah kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dikabupaten Malinau terdapat 12 bandara perintis yang terdiri dari 2 bandara dengan landasan aspal dan sisanya landasan tanah/rumput. Pada tahun 2016, jumlah penerbangan datang dan pergi di bandara Malinau adalah sebanyak 2.537 dan 2.767. dari sektor transportasi darat jumlah kendaraan yang terintegrasi di Kabupaten Malinau terus meningkat dan masih didominasi oleh sepeda motor. Pada tahun 2016, terdapat 19.342 unit sepeda motor. Mobil barang merupakan jenis kendaraan terbanyak kedua dengan jumlah 1.851 unit lalu disusul oleh mobil penumpang sebanyak 1.542 unit.

Selanjutnya dari pos dan telekomunikasi pada tahun 2016, jumlah surat yang dikirim melalui Kantor Pos Kabupaten Malinau ialah sebanyak 3.787 surat, dengan sifat pengiriman yang paling diminati adalah kilat khusus. Sementara itu, jumlah surat yang diterima selama tahun 2016 adalah sebanyak 52.863 surat.



Tabel. 2.50
Nama, Panjang, Kondisi, dan Status Lapangan Terbang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	Nama Lapangan	Panjang Landasan	Kondisi Lapangan	Pesawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kayan Hulu	Long Nawang	440x15	Rumput	Pilatus
2	Sungai Boh	Mahak Baru	650x23	Gravel (Kerikil)	Caravan
		Long Lebusan	800x30	Tanah/Rumput	Pilatus
3	Kayan Hilir	Data Dian	420x18	Tanah/Rumput	Pilatus
		Long Sule	430x20	Tanah/Rumput	Pilatus
		Long Metun	-	-	-
4	Kayan Selatan	Long Ampung	900x23	Aspal	Caravan
		Long Sungai Barang	360x20	Rumput	Pilatus
5	Pujungan	Long Pujungan	1200x30	Aspal	Pilatus
6	Bahau Hulu	Long Alango	330x20	Tanah/Rumput	Pilatus
7	Malinau	Kol. RA. Bessing	1450x30	Aspal	ATR-42
8	Mentarang Hulu	Long Pala	340x20	Tanah	-

Sumber : Data Pembangunan 2017

Tabel. 2.51
Nama, Panjang, Kondisi, dan Status Lapangan Terbang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Uraian	Penerbangan		Penumpang		
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tahun 2016	2.537	2.767	27.679	30.321	0
2	Tahun 2015	2.818	3.035	28.602	30.353	0
3	Tahun 2014	3.123	3.124	26.302	31.739	0
4	Tahun 2013	2.628	3.270	22.923	30.044	2.621
5	Tahun 2012	2.940	2.939	14.004	21.925	0

Sumber : Data Pembangunan 2017



Tabel. 2.52
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teregistrasi dan Teridentifikasi Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Malinau (Unit) Tahun 2011-2016

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mobil Penumpang	1.005	1.192	1.336	1.474	1.542
Bus	32	33	35	35	35
Mobil Barang	978	1.194	1.611	1.781	1.851
Sepeda Motor	13.437	15.458	17.033	18.441	19.342

Sumber : Data Pembangunan 2017

Tabel. 2.53
Banyaknya Surat Pos yang dikirim Menurut Tujuan dan Sifat Pengiriman di Kabupaten Malinau Tahun 2016

Uraian	Dalam Negeri					Luar Negeri
	Biasa	Kilat	Kilat Khusus	Tercatat	Jumlah	
Tahun 2016	1.224	858	1.705	0	3.787	0
Tahun 2015	196	296	3.119	0	3.611	0
Tahun 2014	0	0	3.301	0	3.301	7
Tahun 2013	318	156	3.332	60	3.866	10

Sumber : Data Pembangunan 2017

9) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, salah satunya azas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Salah satu penggerak sektor keuangan di Kabupaten Malinau adalah koperasi. Pada tahun 2016, tercatat jumlah koperasi di Kabupaten Malinau adalah sebanyak 115 unit, yang terdiri dari 3 unit KUD, 1 unit Kopkar, dan 111 unit Koperasi Lainnya.



Tabel. 2.54
Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Koperasi
di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	K U D	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Boh	-	-	4	4
2	Kayan Selatan	-	-	3	3
3	Kayan Hulu	1	-	5	6
4	Kayan Hilir	-	-	4	4
5	Pujungan	1	-	4	5
6	Bahau Hulu	-	-	2	2
7	Sungai Tubu	-	-	-	-
8	Malinau Selatan Hulu	-	-	1	1
9	Malinau Selatan	-	-	11	11
10	Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11	Mentarang	1	-	6	7
12	Mentarang Hulu	-	-	1	1
13	Malinau Utara	-	-	18	18
14	Malinau Barat	-	1	15	16
15	Malinau Kota	-	-	37	37
Kabupaten Malinau 2016		3	1	111	115

Sumber : Data Pembangunan 2017

Tabel. 2.55
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi
di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Jenis Koperasi	Jumlah Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
1	K U D	3
2	K S U	57
3	K P N	3
4	Koperasi Pertanian	19
5	Koperasi Perkebunan	6
6	Koperasi Pertanian dan Perkebunan	4
7	Koperasi Distribusi	1
8	Koperasi Pasar	3



9	Koperasi Angkutan	1
10	Koperasi Wanita	1
11	Koperasi Sekolah	1
12	Koperasi TKBM	1
13	Koperasi Simpan Pinjam	2
14	Primer Koperasi Angkutan Darat	2
15	Koperasi Pondok Pesantren	1
16	Koperasi Peternakan	1
17	Koperasi Jasa	5
18	Koperasi Karyawan	1
19	Lainnya	3
Jumlah		115

Sumber : Data Pembangunan 2017

10) Penanaman Modal

Jumlah Investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Penanaman modal di Kabupaten Malinau masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.56
Realisasi Investasi Tahun 2012-2016
Kabupaten Malinau

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	73.882	1.050.041	512.192	81.560	0
2.	Realisasi Investasi PMA (us\$)	0	3.952.000	0	0	0
3.	Jumlah Proyek	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Usaha PMDN	357	383	284	192	167
4.	Jumlah Usaha PMA	0	1	2	0	6



5.	Jumlah Tenaga Kerja Lokal (orang)	2.759	3.257	1.675	3.037*	4.165
6.	Jumlah Tenaga Kerja Asing (orang)	4	1	1	1	11

Sumber : Malinau Dalam Angka 2017

11) Kepemudaan dan Olahraga

Olah raga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan manusia dan merupakan keinginan yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan olahraga, hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat selain itu berguna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat jasmani dan rohani yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat dan kehormatan bangsa.

Melihat data yang ada di Kabupaten Malinau sarana dan Prasaran Olahraga Sudah tersedia sesuai bidang dan jenis olahraga. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga mulai dari tingkat kecamatan dan desa perlu digalakkan mengingat antusiasme olahraga warga masyarakat malinau yang besar. Melihat kondisi terkini bidang olahraga yang diminati masyarakat malinau adalah Sepak Bola. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Turnamen-Turnamen Sepak Bola maupun Futsal mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel. 2.57
Banyaknya Sarana Gedung/Tempat/Lapangan Olahraga dan Jenis Olahraga Di Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Sarana Gedung/Tempat/Lapangan				
		Sepak Bola	Bola Voly	Tenis Lapangan	Bulu Tangkis	Lainnya
1	Kayan Hulu	-	-	-	-	-
2	Sungai Boh	-	-	-	-	-
3	Kayan Selatan	-	-	-	-	-
4	Kayan Hilir	-	-	-	-	-
5	Pujungan	-	-	-	-	-
6	Bahau Hulu	-	-	-	-	-
7	Malinau Kota	2	6	2	1	4
8	Malinau Selatan	-	-	-	-	-



9	Malinau Barat	3	8	-	1	4
10	Malinau Utara	3	4	1	1	4
11	Mentarang	3	5	-	1	3
12	Mentarang Hulu	-	-	-	-	-
Jumlah		11	23	3	4	15

Sumber : Satatistik Kabupaten Malinau 2016

Tabel. 2.58
Banyaknya Kelompok Olahraga di Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Sarana Gedung/Tempat/Lapangan				
		Sepak Bola	Bola Voly	Tenis Lapangan	Bulu Tangkis	Lainnya
1	Kayan Hulu	1	2	-	1	-
2	Sungai Boh	1	2	-	1	-
3	Kayan Selatan	1	2	-	1	-
4	Kayan Hilir	1	2	-	1	-
5	Pujungan	1	2	-	1	-
6	Bahau Hulu	1	2	-	1	-
7	Malinau Kota	6	8	2	8	-
8	Malinau Selatan	2	4	-	2	-
9	Malinau Barat	4	4	1	6	-
10	Malinau Utara	3	4	-	4	-
11	Mentarang	4	6	-	4	-
12	Mentarang Hulu	2	2	-	1	-
Jumlah		27	40	3	31	-

Sumber : Satatistik Kabupaten Malinau 2016

12) Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan kedalam data terukur. Oleh karena itu seharusnya buku statistik ini dapat terinformasi secara progresif, Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap dan data yang disajikan kurang lengkap. Dalam meningkatkan Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Akomodatif, efektif dan efisien data-data yang disajikan diambil dari berbagai sumber data, mulai dari data pustaka, Dokumen, serta Data-Data yang diambil langsung dari setia Organisasi Perangkat Daerah yang Akuntabel. Di kabupaten Malinau Ketersediaan data dan Buku sudah diterbitkan Setiap tahunnya yakni Buku Malinau Dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Malinau dan Data Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Malinau Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.



13) Kebudayaan

Kebudayaan menjadi sesuatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia secara umum dan secara Khusus Masyarakat Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu unsur identitas diri serta ciri khas suatu wilayah/daerah dalam menjaga rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa " Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Kabupaten Malinau Memiliki masyarakat yang beragam dari berbagai macam Etnis, Budaya dan Kesenian. Keanekaragaman budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi Wisatawan baik mancanegara dan Nasional. Dengan banyaknya jumlah kunjungan wisata tentu meningkatkan pendapatan Daerah dan Meningkatkan Perekonomian masyarakat Malinau. Bentuk peran aktif pemerintah daerah adalah memfasilitasi warganya untuk mengembangkan Kebudayaan Masing-masing Wilayah Kecamatan dan Desa. Di Kabupaten Malinau Terdapat beberapa Desa yang statusnya sudah menjadi Desa Wisata dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung serta mendorong peran masyarakat agar lebih mengembangkan Nilai-Nilai Budaya.

Tabel. 2.59
Banyaknya Kelompok Kesenian
Kabupaten Malinau 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	38	0	38	0	0
2014	25	0	25	0	0
2015	25	0	25	0	0
2016	28	0	28	0	0
2017	28	0	28	0	0

Sumber : Satatistik Kabupaten Malinau 2016



Tabel. 2.60
Banyaknya Anggota Kelompok Seni
Kabupaten Malinau 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	877	0	877	0	0
2014	586	0	586	0	0
2015	750	0	750	0	0
2016	1.040	0	1.040	0	0
2017	1.040	0	1.040	0	0

Sumber : Satatistik Kabupaten Malinau 2016

Tabel. 2.61
Banyaknya Sarana Gedung/ Tempat Kesenian
Kabupaten Malinau 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2013	33	0	0	0	0
2014	56	0	0	0	0
2015	56	0	0	0	0
2016	56	0	0	0	0
2017	56	0	0	0	0

Sumber : Satatistik Kabupaten Malinau 2016

14) Perpustakaan

Perpustakaan adalah sumber berbagai ilmu. Buku yang menjadi bahan pustaka merupakan penopang wacana yang akan kita bangun juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pentingnya Perpustakaan adalah dapat menyediakan berbagai Buku yang dapat menjadi jendela ilmu untuk menerawang kejadian sekitar kita maupun masa lampau dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai modal mencapai tujuan. Ketersediaan perpustakaan sudah ada di Kabupaten Malinau sudah ada mulai dari Perpustakaan Umum dan Sekolah. Selain ketersediaan perpustakaan Jumlah Pengunjung perpustakaan Daerah Rata-rata per Tahun nya Meningkat, Dimana pada tahun 2013 sebanyak 3.668 orang meningkat menjadi 12.400



orang di tahun 2016, meskipun menurun ditahun 2017 sebanyak 7.659 hal ini dampak dari meningkatnya saran perpustakaan diwilayah Desa dan Kecamatan.

Tabel. 2.62
Banyaknya Perpustakaan Menurut Jenisnya
Kabupaten Malinau 2013-2017

Tahun	Perpustakaan Umum			Instansi Department	Sekolah				Jumlah Total
	Desa	Kecamatan	Kebupaten		SD	SLTP	SLTA	PT	
2017	19	5	1	1	0	0	0	1	27
2016	18	5	1	1	0	0	0	1	26
2015	18	4	1	1	0	0	0	1	25
2014	15	4	1	0	0	0	0	0	23
2013	15	4	1	0	0	0	0	0	20

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel. 2.63
Banyaknya pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Malinau 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah	3.668	2.038	3.065	12.400	7.659
Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	9.621	9.627	9.627	10.377	10.465

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

15) Kearsipan

Arsip adalah dokumen penting yang diperlukan sebagai informasi hukum, historis dan sebagai informasi terkini. Oleh karena pentingnya Arsip dalam kehidupan sosial bahkan dalam pembangunan daerah maka manajemen serta pengelolaan arsip haruslah tertata dengan baik secara efektif dan efisien. Selain peningkatan tatakelolah arsip yang baik dan benar peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan juga perlu ditingkatkan. Sesuai dengan informasi yang tersedia dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bahwa Pembinaan Pengelolaan arsip sudah dilakukan mulai tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan. Dari data



yang ada, pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.204 data arsip aktif yang dikelola Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan Rincian Tahun 2017 sebanyak 593 berkas dan 611 berkas di Tahun 2018 (tahun berjalan). Sementara itu arsip inaktif total jumlah yang dikelola selama kurun waktu empat tahun belakang sebanyak 1.251 berkas dengan rincian Tahun 2013 : 40 berkas, Tahun 2014 : 292 berkas, Tahun 2015 : 279 berkas dan tahun 2016 : 640 berkas. Selanjutnya arsip inaktif dari Organisasi Perangkat Daerah Dari tahun 1976 S/d 2010 sebanyak 4.673 berkas.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Pertanian

Kabupaten Malinau memiliki potensi pertanian yang besar karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Jenis pertanian sebagaimana dimaksud meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Dominasi pertanian adalah sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan.

a) Padi, Palawija dan Hortikultura

Luas panen dan produksi padi ladang di Kabupaten Malinau lebih besar dari padi sawah. Sebagai contoh pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Kabupaten Malinau adalah sebesar 2.371,0 Ha, sedang kan luas panen padi ladang sebesar 4.821,0 Ha. Dalam beberapa tahun mendatang tantangan yang dihadapi Kabupaten Malinau adalah meningkatkan produktifitas pertanian guna mencapai program beras daerah (Rasda) Kabupaten Malinau.

Tabel. 2.64
Luas Panen padi Sawah dan Padi Ladang (Hektar) tahun 2011-2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016
Padi Sawah	2.479,00	2.957,00	3.020,00	3.078,00	2.371,10
Padi Ladang	6.393,00	5.651,00	5.559,00	5.255,00	4.821,00

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Untuk tanaman palawija, luas panen beberapa komoditas seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Sebaliknya, komoditas seperti kedelai dan kacang hijau



mengalami peningkatan. Tanaman palawija yang memiliki luas panen terbesar di tahun 2016 adalah jagung, yaitu sebesar 75,00 hektar. Selain itu, pada tahun 2016 produksi tanaman Petsai/Sawi (503,50 Ton) lalu disusul oleh kangkung (365,00 ton). Sementara itu Buah-buahan yang memiliki jumlah produksi yang terbesar adalah jeruk sima (3.983 kuintal) kemudian diikuti oleh nangka/cempedak (3.150 kuintal). Tantangan yang dihadapi Kabupaten Malinau adalah menyediakan lahan, Pembinaan Kelompok Pertanian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Tabel. 2.65
Luas Panen Tanaman Palawija (hektar) tahun 2011-2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016
Jagung	129,00	89,00	85,00	106,00	75,00
Kedelai	10,00	15,00	8,00	7,00	13,00
Kacang Tanah	23,00	23,00	32,00	39,00	39,00
Kacang Hijau	12,00	6,00	4,00	9,00	18,00
Ubi Kayu	198,00	137,00	109,00	61,00	53,00
Ubi Jalar	48,00	62,00	37,00	23,00	21,00

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.66
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016
Petsai/Sawi	95,00	69,40	34,50	18,40	503,50
Kacang Panjang	389,00	135,00	63,20	47,20	25,10
Cabe Besar	0	0	11,80	6,70	86,70
Cabe Rawit	0	0	129,50	135,00	328,80



Tomat	68,00	55,00	19,90	14,20	317,00
Terong	188,00	89,00	87,30	32,20	360,00
Buncis	71,00	31,00	11,20	6,40	40,20
Ketimun	311,00	91,00	84,60	31,40	170,30
Kangkung	269,00	83,00	60,20	25,30	365,00
Bayam	258,00	82,00	29,90	15,60	109,00

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.67
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura
diatas 200 Kuintal Tahun 2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Tanaman	Berat (Kuintal)
Duku	211
Durian	963
Jeruk Siam	3.983
Jeruk Besar	421
Mangga	419
Nangka	3.150
Nenas	297
Pepaya	1.790
Pisang	3.016
Sukun	235

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017



2) Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Produksi tanaman perkebunan yang terbesar di Kabupaten Malinau pada tahun 2016 adalah kelapa sawit, yaitu sebesar 9.372 ton, diikuti oleh produksi kakao sebesar 290 ton. Namun, untuk luas tanamannya, Karet Merupakan Komoditas dengan luas tanaman terbesar diikuti oleh kakao. Khusus untuk komoditas karet, jumlah produksinya hanya mencapai 25 ton. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel. 2.68
Luas Tanaman Perkebunan (Ha) Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Malianu

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016
Karet	1.466,00	1.626,00	1.626,00	2.493,00	2.493,00
Kelapa	6,50	6,00	6,00	0	0
Kelapa Sawit	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.188,00	1.188,00
Kopi	2.058,00	2.038,00	1.772,00	1.599,00	1.506,00
Lada	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kakao	4.199,50	4.116,00	3.855,00	1.879,00	1.621,00

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.69
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Malianu

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016
Karet	0	0	26,00	30,00	25,00
Kelapa	1,50	2,00	2,00	0	0
Kelapa Sawit	0	0	9.108,00	9.312,00	9.372,00
Kopi	670,00	518,00	171,00	171,00	168,00



Lada	3,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Kakao	802,00	822,00	385,00	365,00	290,00

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Sektor peternakan pada tahun 2016 masih didominasi oleh hewan ternak babi, yaitu sebanyak 12.029 ekor, diikuti oleh populasi sapi potong sebanyak 1.848 ekor dan kambing 384 ekor. Semetara itu, populasi unggas yang paling banyak adalah ayam ras pedaging, yaitu sebanyak 109.991 ekor. Melihat perkembangan sektor peternakan tantangan Kabupaten Malinau tiga tahun mendatang adalah mendorong pengembangan dan produktifitas peternakan dengan peningkatan sumberdaya Petani dan penyediaan bibit unggul ternak.

Tabel. 2.70
Populasi Ternak Menurut jenis ternak (ekor) Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016
Sapi Potong	1.814	2.287	1.917	1.751	1.848
Kerbau	122	172	119	113	48
Kambing	668	773	683	679	384
Babi	13.075	12.082	11.281	11.891	12.029

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.71
Populasi Unggas Menurut Jenis unggas (ekor) Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Malinau

Jenis Unggas	2012	2013	2014	2015	2016
Ayam Kampung	137.916	74.019	114.364	101.557	104.634
Ayam Ras Pedaging	229.747	245.465	125.600	132.102	109.991
Ayam Ras Petelur	0	0	0	0	200



Itik	16.134	21.591	14.404	13.792	14.125
------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Selain itu, Kabupaten Malinau tidak memiliki wilayah lautan sehingga produksi sektor perikanan hanya mencakup perikanan darat saja. Perikanan darat sendiri dibedakan menjadi perairan umum dan budidaya (tambak, kolam, dan keramba). Pada tahun 2016, hasil produksi ikan darat dari perairan umum adalah sebanyak 171,78 ton. Sementara perikanan budidaya di kabupaten Malinau hanya dilakukan melalui budidaya kolam. Ikan patin merupakan produk budidaya kolam yang terbanyak pada tahun 2016, yaitu 95,56 ton, disusul oleh ikan nila dengan 13,36 ton. Tantangan yang harus diatasi adalah menyediakan lahan tempat budidaya Ikan Kolam serta meningkatkan kualitas sumberdaya petani perikanan.

Tabel. 2.72
Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan Tahun 2012-2016 Di Kabupaten Malinau

Perikanan Darat	2012	2013	2014	2015	2016
Perairan Umum	791	775	611	631	631
Tambak	0	0	0	0	0
Kolam	2.113	2.082	1.640	1.099	1.099
Keramba	0	0	0	0	0
Jumlah	2.904	2.857	2.251	1.730	1.730

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.73
Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau

Perikanan Darat	2012	2013	2014	2015	2016
Perairan Umum	317,92	330,00	319,61	291,70	171,78
Tambak	0	0	0	0	0



Kolam	439,69	445,88	452,32	373,60	136,89
Keramba	0	0	0	0	0
Jumlah	757,61	775,88	771,93	665,30	308,67

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

3) Perindustrian dan Perdagangan

a) Perindustrian

Pada tahun 2016, terdapat 754 perusahaan di Kabupaten Malinau. Perusahaan tersebut terdiri dari industri makanan dan minuman, logam, mesin, dan alat angkut, kimia dan bahan bangunan, kerajinan, dan konveksi. Industri logam, mesin, dan alat angkut merupakan industri terbanyak selama tahun 2016, yakni sejumlah 228 perusahaan.

Tabel. 2.74
Banyaknya Industri, Tenaga kerja, dan Nilai Investasi
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Badan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Unit Usaha	339	348	454	636	754
2.	Tenaga Kerja	722	818	842	0	1.464
3.	Investasi	18.425	19.040	21.471	0	21.686

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

Tabel. 2.75
Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Industri
Kabupaten Malinau Tahun 2013-2016

No	Kode Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pangan/Argo	225	321	4.982.550
2	Logam, Mesin dan Alat Angkut	228	410	8.713.550
3	Kimia dan Bahan Bangunan	94	310	5.066.630
4	Kerajinan	180	347	1.620.264
5	Konveksi	27	76	0



Jumlah Tahun 2016	754	1.464	21.686.494
Tahun 2015	636	0	0
Tahun 2014	454	842	21.471.000
Tahun 2013	348	818	19.040.000

Sumber: Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2017

b) Perdagangan

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Malinau, Pada tahun 2015 tercatat ada 16 pasar, 15 agen/distributor, 244 toko, 127 kios, 4 APMS, 123 pangkalan pegnecer BBM, 1 agen LPG, 45 pangkalan pengecer LPG, dan 65 warung.

Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh miliar rupiah), perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta sampai sepuluh miliar rupiah), perdagangan kecil (kekayaan bersih lima puluh juta sampai lima ratus juta rupiah), dan perdagangan mikro (kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah). Sampai dengan tahun 2016, di kabupaten malinau terdapat 13 pedagang menengah, 182 pedagang kecil, dan 1.1691 pedagang mikro.

Tabel. 2.76
Banyaknya perusahaan yang terdaftar
Menurut daftar hukum di Kabupaten Malinau
Tahun 2011-2015

No	Badan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perseroan Terbatas (PT)	8	26	27	4	11
2.	CV/Firma	73	0	26	117	99
3.	Koperasi	9	0	0	20	5
3.	Perorangan	81	36	24	33	95
4.	Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah		171	62	77	174	210

Sumber : Data pembangunan tahun 2017

Tabel. 2.77
Banyaknya perdagangan menurut jenisnya
di Kabupaten Malinau
Tahun 2012-2016

No	Badan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perdagangan Besar	0	0	0	0	0
2.	Perdagangan	12	13	0	13	13



	Menengah					
3.	Perdagangan Kecil	181	182	0	182	182
3.	Perdagangan Mikro	1,273	1.293	0	1.481	1.691

Sumber : Data pembangunan tahun 2017

Tabel. 2.78
Banyaknya sarana perdagangan menurut jenisnya
di Kabupaten Malinau
Tahun 2011-2015*

No	Jumlah Sarana Perdagangan	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pasar	7	8	11	12	16
2.	Agen	5	5	5	15	15
3.	Toko	18	244	244	244	244
4.	Kios	127	127	127	127	127
5.	APMS	3	3	3	4	4
6.	Pangkalan Pengecer BBM	123	123	123	123	123
7.	Agen LPG	1	1	1	1	1
8.	Pangkalan Pengecer LPG	45	45	45	45	45
9	Warung	65	65	65	65	65

Sumber : Data pembangunan tahun 2017

*Revisi tahun 2017

4) Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diyakini hingga saat ini memiliki peran strategis, baik di tingkat global, nasional atau regional. Pengembangan kepariwisataan akan mendorong peningkatan Pendapatan Negera, Daerah dan Masyarakat sekaligus dapat mempercepat pengembangan wilayah serta memicu perubahan sosial budaya dan lingkungan secara umum. Melihat perkembangan kepariwisataan di kabupaten Malinau ada peningkatan. Konsistensi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pengembangan pariwisata terlihat dari Program-Program aksi daerah yang mengarah pada pembangunan sarana dan perasaran pariwisata hingga menetapkan beberapa desa Menjadi Desa Wisata.

Selama tahun 2016, tercatat ada 20 hotel dan penginapan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau. Dua belas di antaranya merupakan hotel non bintang dan delapan sisanya adalah akomodasi lainnya. Sampai tahun 2016, belum ada hotel yang memiliki kategori bintang.



Tabel. 2.79
Banyaknya Hotel dan Akomodasi Lainnya
di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016

Tahun	Hotel		Akomodasi Lainnya
	Berbintang	Non-Bintang	
2011	0	8	8
2012	0	8	8
2013	0	9	8
2014	0	10	8
2015	0	11	8
2016	0	12	8

Sumber : Data pembangunan tahun 2017

Tabel. 2.80
Aset Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Jumlah Sarana Perdagangan	Banyaknya
1	Desa Wisata	5 Desa
2	Seni Tari	27
3	Seni Musik	26
4	Seni Ukir/tato/pahat	4
5	Cagar Budaya	15
6	Museum	1
7	Wisata Alam	66
8	Wisata Budaya	21
9	Rekreasi Hiburan Umum	2
10	Restoran	2
11	Toko Souvenir dan Oleh-Oleh	3
12	Pokdarwis	1
13	Wisata Khusus	17

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata, data diolah 2017

5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi Sektor Pertambangan masih mendominasi dalam peningkatan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Kabupaten Malinau. Dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah terutama sektor pertambangan. Produksi batu bara di Kabupaten Malinau pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2016, produksi batubara adalah sebanyak 5.261.601,00



metrik ton, menurun sebanyak 529.049,10 metrik ton atau 9,14 persen dari tahun 2015.

Tabel. 2.81
Banyaknya Produksi Batu Bara
Kabupaten Malinau Tahun 2010-2016

No	Uraian	Produksi
1	Tahun 2016	5.261.601,00
2	Tahun 2015	5.790.650,10
3	Tahun 2014	4.027.947,84
4	Tahun 2013	3.065.207,57
5	Tahun 2012	2.443.766,77
6	Tahun 2011	2.140.267,30
7	Tahun 2010	1.894.757,43

Sumber : Data Pembangunan 2017

Tabel. 2.82
Realisasi dan Nilai Ekspor Batubara
Kabupaten Malinau Tahun 2010-2016

No	Tahun	Banyaknya (Metrik Ton)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2010	1.894.757,43	133.929.665,770
2	2011	2.140.267,30	184.104.925,140
3	2012	2.443.766,77	146.028.505,225
4	2013	3.065.207,57	220.235.163,900
5	2014	4.027.947,84	241.676.870,400
6	2015	5.790.650,10	0
7	2016	5.261.601,00	0

Sumber : Data Pembangunan 2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

(1) Pengeluaran Konsumsi Penduduk Per Kapita

salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk adalah rata-rata pengeluaran perkapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat



kesejahteraan penduduk semakin baik. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebesar Rp. 1.259,047,- per bulan.

Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terdapat 45,53 persen penduduk Kabupaten Malinau yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan kurang dari RP. 1.000.000,00. Dengan demikian, penduduk dengan kelompok pengeluaran per kapita lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000,00 per bulan ada sebanyak 54,58 persen. Sementara itu, persentase penduduk tertinggi berada di kelompok pengeluaran antara 1.000.000-1.499.999, yaitu sebesar 29,38 persen dari total penduduk.

Sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2016 persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan lebih tinggi dibandingkan kelompok makanan, yaitu sebesar 54,73 persen. Dari keseluruhan pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan tersebut, 58,31 persennya digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Adapun pada kelompok makanan, persentase pengeluaran per kapita tertinggi terdapat di kelompok makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 20,34 persen. Padi-padian yang merupakan bahan makanan pokok menempati posisi kedua dengan persentase pengeluaran per kapita sebesar 15,60 persen dari keseluruhan pengeluaran makanan.

Tabel. 2.83
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita
Sebulan di Kabupaten Malinau 2012-2016

Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)	Persentase (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
< 500.000	39,30	24,24	13,59	5,00	3,92
500.000-999.999	34,83	60,86	47,90	52,66	41,61
≥ 1.000.000	25,87	14,90	38,51	42,34	54,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data Pembanguna Daerah Tahun 2017

Tabel. 2.84
Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Malinau tahun 2016-2021

Tahun	Makanan	Bukan Makan
2011	48,75	51,25



2012	45,71	54,29
2013	50,94	49,06
2014	51,04	48,96
2015	47,11	52,89
2016	45,27	54,73

Sumber : Data Pembangunan Daerah Tahun 2017

Tabel. 2.85
Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita sebulan
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Malinau tahun 2016-2021

Uraian	2014	2015	2016
Padi-padian	78.545	88.932	88.900
Umbi-umbian	4.350	4.425	4.927
Ikan/udang/cumi/kerang	61.520	71.996	62.693
Daging	49.353	39.522	46.335
Telur dan Susu	30.122	36.052	39.744
Sayur-sayuran	43.714	47.150	45.401
Kacang-kacangan	8.237	8.482	8.954
Buah-buahan	48.107	11.391	20.244
Minyak dan Lemak	14.352	16.486	12.452
Bahan minuman	25.271	22.412	22.600
Bumbu-bumbuan	10.199	12.870	12.349
Konsumsi lainnya	10.202	10.291	10.043
Makanan dan minuman jadi	70.348	93.319	115.957
Rokok	73.169	80.997	79.356
Jumlah	527.489	544.325	569.956

Sumber : Data Pembangunan Daerah Tahun 2017

(2) Pengeluaran Konsumsi Penduduk Non-Pangan

Tabel. 2.86
Pengeluaran Rata-rata per kapita sebulan
Kelompok Bukan Makanan Menurut Jenisnya 2014-2016
Kabupaten Malinau



Uraian	2014	2015	2016
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	265.179	384.195	401.811
Aneka barang dan jasa	158.978	131.225	164.164
Pakaian, alas kaki dan tutup Kepala	24.120	26.174	30.294
Barang tahan lama	15.853	38.868	47.112
Pajak, pungutan dan asuransi	5.911	14.272	24.049
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	36.051	16.434	21.661
Jumlah	506.092	611.169	689.091

Sumber : Data Pembangunan Daerah Tahun 2017

(3) Pertanian

Sektor pertanian khususnya pertanian dalam arti luas merupakan salah satu pilar pembangunan Kabupaten Malinau melalui sektor pertanian, perikanan dan perternakan diharapkan dapat mewujudkan Gerakan Desa Membangun di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Berikut Data beberapa potensi jenis tanaman padi dan palawija di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.87
Data Luas Potensi Lahan Pertanian Pangan (Padi)
Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017
Kabupaten Malinau

NO	DISTRTRIC/ KECAMATAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		LUAS PADI SAWAH	PADI LADANG								
		Ha									
1	Malinau Kota	423,00	295,00	449,00	104,00	463,00	69,00	201,50	96,00	201,50	96,00
2	Malinau Utara	439,00	506,00	739,00	453,00	794,00	413,00	297,10	109,00	297,10	109,00
3	Malinau Barat	283,00	737,00	496,00	600,00	576,00	647,00	813,60	357,00	813,60	357,00
4	Mentarang	1.051,00	760,00	960,00	593,00	903,00	350,00	794,60	269,00	794,60	269,00
5	Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-	10,00	215,00	9,00	400,00	9,00	400,00
6	Malinau Selatan	170,00	1.590,00	170,00	1.543,00	155,00	788,00	128,70	1.248,00	128,70	1.248,00
7	Mentarang Hulu	10,00	99,00	35,00	207,00	56,00	234,00	50,80	234,00	50,80	234,00
8	Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-	5,00	300,00	11,00	237,00	11,00	237,00
9	Bahau Hulu	63,00	245,00	48,00	207,00	51,00	320,00	-	320,00	-	320,00
10	Pujungan	2,00	405,00	-	434,00	-	335,00	2,00	335,00	2,00	335,00
11	Kayan Hilir	9,00	455,00	10,00	338,00	-	360,00	18,90	300,00	18,90	300,00
12	Kayan Hulu	-	390,00	20,00	405,00	20,00	360,00	15,00	417,00	15,00	417,00
13	Kayan Selatan	29,00	330,00	30,00	325,00	40,00	330,00	28,90	464,00	28,90	464,00
14	Sungai Boh	-	581,00	-	440,00	-	374,00	-	35,00	-	35,00
15	Sungai Tubu	-	-	-	-	5,00	180,00	-	-	-	-
TOTAL LUAS LAHAN		2.479,00	6.393,00	2.957,00	5.649,00	3.078,00	5.275,00	2.371,10	4.821,00	2.371,10	4.821,00
JUMLAH		8.872,00	8.872,00	8.606,00	8.606,00	8.353,00	8.353,00	7.192,10	7.192,10	7.192,10	7.192,10

Sumber : Data Pembangunan Daerah tahun 2017



(4) Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar pembangunan di Kabupaten Malinau. Sektor Perkebunan juga pendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Melihat data yang ada produksi perkebunan yang terbesar di Kabupaten Malinau pada tahun 2016 adalah kelapa sawit, yaitu sebesar 9.372 ton, diikuti oleh produksi kakao sebesar 290 ton. Namun, untuk luas tanamannya, karet merupakan komoditas dengan luas tanaman terbesar diikuti oleh kakao. Khusus untuk komoditas karet, jumlah produksinya hanya mencapai 25 ton.

Tabel. 2.88
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Kabupaten Malinau (Ha) tahun 2012-2016

Uraian	Jenis Tanaman Perkebunan						
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Teh
Tahun 2016	2.493,00	0	1.188,00	1.506,00	3,00	1.621,00	0
Tahun 2015	2.493,00	0	1.188,00	1.599,00	3,00	1.879,00	33,00
Tahun 2014	1.626,00	6,00	1.050,00	1.772,00	3,00	3.855,00	33,00
Tahun 2013	1.626,00	6,00	1.050,00	2.038,00	3,00	4.116,00	33,00
Tahun 2012	1.466,00	6,50	1.050,00	2.058,00	3,00	4.199,50	33,00

Sumber : Data Pembangunan Daerah tahun 2017

Tabel. 2.89
Produksi Tanaman Perkebunan
Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malinau (Ton) 2012-2016

Uraian	Jenis Tanaman Perkebunan						
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Teh
Tahun 2016	25,00	0,00	9.372,00	168,00	1,20	290,00	0,00
Tahun 2015	30,00	0,00	9.312,00	171,00	1,20	365,00	0,00
Tahun 2014	26,00	2,00	9.108,00	171,00	1,20	385,00	0,00
Tahun 2013	0,00	2,00	0,00	518,00	1,20	822,00	0,00
Tahun 2012	0,00	1,50	0,00	670,00	3,00	802,00	0,00

Sumber : Data Pembangunan Daerah tahun 2017



2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Prasarana dan Sarana Daerah

a) Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara. Transportasi yang baik, lancar, mudah dan murah akan mendukung penghematan pengeluaran rumahtangga, pemanfaatan keunggulan komparatif desa dan daerah, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Transportasi yang baik juga akan mendukung berkembangnya kegiatan sosial budaya masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara lebih cepat.

Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, laut dan udara. Sampai dengan tahun 2016, panjang jalan di Kabupaten Malinau pada tahun 2016 mencapai 1.421,33 km, terdiri dari 255 km jalan negara, 247,10 km jalan provinsi, dan 919,23 km jalan kabupaten. Dari panjang jalan kabupaten tersebut 399,34 km kondisinya telah diaspal, 181,76 km kerikil, dan 338,13 km masih tanah. Jalan beraspal masih relatif sedikit dibanding keseluruhan panjang jalan. Sebagian besar jenis jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan khususnya yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Pada tahun 2016 hampir sebagian besar jalan negara terdiri dari jalan tanah. Jalan provinsi yang diaspal kurang lebih hanya 25 persen. Sedangkan jalan kabupaten yang sudah diaspal mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses transportasi darat di Kabupaten Malinau masih sangat kurang sehingga menyebabkan desa di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi terisolasi. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah memperluas akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kemajuan desa.

Dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan barang, meningkatkan biaya tinggi, menambah beban pengeluaran masyarakat dan



mengurangi potensi pengembangan daerah. Tantangan yang harus diatasi dalam beberapa tahun mendatang adalah memelihara dan meningkatkan kondisi jalan menjadi baik untuk mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Sementara, jumlah kendaraan di Kabupaten Malinau terus meningkat setiap tahun dan jenisnya didominasi oleh sepeda motor. Pada tahun 2016 terdapat 20.632 unit sepeda motor. Mobil barang merupakan jenis kendaraan terbanyak kedua dengan jumlah 1.687 unit lalu kemudian disusul oleh mobil penumpang sebanyak 1.479 unit. Tantangan yang harus diatasi dalam beberapa tahun mendatang adalah pembangunan jalan, penataan lalu lintas dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel. 2.90
Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kabupaten Malinau
2012-2016 (km)

Jenis Jalan	2012	2013	2014	2015	2016*
1. Jalan Negara	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
2. Jalan Provinsi	247,10	247,10	247,10	247,10	247,10
3. Jalan Kabupaten	603,88	965,89	1.138,39	1.339,39	919,23
Jumlah	1.105,98	1.467,99	1.640,49	1.640,49	1.421,33

*belum termasuk jalan desa

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2017

Tabel. 2.91
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Malinau 2016* (km)

Jenis Permukaan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Diaspal	15,00	50,00	399,34	464,34
Kerikil	0,00	45,00	181,76	226,76
Tanah	240,00	84,10	338,13	662,23
Lainnya	0,00	68,00	0,00	68,00
Jumlah	255,00	247,10	919,23	1.421,33

*belum termasuk jalan desa

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2017

Tabel. 2.92
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Malinau 2016* (km)

Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Baik	15,00	50,00	269,79	334,79
Sedang	0,00	45,00	114,30	159,30
Rusak	240,00	84,10	187,63	511,73
Rusak Berat	0,00	68,00	347,51	415,51
Jumlah	255,00	247,10	919,23	1.421,33



*belum termasuk jalan desa
Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2017

Tabel. 2.93
Jumlah Kendaraan Bermotor yang teregistrasi dan teridentifikasi
Menurut jenis kendaraan tahun 2011-2016
di Kabupaten Malinau

Jenis Kendaraan	2012	2013	2014	2015	2016
Mobil Penumpang	1.005	1.192	1.336	1.474	1.542
Bus	32	33	35	35	35
Mobil Beban	978	1.194	1.611	1.781	1.851
Sepeda Motor	13.437	15.458	17.003	18.441	19.342

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2017

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang meningkat secara nyata. Pada tahun 2016 jumlah penerbangan tercatat 2.767 penerbangan kedatangan dan 2.537 penerbangan keberangkatan dengan jumlah penumpang yang datang sebanyak 27.679 orang dan yang berangkat 30.321 orang. Data tersebut menunjukkan semakin tingginya mobilitas penduduk dan angkutan barang antardaerah di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan dan perluasan lapangan terbang perintis; serta peningkatan jangkauan dan perluasan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Sementara itu penduduk yang memanfaatkan transportasi air terus meningkat. Pada tahun 2016 tercatat kapal tambat di dermaga Malinau sebanyak 1.318 kali dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 80.109 orang dan yang turun sebanyak 74.452 orang. Pemanfaatan transportasi barang juga meningkat. Jumlah barang yang dimuat tercatat 10.695 ton dan barang yang dibongkar tercatat 51.202 ton. Dengan kata lain, impor barang dari daerah lain masuk ke Kabupaten Malinau relatif sangat besar. Tantangan yang harus diatasi adalah pengembangan produksi dan produktivitas barang yang dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

b) Telekomunikasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Pengembangan telekomunikasi dan informasi ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi; keterpaduan sistem



telekomunikasi dan informasi; serta keterjangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi secara merata, murah, mudah dan cepat.

Kemajuan pengembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau berdiri 3 operator handphone dan melayani wilayah kota dan kecamatan dan desa. Persentase rumah tangga menurut kepemilikan telepon relatif sedikit atau kurang dari 6 persen, sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki telpon seluler lebih dari 70 persen. Rumah tangga yang memiliki PC komputer dan lap top masih terbatas. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Tabel. 2.94
Persentase Rumah tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler, PC Komputer Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Telepon	1,85	5,33	6,94	3,55	1,88
Telepon Seluler	70,45	83,02	94,29	67,33	69,62
PC Komputer	4,71	3,78	5,50	28,59	27,31

Sumber: Badan Pusat Statistik

c) Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan.

Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air ledeng dalam periode 2012-2016 cenderung meningkat. sementara Menurut Jumlah pelanggan air PDAM sesuai kategori Rumah tangga pada tahun 2012 sebanyak 4.345 meningkat di tahun 2016 sebanyak 6.354 Pelanggan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih dan Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, menjaga daya dukung lingkungan sebagai sumber air baku, serta membangun dan memperluas jaringan penyediaan air bersih yang murah dan



terjangkau seluruh desa terutama didaerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Tabel. 2.95
Jumlah Pelanggan dan sumber Air Minum Menurut Kategori
di Kabupaten Malinau 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rumah Tangga dan Instansi/Kantor Pemerintah	4.345	4.810	5.407	5.803	6.354
2. Hotel, Toko dan Industri, Perusahaan	439	501	733	1.045	1.148
3. Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan lainnya	51	51	53	55	56

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum

Tabel. 2.96
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Malinau 2012-2016 (%)

Sumber Air Minum	2012	2013	2014	2015	2016
1. Air Ledeng	19,69	24,41	26,64	24,89	25,07
2. Air Kemasan/Isi Ulang	21,09	12,19	29,36	33,71	44,51
3. Sumur/ Mata Air Terlindung	27,27	30,61	22,46	5,65	1,37
4. Sumur/Mata Air Tak Terlindung, Sungai, Air Hujan dan Lainnya	19,22	23,6	16,41	24,73	25,19

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional

d) Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Produksi listrik di Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2016 terus meningkat hingga mencapai 53.221 MWh atau meningkat hampir 75 persen dibanding tahun 2010. Pengguna utama listrik adalah rumah tangga yang mencapai lebih dari 60 persen. Jumlah pelanggan dari kalangan rumah tangga juga terus meningkat.



Tabel. 2.97
Banyaknya Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik
Di Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016
2012-2016 (dalam Mwh)

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (MWh)	Listrik Terjual (MWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (MWh)
2012	9.250	29.680	27.669	0.00	1.226
2013	13.862	40.744	27.931	0.00	3.876
2014	12.682	46.976	43.985	0.00	2.990
2015	12.682	49.654	47.210	0.00	2.444
2016	14.702	53.221	51.179	0.00	22.042

Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Malinau

Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

2) Wilayah Konservasi dan Wilayah Produktif

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang memiliki areal hutan yang luas. Oleh karena itu daerah ini memiliki karakter tersendiri, sehingga sering dijuluki sebagai "The Heart of Borneo". Dengan areal hutan yang dimiliki sekarang ini, cukup menjanjikan untuk kemajuan Kabupaten Malinau di masa yang akan datang, dan hal ini disebabkan karena hutan yang ada di Kabupaten Malinau memiliki kekayaan yang tinggi dan beraneka ragam, baik flora maupun faunanya.

Namunpun demikian, mengingat fungsi hutan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomis saja, dan pemanfaatannya dapat berdampak secara global, maka Pemerintah Kabupaten Malinau melalui sejumlah pertimbangan, mengusulkan suatu program konservasi alam yang wilayah cakupannya adalah seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

Pengertian Kabupaten Konservasi adalah wilayah administrasi yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan system penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu antara lain : a). Memiliki kawasan konservasi dan kawasan lain yang mempunyai ekosistem dengan nilai



konservasi tinggi, b). Memiliki keterbatasan pengembangan wilayah akibat keterbatasan kondisi biophysik, c). Mempunyai visi dan Misi berazaskan konservasi, d). Mempunyai komitmen politik untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, e). Mempunyai system kelembagaan pengelolaan lingkungan yang memadai.

Pengelolaan Kawasan Konservasi saat ini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Balai TNKM, WWF Indonesia dan FoMMA yang tergabung dalam satu lembaga kolaborasi yaitu DP3K-TNKM.

a) Luas Wilayah Zona Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)

Tabel. 2.98
Luas Hutan Zonasi TNKM (Ha)
Di Kabupaten Malinau Tahun 2017

Uraian	Luas (Km ²)	%	Zona TNKM	Luas Perzona	Luas Perkecamatan	%
				(Ha)	(Ha)	
Total Luas TNKM di Wilayah Kabupaten Malinau	40.088,41	24,84	Zona Inti	94.962,64	995.984,85	78,32
			Zona Pemanfaatan	358.113,33		
			Zona Tradisional	257.192,75		
			Zona Rimba	149.130,89		
			Zona Khusus	136.585,24		

Sumber : Balai TNKM



Tabel. 2.99
Luas Hutan Zonasi (Ha) Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Zona TNKM	Luas Perzona	Luas Perkecamatan	%
					(Ha)	(Ha)	
1	Bahau Hulu	3.098,98	80,08	Zona Inti	919,25	248.154,62	19,51
				Zona Pemanfaatan	94.759,84		
				Zona Tradisional	36.688,17		
				Zona Rimba	65.687,46		
				Zona Khusus	50.099,90		
2	Mentarang Hulu	2.924,65	13,94	Zona Inti	4.754,82	40.779,90	3,21
				Zona Pemanfaatan	4.691,16		
				Zona Tradisional	17.915,26		
				Zona Rimba	8.860,34		
				Zona Khusus	4.558,32		
3	Sungai Tubu	2.243,78	33,38	Zona Inti	-	74.898,99	5,89
				Zona Pemanfaatan	13.267,83		
				Zona Tradisional	49.522,12		
				Zona Rimba	-		
				Zona Khusus	12.109,04		
4	Pujungan	6.539,39	64,12	Zona Inti	89.288,57	419.300,97	32,97
				Zona Pemanfaatan	128.900,97		
				Zona Tradisional	86.418,86		
				Zona Rimba	61.813,32		
				Zona Khusus	52.879,25		
5	Kayan Hilir	11.863,19	17,94	Zona Pemanfaatan	116.493,53	212.850,37	16,74
				Zona Tradisional	66.648,34		
				Zona Rimba	12.769,77		
				Zona Khusus	16.938,73		

b) Luas Wilayah Produktif

Sebagaimana diketahui bahwa dari luas + 40.088,38 km² yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau, sebesar 90% dari wilayah tersebut merupakan kawasan hutan. Kawasan lindung/kawasan konservasi yang ada terdiri atas : 1 Unit Taman Nasional, 8 unit hutan lindung. Taman Nasional yang ada di Kabupaten Malinau mempunyai luas total + 1.030.170 ha dan luas hutan lindung yang dimiliki adalah seluas + 685.856.

Tabel. 2.100
Luas Hutan Menurut Taat Guna Hutan Kesepakatan (Ha)
Di Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016

Tata Guna Hutan	2013	2014	2015
Hutan Lindung	671.899,37	682.635,92	685.856,00
Hutan Suaka Alam & Wisata	987.533,14	992.785,48	998.862,00



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

Hutan Produksi Terbatas	1.588.329,15	1.571.189,26	1.570.815,00
Hutan Produksi Tetap	364.819,92	364.838,72	364.811,00
Hutan Konversi	30.472,60	30.473,66	30.474,00

Sumber : BPS Kab. Malinau

Tabel. 2.101
Luas Wilayah Produktif Tahun 2013-2017
Di Kabupaten Malinau

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	LUAS WILAYAH PRODUKTIF	3,647,797.52	3,647,797.52	3,647,797.52	3,647,797.52	3,647,797.52
2	LUAS SELURUH WILAYAH BUDIDAYA	3,341,618.90	3,341,618.90	3,341,618.90	3,342,778.75	3,342,778.75
	Kawasan peruntukan hutan produksi;	1,967,090.80	1,967,090.80	1,967,090.80	1,967,090.80	1,967,090.80
	Kawasan peruntukan hutan rakyat;	995,984.95	995,984.95	995,984.95	995,984.95	995,984.95
	Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;	326,481.00	326,481.00	326,481.00	326,481.00	326,481.00
	Kawasan peruntukan perikanan;	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
	Kawasan peruntukan sumberdaya air	12,595.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00
	Kawasan peruntukan pertambangan;	29,143.00	29,143.00	29,143.00	29,143.00	29,143.00
	Kawasan peruntukan permukiman;	8,265.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
	Kawasan peruntukan industri	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00
	Kawasan peruntukan lain	900.15	900.15	900.15	2,060.00	2,060.00
3	RASIO (1/2)	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09

Sumber : BPS Kab. Malinau

Tabel. 2.102
Luas Wilayah Produktif
Menurut Kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2017

NO	DISTRTRIC/ KECAMATAN	LUAS WILAYAH KECAMATAN (KM ²)	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (HA)	LUAS WILAYAH BUDIDAYA (HA)	RASIO
1	2	3	4	5	6 = (4/5)
1	Malinau Kota	142.07	13,873.35	10,240.50	1.35



2	Malinau Utara	1,091.19	449,919.60	2,425.30	185.51
3	Malinau Barat	767.12	162,017.40	4,734.80	34.22
4	Mentarang	535.15	12,042.62	4,443.80	2.71
5	Malinau Selatan Hilir	572.20	39,407.71	1,452.00	27.14
6	Malinau Selatan	1,153.35	22,734.62	5,073.10	4.48
7	Mentarang Hulu	2,924.65	255,561.87	1,144.40	223.32
8	Malinau Selatan Hulu	2,171.14	206,972.35	1,049.00	197.30
9	Bahau Hulu	3,098.98	232,830.95	1,331.00	174.93
10	Pujungan	6,539.39	485,838.78	1,346.00	360.95
11	Kayan Hilir	11,863.19	900,978.96	1,316.70	684.27
12	Kayan Hulu	735.40	43,878.28	1,676.00	26.18
13	Kayan Selatan	3,138.59	169,772.81	1,848.70	91.83
14	Sungai Boh	3,112.18	649,724.43	479.00	1,356.42
15	Sungai Tubu	2,243.78	2,243.78	-	-
TOTAL LUAS LAHAN		40,088.38	3,647,797.52	38,560.30	3,370.62

Sumber : Data Pembangunan Kab. Malinau

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka kriminalitas

Aspek sosial yang tidak kalah penting untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik yaitu aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut di antaranya mencakup jumlah kasus atau perkara dan tahanan di polres, kejaksaan negeri, dan pengadilan negeri Malinau. Penurunan angka kriminalitas merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan iklim berinvestasi. Strategi lima tahun mendatang kabupaten malinau adalah memberikan keamanan dan kenyamanan lingkungan Mulai dari tingkat Rukun Tetanga, Desa, Kecamatan dan Daerah yakni Terkait dengan Salah satu Program Unggulan Daerah yakni Program RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis).

Tabel. 2.103
Angka Kriminalitas
Kabupaten Malinau Tahun 2013 – 2017

No	Jenis Kriminalitas	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus narkoba	11	15	28	180	211
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	1	2	0	0



3.	Jumlah Kejahatan seksual	14	13	12	13	9
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	18	23	21	27	13
5	Jumlah Kasus Pencurian	47	50	56	49	34
6	Jumlah kasus penipuan	10	14	7	8	8
7	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun (sat Reskrim)	131	147	171	310	301
9	Jumlah Penduduk	71.501	74.469	77.492	80.619	83.788
10	Angka Kriminalitas (8) / (9)	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003

Sumber : Satreskrim Polres Malinau

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi suatu Negara. Intensitas Jumlah Demontran berkiatan erat dengan dampak Sosial ekonomi dan politik yakni bila Jumlah Demontran meningkat tidak stabil maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat masih berdampak negatif. Jika dikaitkan dengan peningkatan pembangunan Daerah Aksi Demonstrasi juga sangat berkontribusi bagi perkembangan dan perbaikan pembangunan di daerah. Bila melihat data yang ada Jumlah demonstrasi di Kabupaten Malinau cukup stabil hal ini dapat dilihat dari Jumlah Kasus yang ada, Banyaknya aksi demonstrasi di Kabupaten Malinau hanya Terkait dengan Ketidak Puasan terhadap kinerja Perusahaan dan terkait dengan Pemilihan Umum Kepala/wakil Kepala Daerah yang secara Signifikan Menurun, Hal ini menunjukkan Bahwa Pembangunan Dikabupaten malinau cukup kondusif khusus terkait dengan Jaminan Keamanan bagi Insvestor dalam rangka investasi di Kabupaten Malinau.

Selain itu, bila melihat Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang dicanangkan Kepala Daerah yakni salah satu Program Unggulan Daeah yaitu RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat Indah dan Harmonis) menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kemanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat secara luas.



Tabel. 2.104
Jumlah Demontran
Kabupaten Malinau Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bidang Politik	-	-	3	-	-
2.	Ekonomi	1	2	1	3	-
3.	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah unjuk rasa	1	2	4	3	-

Sumber : Satreskrim Polres Malinau

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tabel. 2.105
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Malinau Tahun 2013 – 2017

No	Jenis Kriminalitas	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1	2.842	2.930	2.974	3.500	4.002
2.	Jumlah lulusan S2	201	213	198	235	263
3.	Jumlah lulusan S3	8	8	6	6	7
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3.051	3.151	3.178	3.741	4.272
5	Jumlah Penduduk	77.221	71.219	71.912	75.889	76.606
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3 ((4/5)	25.31	22.60	22.62	20.28	17.93

Sumber : Badan Pusat Statistik

2) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel. 2.106
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Malinau Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	22.579	23.526	24.497	25.489	26.514



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	1.985	2.054	2.161	2.248	2.344
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	24.564	25.580	26.658	27.737	28.858
4	Jumlah pendudukan usia 15-64 tahun	44.005	45.903	47.881	49.755	51.761
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70

Sumber : Badan Pusat Statistik



BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malinau tahun 2011-2016 diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

(1) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2011 hingga tahun 2014 menunjukkan hal positif, terbukti dengan terjadinya pelampauan realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Pendapatan daerah terus meningkat sebesar 6,66 persen pada tahun 2012; 2,06 persen pada tahun 2013 dan 2,81 persen pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 pendapatan daerah menurun disebabkan oleh adanya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur; dan menurunnya penerimaan dana bagi hasil sebagai akibat penurunan harga komoditas pertambangan dan perkebunan di pasar nasional dan internasional. Pada tahun 2012 pendapatan daerah sebesar Rp. 1.755.150,06 Triliun sedangkan tahun 2016 Rp. 1.487.638,36 Triliun sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah minus 3,25 %.

Dalam periode 2011-2015 Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dan menurun pada tahun 2015 dan 2016.



Sama halnya dengan pendapatan dari dana perimbangan yang menurun drastis pada tahun 2015, rata-rata pertumbuhan PAD minus 8,65 % sementara pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah meningkat pertahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,61 persen.

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 4,96 persen selama tahun 2012-2016. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 82,01 persen dan sumbangan lain-lain pendapatan rata-rata sebesar 13,04 persen. Struktur pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016 menegaskan bahwa sumber utama PAD berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dengan rata-rata pertahun sekitar 79,16 persen. Sementara, sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD masih sangat terbatas. Struktur PAD tersebut menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah bukan menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan ekonomi untuk menumbuhkan potensi pajak, intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi dalam pemungutan retribusi daerah. Berbagai langkah tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Malinau.



Tabel 3.1
Rata – Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2012-2016 Kabupaten Malinau

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.755.150.062.497	1.791.311.584.468	1.841.569.105.991	1.287.040.092.114	1.487.638.369.990	-3,25
1.1	Pendapatan Asli Daerah	83.217.202.105	95.230.925.950	103.370.977.369	71.625.371.866	52.950.090.446	-8,65
1.1.1	Pajak Daerah	3.362.438.034	5.017.864.019	7.440.658.373	7.632.010.912	8.821.125.164	21,28
1.1.2	Retribusi Daerah	1.903.589.000	1.664.053.163	2.082.584.165	1.378.325.595	1.751.870.417	-1,65
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.825.359.863	9.347.804.868	10.158.332.390	7.473.558.759	5.089.642.445	-8,24
1.14	Lain-lain PAD yang sah	70.125.815.208	79.201.203.900	83.689.402.440	55.141.476.601	37.287.452.420	-11,87
1.2	Dana Perimbangan	1.517.631.275.634	1.490.177.924.092	1.562.020.716.312	991.987.041.175	1.167.451.518.737	-5,11
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	910.465.322.634	785.978.517.092	840.066.357.312	306.312.568.175	285.886.186.772	-20,68
1.2.3	Dana Alokasi Umum	557.697.933.000	620.970.044.000	653.156.829.000	643.965.213.000	772.980.483.000	6,75
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	49.468.020.000	83.229.363.000	68.797.530.000	41.709.260.000	108.584.848.965	17,03
1.2.5	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Bagi Hasil Pajak (Provinsi)	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	154.301.584.758	205.902.734.426	176.177.412.310	223.427.679.072	267.236.760.807	11,61
1.3.1	Hibah	-	750.000.000	3.744.034.035	30.616.471.798	-	-100,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	66.765.061.000	77.768.792.850	74.361.981.975	33.486.153.274	39.230.939.807	-10,09
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	-	-	50.705.054.000	94.170.721.000	15,7
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	77.274.108.758	114.989.657.576	73.236.400.000	108.620.000.000	117.490.000.000	8,74
1.3.6	Pendapatan Lainnya	10.262.415.000	12.394.284.000	24.834.996.300	-	16.345.100.000	9,76

Sumber : BPKD Kab. Malinau



(2) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Struktur belanja Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2012-2016 menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja langsung dengan persentase rata-rata sebesar 62,36 % pertahun dari total belanja. Rata-Rata Pertumbuhan belanja langsung daerah selama periode 2012-2016 tercatat turun sebesar 5,92 persen dan belanja tidak langsung naik sebesar 4,10 persen Alokasi belanja langsung menurun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 seiring dengan menurunnya pendapatan daerah kabupaten malinau.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain adalah:

- (1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan, serta pengawasan dan evaluasi telah menambah beban aparat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
- (2) Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- (3) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
- (4) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
- (5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
- (6) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tantangan yang harus diatasi selama tahun 2018-2021 adalah melakukan harmonisasi peraturan perundangan yang mengatur perencanaan,



penganggaran, pengadaan, pengendalian dan pengawasan; serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.



Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Menurut Jenis Belanja Tahun 2012-2016 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	1.567.142.868.187	2.139.187.150.603	2.085.507.602.923	1.640.437.062.574	1.412.958.527.889	-2,05
2.1	Belanja Tidak Langsung	531.436.001.983	602.289.825.699	690.543.508.416	771.417.002.780	649.736.048.852	4,10
2.1.1	Belanja Pegawai	319.981.741.456	339.475.813.418	362.616.345.403	431.619.046.929	445.997.043.196	6,87
2.1.2	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	22.001.196.786	21.944.312.579	21.103.098.843	17.832.584.777	10.276.371.514	-14,12
2.1.5	Belanja Hibah	55.116.802.345	101.812.662.123	160.135.826.757	78.161.680.640	36.394.400.692	-7,97
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.260.971.396	7.523.647.505	4.935.686.850	4.988.607.588	2.716.013.156	-28,23
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120.075.290.000	131.175.826.074	141.752.550.563	238.715.446.846	154.352.220.294	5,15
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	357.564.000	-	99.636.000	-	-34,68
2.2	Belanja Langsung	1.035.706.866.204	1.536.897.324.904	1.394.964.094.507	869.020.059.794	763.222.479.037	-5,92
2.2.1	Belanja Pegawai	90.742.135.077	100.021.607.622	102.957.410.711	109.885.140.050	108.976.993.489	3,73
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	423.414.276.269	450.783.159.325	429.466.272.454	275.824.337.620	326.844.350.864	-5,05
2.2.3	Belanja Modal	521.550.454.858	986.092.557.957	862.540.411.342	483.310.582.124	327.401.134.684	-8,89

Sumber : BPKD Kab. Malinau



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Malinau dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016

NO	URAIAN	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	6.572.994.356.648	5.396.636.079.123	5.359.454.379.542	-9,70
1.1	ASET LANCAR	586.496.563.635	187.405.246.924	149.542.274.522,56	-49,50
1.1.1	Kas di Kas Daerah	365.250.228.165	4.194.950.284	76.778.382.819	-54,15
1.1.2	Kas Dibendahara Penerimaan	201.720.903	74.128.110	560.665.780	66,72
1.1.3	Kas Dibendahara Pengeluaran	783.320.959	2.418.936.760	200.000.000	-49,47
1.1.4	Kas Di BLUD	9.767.300.271	8.617.512.319	12.813.908.980	14,54
1.1.5	Kas Lainnya	2.117.954.939	5.404.966.966	7.384.026.026	86,72
1.1.6	Setara Kas	-	-	-	
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
1.1.8	Piutang Pajak	1.886.812.623	3.516.214.656	3.288.101.732	32,01
1.1.9	Penyisihan Piutang Pajak	-	(1.273.999.985)	(718.182.720)	
1.1.10	Piutang Pajak Netto	-	2.242.214.671	2.569.919.012	14,62
1.1.11	Piutang Retribusi	196.005.705	135.330.505	155.791.005	-10,85
1.1.12	Penyisihan Piutang Retribusi	-	(135.207.042)	(125.990.844)	
1.1.13	Piutang Retribusi Netto	-	123.464	29.800.162	24036,82
1.1.14	Piutang Transfer	182.666.021.872	136.322.921.932	26.804.097.587	-61,69
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	372.678.829	2.041.379.829,51	590.112.013	25,83
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	12.000.000	12.000.000	14.000.000	8,01
1.1.17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	58.466.400	37.937.312	37.937.312	-19,45
1.1.18	Piutang Lainnya	3.518.803.564	9.254.707.092	9.834.812.678	67,18
1.1.19	Penyisihan Piutang Lainnya	-	(478.674.196)	(441.529.629)	
1.1.20	Piutang Piutang Lainnya Netto	-	8.776.032.896	9.393.283.049	7,03
1.1.21	Persediaan	19.665.249.406	17.262.142.382	12.366.141.783	-20,70



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

NO	URAIAN	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	106.514.359.100	107.756.098.425	110.602.191.858	
1.2,1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-			
1.2,2	Dana Bergulir	-	1.150.840.869	3.068.524.469	166,63
1.2,3	Danan Bergulir Diragukan Tertagih	-	(1.150.840.869)	(1.195.512.295)	
1.2,4	Investasi Jangka Panjang Permanen	-			
1.2,5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	106.514.359.100	107.756.098.425	108.729.179.684	1,03
1.3	ASET TETAP	5.611.399.734.444	5.065.989.988.256	4.929.212.003.043	-6,28
1.3.1	Tanah	240.970.348.761	222.537.057.392	232.781.375.655	-1,71
1.3.2	Peralatan dan mesin	363.529.242.992	400.919.445.880	423.116.294.019	7,88
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.560.053.626.955	1.600.149.394.947	1.689.117.576.725	4,05
1.3.4	Jalan, irigasi, dan Jaringan	2.326.943.452.623	3.211.958.430.528	3.831.108.234.522	28,31
1.3.5	Aset tetap lainnya	24.609.454.606	22.100.142.738	22.490.208.738	-4,40
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	1.095.293.608.507	953.326.507.700	401.944.073.863	-39,42
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	(1.345.000.990.928)	(1.671.345.760.480)	
1.4	ASET LAINNYA	268.583.699.469	35.484.745.517	170.097.910.119	-20,42
1.4.1	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	241.700.000	110.850.000	86.850.000	-40,06
1.4.2	Aset Tidak Terwujud	11.134.754.136	11.614.969.136	11.850.145.136	3,16
1.4.3	Amortisasi Aset Tak Terwujud	-	(3.664.316.040)	(4.573.894.487)	
1.4.4	Aset Tak Berwujud Netto	-	7.950.653.095	7.276.250.649	-8,48
1.4.5	Aset lain-Lain	256.295.228.733	64.997.946.701	406.111.707.587	25,88
1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	(38.096.261.329)	(243.779.799.856)	
1.4.7	Aset Lain-Lain Netto	-	26.901.685.372	162.331.907.730	503,43
1.4.8	Ternak Bergulir	912.016.600	521.557.050	402.901.740	-33,53
2.	KEWAJIBAN	7.327.355.206	245.338.354.524	266.312.370.845	502,87
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.327.355.206	245.338.354.524	266.312.370.845	502,87
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	4.676.695.367	242.470.900	1.241.466.594	-48,48
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	-	345.959.279	308.032.954	-10,96
2.1.3	Utang Beban	2.613.646.239	5.186.863.355	19.842.929.805	175,54
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.013.600	239.563.060.990	244.919.941.492	8034,51
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	
2.2.1	Utang dalam Negeri	-	-	-	
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
3.	EKUITAS DANA	6.565.667.001.442	5.151.297.724.599	5.093.142.008.698	-11,92
3.1	EKUITAS	6.565.667.001.442	5.151.297.724.599	5.093.142.008.698	-11,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.572.994.356.648	5.396.636.079.123	5.359.454.379.542	-9,70

Sumber : BPKD Kab. Malinau

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Current Ratio, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai Current Ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional



berada pada batas 200%. Sedangkan Quick Ratio, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar tergolong tinggi pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 dan 2016 menjadi sangat rendah seiring dengan menurunnya pendapatan daerah pada tahun tersebut. selanjutnya secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Analisis Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	80,04	0,76	0,56
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	77,36	0,69	0,52
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,0011	0,0455	0,0497
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,0011	0,0476	0,0523
5	Rata-rata Umur Piutang	20,12	47,77	23,32

Selanjutnya dijelaskan bahwa Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva yang didanai dengan utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya jika terjadi likuidasi, jenis rasio solvabilitas yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau antara lain rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Suatu organisasi dikatakan solvable bila rasionya kurang dari 200 %, semakin besar rasio solvabilitas semakin kecil kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio total utang terhadap total aset Kabupaten Malinau tahun 2014 sebesar 0,0011 persen, tahun 2015 sebesar 0,045 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,049 persen, sedangkan rasio hutang terhadap modal tahun 2014 sebesar 0,0011 persen, tahun 2015 sebesar 0,047 persen dan tahun 2016 sebesar 0,052 persen, artinya Pemerintah daerah sangat mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Selain itu, Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan semua sumber daya atau asset (aktiva) yang dimilikinya, salah satu jenis rasio aktivitas yang



digunakan pemerintah daerah kabupaten malinau adalah rata-rata umur piutang.

Sedangkan Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau berapa hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang pemerintah daerah. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat. Rata-rata umur piutang kabupaten malinau selama 20,12 hari pada tahun 2014, 47,77 hari tahun 2015 dan selama 23,32 hari pada tahun 2016. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2011-2016 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, perkiraan kebutuhan anggaran selama lima (5) tahun disusun dengan mengacu pada pendekatan penganggaran jangka menengah. Pendekatan penganggaran jangka menengah ini diharapkan mendorong perencanaan berbasis kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah dan swasta, serta memberikan kepastian dan kejelasan pola belanja dan investasi Pemerintah Kabupaten Malinau selama lima tahun ke depan. Dengan pendekatan penganggaran jangka menengah tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis PD secara lebih cermat, akurat dan berbasis kinerja.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisi terakhirnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015.

1) Kebijakan belanja tidak langsung diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit.

2) Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

- a. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2011-2015 terutama peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Mendorong pengembangan ekonomi local melalui Gerakan Desa Membangun untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi desa, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2011-2015 Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi



dan efektivitas. Berikut disajikan Proporsi Realisasi belanja Terhadap anggaran belanja Kabupaten Malinau 3 (Tiga) Tahun terakhir.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

(1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menginformasikan tingkat efisiensi atau rasio efisiensi belanja daerah. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Berdasarkan Tabel 3.5 realisasi Tahun 2014 belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 %.

Tabel 3.5
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	85,86	97,70	96,41
1	Belanja Pegawai	85,14	98,47	96,46
2	Belanja Subsidi	95,92	85,93	72,53
3	Belanja Hibah	87,59	91,71	91,01
4	Belanja Bantuan Sosial	30,33	94,14	90,08
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemda lainnya	91,28	99,94	99,97
6	Belanja Tidak Terduga	0,00	9,06	
B.	Belanja Langsung	87,36	83,20	82,60
1	Belanja Pegawai	92,41	112,84	99,24
2	Belanja Barang dan Jasa	90,99	88,96	85,07
3	Belanja Modal	85,11	75,86	76,13



(2) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	319.981.741.456,00	339.475.813.400,00	362.616.345.403,00	431.619.046.928,80	445.997.043.196,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	137.295.409.002,00	148.894.184.379,00	159.992.592.575,00	1.886.800.000,00	192.069.744.264,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.774.332.454,00	187.292.658.595,00	200.293.684.050,00	178.738.805.455,00	251.543.232.317,60
3	Belanja Penerimaan Linnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.912.000.000,00	1.912.000.000,00	1.912.000.000,00	250.639.758.999,80	1.899.400.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	1.376.970.426,00	418.068.778,00	353.682.474,00	484.666.615,00
B	Belanja Langsung	291.324.236.026,00	299.135.163.473,00	305.823.163.849,00	247.525.852.615,99	248.399.559.935,00
1	Belanja Honorarium PNS	31.673.317.133,00	31.779.369.250,00	24.752.588.000,00	11.285.719.950,00	7.921.218.950,00
2	Belanja Honorarium Non PNS	40.058.856.505,00	52.413.875.692,00	62.031.086.914,00	74.426.429.743,00	84.601.545.804,00
3	Belanja Uang Lembur	4.990.794.690,00	4.446.318.970,00	3.476.058.500,00	20.061.690.257,00	12.256.748.835,00
4	Belanja Premi Asuransi	6.635.454.552,00	7.157.748.192,00	10.825.830.811,00	11.339.319.872,00	17.922.349.218,00
5	Belanja Makan dan Minum	20.573.724.267,00	18.798.826.650,00	19.245.249.005,00	20.839.691.237,00	18.526.336.206,00
6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.001.950.050,00	708.487.000,00	875.009.000,00	753.230.000,00	709.300.000,00
7	Belanja Pakaian Kerja	753.693.000,00	1.490.815.500,00	1.010.471.000,00	424.565.000,00	586.021.800,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.142.524.920,00	2.926.915.100,00	2.632.284.700,00	878.860.000,00	992.880.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	150.563.216.859,00	160.640.946.069,00	163.815.826.019,00	99.248.779.458,99	100.216.951.819,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.897.963.250,00	12.628.645.000,00	11.897.086.500,00	6.578.939.000,00	4.110.077.500,00
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	4.885.403.300,00	5.665.153.750,00	5.039.200.000,00	1.545.826.598,00	238.335.703,00
12	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	346.500.000,00	141.000.000,00	-	286.700.000,00
13	Belanja Pemulangan Pegawai	4.147.337.500,00	131.562.300,00	81.473.400,00	142.801.500,00	31.094.100,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.305.415.076,00	55.372.324.925,80	39.112.528.134,00	21.410.880.364,00	39.887.755.144,06
	TOTAL	611.305.977.482,00	638.610.976.873,00	668.439.509.252,00	679.144.899.544,79	694.396.603.131,60

Sumber : BPKAD Kab. Malinau



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (tahun) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan apratur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2016	694.396.603.131,60	1.412.958.527.889,00	49,14
2	Tahun Anggaran 2015	679.144.899.544,79	1.640.937.062.574,00	41,39
3	Tahun Anggaran 2014	668.439.509.252,00	2.087.007.602.923,00	32,03
4	Tahun Anggaran 2013	638.610.976.873,00	2.155.026.650.603,00	29,63
5	Tahun Anggaran 2012	611.305.977.482,00	1.583.027.868.187,00	38,62

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal dan sekaligus menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2011-2015. Pembiayaan daerah Kabupaten Malinau terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan.

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan piutang tuntutan ganti rugi.

Tantangan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 dalam pembiayaan daerah adalah meningkatkan manajemen keuangan daerah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan sehingga tidak terjadi SILPA; mengembangkan manajemen



perusahaan daerah agar lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemerintah daerah Kabupaten Malinau; dan meningkatkan manajemen pengelolaan asset daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Selain itu, Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan :

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.841.569.105.991	1.287.040.092.114	1.487.638.369.990
	Dikurangi Realisasi:	-	-	-
2	Belanja Daerah	2.085.507.602.923	1.640.437.062.574	1.412.958.527.890
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000	500.000.000	-
	Defisit Riil	(245.438.496.932)	(353.896.970.460)	74.679.842.100

Sumber : Hasil Analisis



Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Malinau Tahun 2014-2016

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	617.598.957.261,61	373.242.359.329,15	20.375.160.269,41
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.029.801.400,00	-
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	31.646.000,00
7	Penerimaan Piutang Daerah	1.081.869.000,00	-	-

Sumber : Hasil Analisis

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan perkembangan keuangan daerah, maka perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Malinau selama periode tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

Tabel 3.10
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.315.703.866.959,99	1.390.904.401.228,64	1.408.139.314.366,64	1.476.008.732.996,85	1.527.592.766.619,69
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.289.455.630,05	57.188.174.548,64	60.502.191.866,64	62.058.942.131,90	65.813.276.641,34
1.1.1	Pajak Daerah	8.956.402.933,50	10.462.319.900,00	14.095.830.000,00	15.388.857.269,82	18.663.606.096,84
1.1.2	Retribusi Daerah	1.376.106.350,00	1.238.450.000,00	1.256.582.000,00	1.288.483.380,00	1.314.253.047,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6.548.674.595,81	5.756.333.000,00	5.756.333.000,00	5.872.035.293,30	5.930.755.646,23
1.14	Lain-lain PAD yang sah	42.408.271.750,74	39.731.071.648,64	39.393.446.866,64	39.509.566.188,78	39.904.661.850,67
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.082.315.507.446,00	1.125.275.135.599,00	1.155.183.042.500,00	1.184.737.484.418,01	1.227.319.492.741,70
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	167.331.682.198,00	197.232.676.599,00	184.052.704.500,00	174.947.568.770,43	176.697.044.458,14
1.2.2	Dana Alokasi Umum	778.661.083.000,00	798.139.775.000,00	814.152.557.000,00	838.545.601.109,38	859.509.241.137,11
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	106.802.966.722,00	83.980.000.000,00	101.032.377.000,00	115.019.183.518,20	134.606.950.471,35
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	29.519.775.526,00	45.922.684.000,00	55.945.404.000,00	56.225.131.020,00	56.506.256.675,10
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	174.098.903.883,94	208.441.091.081,00	192.454.080.000,00	229.212.306.446,94	234.459.997.236,66
1.3.1	Hibah	3.454.551.390,88			3.559.227.752,58	3.594.820.030,10
1.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	28.398.918.093,06	28.304.467.081,00	30.925.805.000,00	31.080.434.025,00	31.235.836.195,13
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	105.301.627.000,00	166.624.624.000,00	161.528.275.000,00	164.350.387.594,10	167.664.834.234,74
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.512.000.000,00	13.512.000.000,00		13.783.591.200,00	13.921.427.112,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	12.431.807.400,00			16.438.665.875,27	18.043.079.664,70



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

NO	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
2	BELANJA	1.385.534.789.567,75	1.411.068.916.661,07	1.438.139.314.366,64	1.506.008.732.996,85	1.554.592.766.619,70
2.1	Belanja Tidak Langsung	722.821.432.128,53	791.439.310.250,32	846.283.751.297,67	847.005.607.066,31	849.397.159.427,80
2.1.1	Belanja Pegawai	437.886.519.765,00	485.479.171.465,32	508.885.186.907,67	509.902.957.281,49	510.922.763.196,05
2.1.3	Belanja Subsidi	6.036.814.177,00	3.973.874.400,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.821.604.703,53	29.181.210.785,00	23.317.689.570,00	19.367.311.321,00	20.284.055.081,24
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.447.787.400,00	2.049.731.600,00	2.500.000.000,00	1.849.882.769,00	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemda lainnya	260.628.706.083,00	270.318.724.000,00	304.580.874.820,00	304.885.455.694,82	305.190.341.150,52
2.1.7	Belanja Tidak Terduga		436.598.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	662.713.357.439,22	619.629.606.410,75	591.855.563.068,97	659.003.125.930,54	705.195.607.191,89
2.2.1	Belanja Pegawai	93.881.369.981,00	113.227.457.091,00	103.492.187.747,00	114.693.494.493,93	118.971.561.838,55
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.675.136.316,45	323.626.925.677,00	306.710.003.192,00	275.965.577.261,87	277.345.405.148,17
2.2.3	Belanja Modal	329.156.851.141,77	182.775.223.642,75	181.653.372.129,97	268.344.054.174,75	308.878.640.205,17
3	PEMBIAYAAN	92.007.208.040,19	20.164.515.432,43	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	27.000.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	92.007.208.040,19	22.164.515.432,43	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	27.000.000.000,00
3.1.1	Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000,00			



Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malinau selama periode tahun 2016-2021 diarahkan pada hal-hal berikut.

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.



- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2018 pendapatan daerah mengalami penurunan namun dengan berbagai kebijakan tersebut diatas, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malinau diperkirakan meningkat pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD terutama pajak daerah serta kenaikan dan perimbangan. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan akan meningkat.

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tetap masih tinggi. Dengan kata lain, dana perimbangan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya perkembangan ekonomi yang semakin cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha dan pada akhirnya akan memberikan pendapatan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Malinau akan meneruskan berbagai kebijakan perubahan (transformasi) untuk meneruskan dan menyempurnakan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dengan berbagai program dan kegiatan unggulan yang berhasil meningkatkan kinerja, mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang belum optimal, serta menambahkan program dan kegiatan baru sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021.



Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten sehingga setiap belanja yang dilakukan seluruh perangkat daerah harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- (2) Mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Strategi ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;
- (3) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;
- (4) Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan melalui pendelegasian berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan dari perangkat daerah kepada Pemerintah Desa dan kecamatan; peningkatan jumlah dan kapasitas aparat Pemerintah Desa dan kecamatan; penyiapan tenaga pendamping pembangunan desa dan kecamatan baik dari perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kebijakan belanja langsung daerah Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2016-2021 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.



- (1) Meneruskan dan mempertajam melaksanakan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA);
- (2) Melaksanakan program unggulan RT BERSIH, BERAS DAERAH (RASDA) dan WAJIB BELAJAR ENAMBELAS TAHUN;
- (3) Melaksanakan tiga belas (13) program utama;
- (4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyebaran tenaga pendidik;
- (6) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, cepat, bermutu, dan terjangkau melalui program berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, dan pelaksanaan jaminan sosial;
- (7) Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya;
- (8) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Meningkatkan efektivitas Dana GERDEMA dan RT BERSIH yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, tertinggal, dan daerah pemekaran baru;
- (10) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBD Kabupaten Malinau, APBD Provinsi dan APBN.
- (11) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2016-2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- (2) Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit.

Perubahan struktur belanja merupakan upaya mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan partisipatif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan seperti tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Selain itu, perubahan struktur belanja daerah tersebut merupakan bagian dari upaya dan tekad yang kuat dan bulat Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah lebih berpihak kepada masyarakat.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Melihat hasil analisis perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta Belanja tidak Langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2017-2021 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Malinau, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk mendanai pembangunan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	Proyeksi				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan	1.315.703.866.960	1.390.904.401.229	1.408.139.314.367	1.476.008.732.997	1.527.592.766.620
2	Pencairan dan cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	92.007.208.040	22.164.515.432	30.000.000.000	30.000.000.000	27.000.000.000
	Total Penerimaan	1.407.711.075.000	1.413.068.916.661	1.438.139.314.367	1.506.008.732.997	1.554.592.766.620
	Dikurangi					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	698.515.225.848	755.797.895.465	813.466.061.728	814.788.412.976	816.113.104.347
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	709.195.849.152	657.271.021.196	624.673.252.639	691.220.320.021	738.479.662.273

Sumber : Hasil Analisis



Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

- Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala Daerah.
- Prioritas III, dialokasikan untuk mebiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan realisasi dan proyeksi rencana penggunaan kapasitas Riil kemampuan kuangan Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

No	Uraian	Proyeksi				
		2017 (RP)	2018 (RP)	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (RP)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	709.195.849.152	657.271.021.196	624.673.252.639	691.220.320.021	738.479.662.273
1	Prioritas I	188.572.987.000	185.692.474.000,00	220.029.262.000,00	235.854.341.350,00	249.923.849.730,00
2	Prioritas II	380.365.088.000	311.802.052.000,00	269.125.473.000,00	319.025.413.088,00	342.751.660.069,00
3	Prioritas III	140.257.774.152	159.776.495.196	135.518.517.639	136.340.565.583	145.804.152.474



BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Malinau juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021).

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Daerah. Pelaksanaan Analisis Permasalahan daerah merupakan strategi penyusunan rencana pembangunan daerah yang menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Permasalahan Pembangunan Daerah sangatlah penting diketahui guna mengambil dan menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2016-2021. Berikut dijabarkan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau yang menjadi dasar isu strategis Permasalahan dasar Pembangunan.

4.1.1 Permasalahan Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999, memiliki dua penyebutan sebagai "Kabupaten Perbatasan dan Kabupaten Konservasi" . dengan Wilayah Kabupaten Malinau yang sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan serta Luas Wilayah Konservatif tentu memiliki beban pembangunan daerah. Dari sisi kawasan Perbatasan Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa. Dari sisi Kawasan Konservatif Kabupaten Malinau terbatas untuk mengelolah kawasan Hutan Produktif yang menghambat eksploitasi hutan guna kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah.



Melihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau dari tahun ketahun semakin meningkat. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebesar 62.580 jiwa. Sementara pada tahun 2016, jumlah penduduk mencapai 80.619 jiwa. Peningkatan yang cukup tinggi ini diindikasikan karena adanya perpindahan penduduk yang datang ke Malinau (imigrasi). Di satu sisi, penambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi. Di sisi lain, penambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan. Permasalahan yang harus diatasi adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

Selain itu, Sebagai dampak dari penurunan harga komoditas tambang dan perkebunan, perlambatan kegiatan pertambangan dan perkebunan, dan pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau cenderung meningkat. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, belum efektifnya program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan belum adanya realisasi kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

4.1.2 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

(1) Perekonomian Daerah

Melihat dampak penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dalam mendorong percepatan dan pemulihan ekonomi daerah, belum adanya sinergi antara perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan, belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Tingginya ketergantungan pada pertambangan dan penggalian membuat perekonomian Kabupaten Malinau sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Permasalahan yang harus diatasi dalam beberapa waktu



mendatang adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

(2) Permasalahan Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan kemajuan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Malinau selama periode 2012-2016 adalah sebesar 0,66 persen pertahun. Permasalahan yang harus diatasi dalam tahun 2016-2021 adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

(3) Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 2,59 ribu jiwa dalam lima tahun atau Menurun dari 11,68 persen pada tahun 2012 menjadi 7,15 persen pada tahun 2016. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat desa di Kabupaten Malinau mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malinau bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian; serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).



(4) Permasalahan Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa wisata/budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, Inovasi dan kreatifitas dalam mengelola museum sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- b) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- c) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- d) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelaku budaya/kesenian daerah;
- f) Inovasi dan kreatifitas pelaku kesenian/budaya masih rendah;
- g) Kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- h) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

Selain itu, dalam mewujudkan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa atau dapat dikatakan sebagai tulang punggung bangsa untuk masa yang akan datang, peranan pemuda sangatlah penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang handal serta dalam pembangunan daerah. Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai selama ini cukup berdampak pada kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau Namun beragam Permasalahan dan kendala yang dihadapi menjadi penghambat dalam pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Adapun beberapa permasalahan yang di hadapi :

- a) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, miras masih cukup tinggi;
- c) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai;
- d) Jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda masih rendah;
- e) Pemuda belum sebagai "*agent of change*";
- f) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.



4.1.3 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

(1) Permasalahan Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu lima tahun adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang masih harus diatasi dalam beberapa tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau.

(2) Permasalahan Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.



4.1.4 Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah

(1) Permasalahan Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, Pembangunan jalan Negara dan jalan provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kemajuan desa.

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Malinau terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam beberapa tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Transportasi sungai dan laut di Kabupaten Malinau juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi air untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.



(2) Permasalahan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

(3) Permasalahan Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

(4) Permasalahan Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Rumah tangga pengguna utama listrik di Kabupaten Malinau telah mencapai lebih dari 60 persen. Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah belum optimalnya jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

4.2 Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskanantisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.



Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

4.2.1 Telaahan Isu Internasional dan Nasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarukan yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/MDGs*), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

(1) Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September tahun 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;



2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan. Rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Kabupaten Malinau khususnya rumusan SDGs dan target pencapaian menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Ketujuh belas tujuan tersebut yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau, antara lain isu kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, infrastruktur yang berketahanan, ketersediaan dan pengelolaan air, akses energi yang terjamin dan berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mendorong masyarakat yang damai dan inklusif dan merevitalisasi kemitraan global.

(2) Pemanasan Global /Perubahan iklim (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

(3) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. MEA dibentuk dengan tujuan membuka peluang baru melalui pemberlakuan sistem pasar terbuka dimana terdapat kebebasan mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antar negara-negara anggota.



MEA menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama untuk wilayah perbatasan seperti Kabupaten Malinau yang merupakan „beranda“ terdepan yang berhadapan langsung dengan negara lain. Melalui pemberlakuan sistem pasar dan basis produksi tunggal, Kabupaten Malinau harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak tersingkir dalam persaingan yang sudah semakin bebas dan dinamis. Penerapan kesepakatan MEA akan menjadikan investasi dan modal sebagai faktor perekonomian yang dapat dengan lebih bebas memasuki Kabupaten Malinau. Dalam menghadapi penerapan MEA, harus dilakukan pembenahan dan menyusun langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dan pemerintah daerah juga harus menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan, mengubah paradigma yang lebih mengarah ke kewirausahaan demi meningkatkan daya tarik investasi yang dimiliki dan menjadikan Kabupaten Malinau salah satu kabupaten yang berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong investasi daerah yaitu meliputi:

1. Penyederhanaan prosedur dan waktu pemrosesan kegiatan investasi yang masuk serta transparansi proses perijinan investasi.
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan.
3. Pengoptimalan kinerja dan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
4. Peningkatan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

(4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode 2015-2019, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:



“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gorong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;



8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan. Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten perbatasan dalam wilayah pulau Kalimantan menjadi salah satu lokasi prioritas nasional.

4.2.2 Telaahan Isu atau Kebijakan Provinsi Kalimantan Utara

(1) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memiliki visi pembangunan "***Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa***", dengan upaya pencapaian berupa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari ketiga misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti berikut:



1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan
3. Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel

4.2.3. Telaahan Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD 2016-2021 merupakan tahapan ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Malinau. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan ". Dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Malinau, maka misi Kabupaten malinau yang akan dicapai dalam kurun waktu dua puluh tahun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu, mandiri dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan;
3. Mendorong pemerataan pembangunan di segala bidang;
4. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dengan membuka peluang berinvestasi, baik luar maupun dalam;
5. Mewujudkan Daerah Perbatasan menjadi daerah yang layak huni, produktif dan mandiri, dan berfungsi sebagai halaman depan wilayah NKRI;
6. Meningkatkan peranan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten terdepan dalam Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pelestarian Lingkungan;



7. Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan meningkatkan mutu aparatur pemerintah yang bertaqwa kepada Tuhan YME, kreatif, inovatif, produktif, cerdas, sehat dan berdisiplin.

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama dua periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka RPJM ke-3 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta mandiri di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

4.2.4 Isu Strategi Kabupaten Malinau

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

(1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Kabupaten Malinau

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kabupaten Malinau merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, khususnya pertanian dan pertambangan;
- b. Kabupaten Malinau memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Malinau;
- c. Kabupaten Malinau memiliki keragaman sumberdaya alam hayati yang beragam, dan memiliki potensi jasa lingkungan kehutanan;
- d. Kabupaten Malinau telah mengembangkan desa wisata dan destinasi wisata budaya sebagai modal bagi pengembangan ekonomi wilayah;



- e. Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang baru terbentuk selama lebih dari 10 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan;
- f. Kabupaten Malinau berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dengan kemiripan dan persamaan budaya lokal yang unik sebagai dasar membangun kemitraan dan kerjasama yang bermanfaat, adil dan saling menguntungkan;
- g. Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sejak tahun 2012 secara bertahap telah menumbuhkan kesadaran, semangat dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan kehidupan desa;
- h. Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah terutama di desa dan kecamatan;
- i. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT menjadi bagian dari berkembangnya dan manajemen kepemimpinan di tingkat RT yang demoraktis, transparan dan akuntabel sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Perkembangan forum partisipasi dan komunikasi pembangunan desa memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperkuat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau.

(2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Kabupaten Malinau

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya budaya kagetan dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Malinau;
- c. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih,



- pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- d. Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa;
 - e. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
 - f. Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi komoditas industri yang memiliki nilai tambah;
 - g. Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - h. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
 - i. Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.
 - j. Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;
 - k. Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
 - l. Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - m. Belum adanya manajemen pengembangan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;
 - n. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata di Kabupaten Malinau akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah.



(3) Identifikasi dan Analisis Peluang Kabupaten Malinau

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Malinau;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Malinau;
- c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Malinau;
- e. Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Malinau baik wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat.

Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan



masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;

- b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;
- c. Proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan; serta pengendalian dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, aman, nyaman, bermutu dan bermartabat;

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Malinau akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;
- c. Pemerintah Kabupaten Malinau dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.



(4) Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Malinau akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
- b. Perdagangan yang terus meningkat mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Malinau yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Malinau;
- c. Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Malinau;

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Praktik demokrasi secara partisipatif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malinau dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan dalam pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;
- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau;
- c. Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan



terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Malinau.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektivitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau;
- b. Persaingan antardaerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan asset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
- c. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah terutama jalan, transportasi udara dan sungai; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
- d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Malinau sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

Selanjutnya Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, sebagaimana penjelasan diatas maka isu strategis daerah Kabupaten Malinau dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

(1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik



- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
- c. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antarperangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- f. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

(2) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

- a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
- d. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
- e. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.



(3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- e. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;
- g. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
- h. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

(4) Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Malinau;
- b. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antardaerah dan antarkecamatan;
- c. Terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- d. Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
- e. Terbatasnya transportasi darat, udara, dan sungai terutama dalam



menghubungkan antardesa dan antarkecamatan;

- f. Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat, sungai dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Malinau;
- g. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

(5) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
- b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- d. Belum optimalnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi bencana alam.



BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMN 2015-2019, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- **Kabupaten Malinau yang MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- **Kabupaten Malinau yang SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya



nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

5.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- (4) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui



- pengembangan produk unggulan desa: *"one village one product"* dengan semboyan "Bertani Sehat";
- (6) Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
 - (7) Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
 - (8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun";
 - (9) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - (10) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
 - (11) Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
 - (12) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, RTRW Kabupaten Malinau, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021, maka skenario pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun untuk memberikan arah bagi pembangunan daerah.

(1) Skenario Pembangunan Ekonomi Daerah 2016-2021

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau selama 2011-2015, skenario pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun dengan skenario moderat untuk mendorong percepatan (akselerasi) dan sekaligus perubahan (transformasi) pembangunan melalui pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan



program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 3,65 persen pada tahun 2016-2021;
- (2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 0,49 persen pada tahun 2016-2021;
- (3) Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,01. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,001 persen;
- (4) Elastisitas pertumbuhan PDRB perkapita terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,49 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan PDRB perkapita akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0049 persen.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah selama tahun 2016-2017, maka perubahan proyeksi pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau 2016-2021 menurut skenario moderat melalui perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan adalah sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dari 1,71 persen pada tahun 2016 menjadi 4,75 persen pada tahun 2021;
- (2) Tingkat pengangguran terbuka akan turun dari 8,53 persen pada tahun 2016 menjadi 8,47 persen pada tahun 2021;
- (3) Tingkat kemiskinan akan turun dari 7,15 persen pada tahun 2016 menjadi 6,49-6,60 persen pada tahun 2021;
- (4) Indeks pembangunan manusia akan meningkat dari 70,71 pada tahun 2016 menjadi 72,16 pada tahun 2021.



Gambar 5.1:
Paradigma Gerakan Desa Membangun Kabupaten Malinau 2016-2021





5.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021, serta mempertimbangkan agenda Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang harus menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan komposisi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik krisis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam periode waktu 2016-2021. Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari dua belas misi RPJMD Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja trampil dan terdidik									
1	Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,7	71	71,29	71,58	71,87	72,16	72,16
Misi 2 : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi									
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,85	91,94	92,38	92,80	93,20	93,57	93,57
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi									
3	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	61,58	71,85	80,74	87,15	93,56	99,97	99,97



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan									
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,71	5,96	6,05	6,14	6,23	6,32	6,32
Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat"									
5	Meningkatnya Produksi Pertanian secara Luas	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	14,1	15,8	16,00	19,00	22,00	25,00	25,00
Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa									
6	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	3,69	3,95	4,22	4,52	4,84	5,18	5,18
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,12	3,45	3,81	4,21	4,65	5,14	5,14
Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi									
7	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis ,rukun dan damai	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun"									
8	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	Indek kualitas lingkungan hidup	67	69	71	72,5	73,5	75	75
Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)									
9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi birokrasi	C	C	CC	CC	CC	B	B
Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah									
10	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Indek pembangunan gender	83%	84%	85%	90%	100%	100%	100%
Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah									
11	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,7	1,8	2,5	2,6	2,8	3,1	3,1
Misi 12 : Memantapkan kapasitas pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Menyelenggarakan Kepentingan Rakyat									
12	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	CC	B	B	B	B



Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun													
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja trampil dan terdidik													
1	Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	72,16%	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29	13,29	
					Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,56	8,60	8,61	8,62	8,63	8,64	8,64	
					Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	71,10	71,17	71,50	72,00	72,50	73,00	73,00
					Prevalensi Balita Stunting	30,5	27,00	26,5	26	25,5	25	24,5	
Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi													
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	93,57%	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,15	8,06	7,62	7,2	6,80	6,43	6,43	
					Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk.Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang (%)	36,54	36,26	36,73	37,44	38,11	40,21	40,21



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi												
3	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (%)	99,97	Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Persentase Jalan dalam kondisi baik/mantap (%)	18	20	20	21	23	25,04	25,04
					Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas (%)	37	48	69	81	100	100	100
				Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi (%)	70	75	80	85	90	98,1	98,1
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan												
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,32	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan	Pendapatan Perkapita Masyarakat (Rp)	89.926.070	89.951.955	90.331.820	91.365.071	92.967.479	95.165.610	95.165.610
				Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,300	0,300	0,300	0,298	0,297	0,296	0,296
Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat"												
5	Meningkatnya Produksi Pertanian secara Luas	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	25%	Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,53	8,52	8,51	8,50	8,49	8,47	8,47
				Mengembangkan Produk Unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (%)	18,4	22,9	27,5	45,9	82,6	100	100



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa												
6	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	5,18	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan (%)	3,18	5,04	5,66	6,54	7,41	8,26	8,26
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	5,14	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat Pertumbuhan Industri (%)	15	16,75	17,01	17,36	18,03	18,70	18,70
Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi												
7	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis ,rukun dan damai	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan	100%	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	1:500	1:500	1:450	1:400	1:300	1:250	1:250
				Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase Konflik SARA (%)	0	0	0	0	0	0	0
Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun"												
8	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	Indek kualitas lingkungan hidup	75	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<5,0	0<IP<5,0	0<IP<5,0	0<IP<1,0	0<IP<1,0	0<IP<1,0	0<IP<1,0
					Indeks kualitas udara (ISPU)	51-100	51-100	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)												
9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi birokrasi	B	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai Sakip	C	CC	B	BB	A	A	A
					Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah												
10	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Indek pembangunan gender (%)	100%	Meningkatnya kesetaraan gender	Indek pembangunan gender (%)	83	84	85	90	100	100	100
				Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indek pemberdayaan gender (%)	60	65	70	75	80	85	85
				Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	60	65	75	80	90	95	95



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah												
11	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,1%	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	6.953	5,630	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000
				Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif (%)	85	85	90	95	100	100	100
				Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Cagar Budaya) (%)	-	43	57	71	86	100	100
Misi 12 : Memantapkan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Menyelenggarakan Kepentingan Rakyat												
12	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	C	C	CC	B	B	B	B



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*



BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 menekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dengan menyempurnakan dan mempertajam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang didukung dengan pelaksanaan tiga program unggulan serta program prioritas lainnya.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Malinau dalam Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesatu: **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima dan keenam dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi
Kesatu Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi ke Satu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM	
1. Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas	1.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pendidikan serta tenaga Pendidik	Pengadaan tenaga pendidik	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Melaksanakan wajib belajar dengan bebas SPP dan bebas pungutan biaya pendidikan dari PAUD,SD/MI,SMP/MTS, serta melakukan pemantauan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan wajib belajar 16 tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Pemberian penghargaan bagi siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Peningkatan pendidikan, kompetensi dan kualifikasi akademik bagi tenaga pengajar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			Penataan sistem rekrutmen dan penempatan kepala sekolah dan pengawas	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Optimalisasi peran serta masyarakat melalui pembentukan Dewan Pendidikan, PGRI dan komite sekolah	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
	1.2 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas	Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan termasuk penyediaan buku perpustakaan sekolah, buku paket pelajaran siswa, buku penghubung siswa dengan sekolah dan pendukung lainnya	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Penyediaan Layanan Transportasi Anak Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Pengembangan fasilitas kesehatan Dasar	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat
					Program peningkatan kesehatan anak balita
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
			Penyediaan perlengkapan Puskemas	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan Puskemas	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
		Revitalisasi pelayanan kesehatan RSUD	Pengembangan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Pengembangan fasilitas kesehatan RSUD	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan
			Penyediaan perlengkapan RSUD	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
			Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan RSUD	Program Peningkatan Profesional SDM
			Peningkatan manajemen kesehatan RSUD	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Standarisasi pelayanan Kesehatan

6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua: **Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, ketiga dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu dan kesepuluh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Dua : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	2.1 Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Memberdayakan masyarakat mulai dari level grass root	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Pemberian bantuan sosial, bantuan pangan beras daerah (rasda) dan bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA); Program Bantuan dan Jaminan Sosial
				Bantuan pangan rasda kepada rumah tangga sasaran penduduk miskin RTSPM
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
		Mengoptimalkan manfaat pengelbaan dana gerdema,dana desa dan dana RT Bersih	Meningkatkan infrastruktur dasar pedesaan dengan optimalisasi pemanfaatan dana gerdema ,dana RT Bersih dan ADD	Memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui Dana Gerdema dan dana RT Bersih
			Pendampingan satuan tugas GERDEMA revitalisasi peran RT	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa;
		Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian masyarakat desa	Pengadaan Balai latihan untuk masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,
			Penyediaan beasiswa kepada anak-anak malinau yang tidak mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Hibah bantuan beasiswa pendidikan
	2.2 Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Mengembangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Forum perencanaan partisipasi Pembangunan Desa	Harmonisasi Hubungan kelembagaan antara pemerintah desa,Badan Musyawarah Desa,LPMD,Tokoh Adat,LP3MD dan lembaga kemasyarakatan lainnya	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketiga: **Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita ketiga dan keenam dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, ketujuh, kesembilan dan kesepuluh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3
Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Tiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
3. Meningkatnya infrastruktur dasar	3.1 Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Mempercepat Pembangunan prasarana dan sarana desa, kecamatan dan perkotaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan ; Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan ; Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan ; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
			Menyediakan prasarana dan sarana air baku dan air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Program Penyediaan dan Pengolahan air baku; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	3.2 Meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa	Membuka keterisolasian daerah perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan	Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi ; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo



6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keempat: **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita ketiga, keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedua, kedelapan, dan kesepuluh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Empat : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM		
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah	4.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Mengembangkan lembaga ekonomi Desa	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
			Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ; Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD ; Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi		
			Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa dan kecamatan	Program perencanaan pembangunan ekonomi; Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi		
			Pemberian modal usaha tanpa agunan dan bunga kepada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada didesa, RT dan dusun	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		
	4.2 Meningkatkan Pemerataan Pertumbuhan ekonomi	Mempercepat pengembangan kawasan strategis kecamatan	Meningkatkan infrastruktur dasar pedesaan dengan optimalisasi pemanfaatan dana gerdema, dana desa dan dana RT Bersih	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) di setiap kecamatan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ; Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pasar); Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar; Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar	
				Pemberian bantuan pangan beras daerah (rasda) dan bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin	Memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui Dana Gerdema dan dana RT Bersih Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA) Bantuan pangan rasda kepada rumah tangga sasaran penduduk miskin RTSPM Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan)	
				Optimalisasi kegiatan padat karya	Pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran serta masyarakat (swakelola)	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pasar)



6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: **Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat"**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedelapan, kesembilan, dan keduabelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Kelima Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Lima : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat";					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM	
5 Meningkatkan Produksi Pertanian secara Luas	5.1 Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Mengembangkan kegiatan dan industri padat karya sektor pertanian	Pengembangan industri dengan memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku serta penerapan teknologi untuk kegiatan tersebut (agroindustri)	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan , Program Penerapan Teknologi Peternakan.	
			Pembangunan/Rehab jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian dengan sistem padat karya swakelola	Program Peningkatan infrastruktur Pertanian ; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
			Meningkatkan investasi pertanian	Pemberian kemudahan perijinan investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ; Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
			Perluasan kerjasama dan kemitraan dengan swasta dengan melibatkan masyarakat	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; Program Penyipaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
			Pengembangan sistem Resi Gudang di setiap kecamatan untuk menampung hasil pertanian dalam arti luas, termasuk menampung gabah untuk Rasda	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan ; Program Peningkatan infrastruktur Pertanian ; Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	
	5.2 Mengembangkan Produk Unggulan	Mengembangkan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten	Mengembangkan kluster-kluster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan ; Program Peningkatan Produksi pertanian; Program peningkatan produksi hasil peternakan; Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian; Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) ; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ; Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenhian (UPTD Kab); Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
			Mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan ; Program Peningkatan Produksi pertanian; Program peningkatan produksi hasil peternakan; Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian ; Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) ; Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kab); Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).
			Membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah	Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan ; Program Peningkatan Produksi pertanian; Program peningkatan produksi hasil peternakan ; Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian ; Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) ;
			Mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ; Program Pengembangan Kawasan Budidaya/ Air Laut, Payau dan Air Tawar; Program pengembangan budidaya perikanan

6.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keenam

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keenam: **Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesembilan dan kesebelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Keenam Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Enam : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
6. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	6.1 Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Pengembangan kota Malinau sebagai ibukota mandiri yang menjadi pusat Pemerintahan, pusat industri dan pusat perdagangan barang dan jasa	Mengoptimalkan kerjasama perdagangan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	6.2 Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa		Pengembangan forum kerjasama perdagangan antardaerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
			Mendorong pembangunan kawasan industri serta pengembangan industri kecil dan menengah	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ; Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ; Program Pengembangan sentra - sentra industri potensial ; Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar ; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ; Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

**6.1.7 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketujuh**

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketujuh: **Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kedelapan dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Ketujuh
Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Tujuh : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
7. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis ,rukun dan damai	7.1 Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Mengembangkan organisasi dan lembaga keagamaan	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah	Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Kegiatan Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah)
			Pembinaan pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Kegiatan Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan) ; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Pembentukan Forum komunikasi persaudaraan masyarakat	Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Kegiatan Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan) ; Program Fasilitas Perjalanan Ibadah
	7.2 Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Mengembangkan kerjasama dan kemitraan antarpemeluk agama	Peningkatan pemahaman tentang toleransi kehidupan antar suku, agama dan Ras	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Pengembangan kegiatan bersama antarpemeluk agama	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Peningkatan mutu pendidikan moral, etika, budi pekerti dan karakter bangsa	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah demi meningkatkan ketentraman dan ketertiban desa	Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berprilaku budaya yang tertib, disiplin, ramah, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara ketentraman desa	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
			Meningkatkan kerja sama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman desa	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



6.1.8 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedelapan

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedelapan: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun"**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, keduabelas, ketigabelas, keempatbelas, dan kelimabelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.8
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Delapan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun"				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	8.1 Meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Pendampingan program RT bersih/ sosialisasi, evaluasi dan pengendalian program unggulan RT Bersih	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman ; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ; Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Meningkatkan pelibatan masyarakat didalam dan sekitar hutan dalam program perlindungan hutan termasuk pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun;	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Optimalisasi pengawasan pada pelaku usaha industri dalam pengolahan limbah industri dan penegakan aturan untuk yang melakukan pencemaran lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Mengembangkan sikap dan Prilaku konservasi	Pelaksanaan kampanye pelestarian lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Pengembangan pilot kegiatan pengelolaan lingkungan	Program RT Bersih; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Pemberian penghargaan kepada masyarakat pelestari lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Membangun kesepakatan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan	Penyiapan rencana kerjasama dan kemitraan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam ; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
			Memantapkan dukungan negara donatur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program kompensasi jasa lingkungan hutan dalam reduksi emisi karbon.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



6.1.9 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesembilan

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesembilan: **Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kedua, dan ketiga dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.9
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesembilan Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Sembilan : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM	
9. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mendorong Reformasi birokrasi	Penciptaan budaya kerja, disiplin dan perubahan pola pikir positif administrasi yang terpadu	Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan; Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik; Program Penunjang Pengawasan	
			Mengimplementasikan pelaporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
		Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; Program Perencanaan pembangunan daerah ; Program Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
			Penataan pengelolaan dan sertifikasi asset daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
		Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan	Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ; Program peningkatan jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum ; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (kegiatan Sosialisasi perturan perundang-undangan)	
			Peningkatan prasarana dan sarana politik	Hibah, bansos ; Program pendidikan politik masyarakat	
		Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum	Pembinaan dan pengembangan hukum terhadap apratur pemerintah dan masyarakat	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum	Program peningkatan jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
				Pemeliharaan kantibnas melalui kemitraan antar masyarakat dengan aparat penegak hukum	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH ; Program Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, Dan Keuangan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga kantibmas serta mencegah tindakan pelanggaran hukum	Penguatan peran dan kapasitas polisi pamong praja dan PPNS dalam penegakan Perda	Melaksanakan pemberian sanksi dan advokasi hukum secara konsisten, adil dan bertanggung jawab.	Pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
					Peningkatan sistem insentif dan disinsentif hukum
			Pengembangan sistem insentif dan disinsentif hukum	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH ;	



6.1.10 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesepuluh

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesepuluh: **Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ketiga, keempat, dan kelima; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.10
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesepuluh Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi KeSepuluh : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM	
10. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	10.1 Meningkatnya kesetaraan gender	Mewujudkan pengarusutamaan gender	Peningkatan pemahaman tentang hak-hak dasar perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;	
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	10.2 Meningkatnya Pemberdayaan Gender		Mengembangkan organisasi dan lembaga perempuan	Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga perempuan	Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
				Peningkatan kegiatan organisasi perempuan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan; Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
				Peningkatan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program dan kegiatan serta perumusan kebijakan KPD	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
				Meningkatkan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
	10.3 Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan		Mengembangkan organisasi dan lembaga kepemudaan	Pengembangan usaha bersama kelompok perempuan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
				Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kepemudaan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
				Pengembangan forum dialog dan kerjasama pemuda	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
				Pengembangan dan pembinaan organisasi sejak dini termasuk pembinaan organisasi pramuka	Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka
		Mengembangkan sikap dan perilaku wirausaha	Pengembangan pendidikan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	



6.1.11 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesebelas

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesebelas: **Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima, kedelapan dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedelapan, kesepuluh dan keenambelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.11
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesebelas Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Sebelas : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM	
11. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	11.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan	Mengoptimalkan pariwisata daerah	Penyediaan prasarana pendukung wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
			Pengembangan desa wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
			Meningkatkan informasi pariwisata malinau terpusat (TIC) <i>Tourism Informasi</i>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan wisata		Pemberian kemudahan perijinan investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
				Perluasan kerjasama dengan swasta	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan wisata ; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
		Meningkatkan mutu layanan wisata	Peningkatan standar mutu layanan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ; Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
				Pengembangan kapasitas dan keterampilan pelaku jasa wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Perluasan jaringan promosi dan pemasaran wisata	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	11.2 Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; Program Pengembangan Nilai Budaya	
			Pendataan dan pengembangan pusat-pusat seni dan budaya daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	11.3 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	Pembentukan, pembinaan dan monitoring dan evaluasi serta peningkatan SDM Kelompok Sadar Seni dan Budaya Daerah	Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	
			Mengadakan festival seni dan budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	
		Memberdayakan organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah	Penataan organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
			Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga seni dan budaya daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
			Penyediaan prasarana dan sarana seni dan budaya daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	



6.1.12 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua Belas

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keduabelas: **Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kedua, ketiga dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

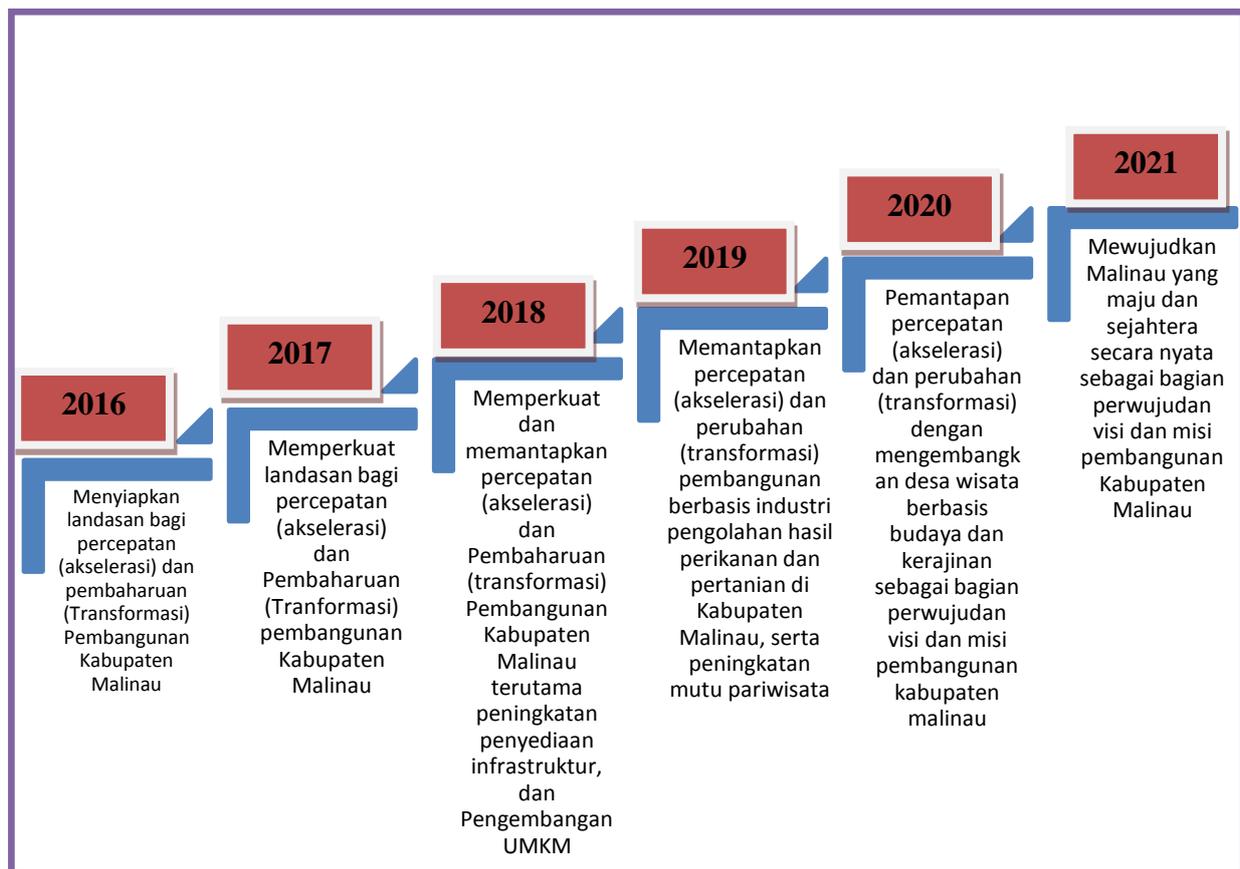
Tabel 6.12
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keduabelas Kabupaten Malinau 2016-2021

Misi Ke Dua Belas : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM		
12. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	12.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengembangkan profesionalisme pelayanan publik yang berkualitas	Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah ; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah ; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
			Optimalisasi Penerapan SPM dan SOP dengan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik	Program Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan (Kegiatan Pengadaan Pengaduan Masyarakat dengan tujuan tertentu dan benturan kepentingan) ; Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (kegiatan Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah)		
			Perumusan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah ; Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah ; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah ; Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan		
				Meningkatkan kinerja pemerintah desa	Pembenahan perencanaan pembangunan desa dan manajemen keuangan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ; Program perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian aparatur Pemerintah Daerah Desa, dan Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, desa dan kecamatan melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
					Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di bidang teknologi	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
					Memperluas kesempatan mengikuti Pendidikan yang lebih tinggi dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi dan swasta	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
				Mengembangkan sistem administrasi daerah yang maju berbasis teknologi informasi	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern	Program perencanaan pembangunan daerah; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; Program Fasilitasi Informasi Kedewanan
					Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6.2 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sejalan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dibagi dalam tahapan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas pada penguatan landasan pembangunan, penegasan pengembangan dan pemanfaatan momentum pembangunan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut mengenai arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021.

Gambar 6.1
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2016-2021





6.2.1 Tahapan Tahun 2016

Tahap pembangunan Tahun 2016 diarahkan untuk **menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Malinau 2016-2021;
- (2) Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Menyelenggarakan pemilihan dan pelatihan Ketua RT dalam pengelolaan RT BERSIH;
- (4) Menata struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau yang efisien dan efektif;
- (5) Mengembangkan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau;
- (6) Membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*);
- (7) Memperkuat peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- (8) Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
- (9) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- (10) Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.

6.2.2 Tahapan Tahun 2017

Tahap pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk **memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau** dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar



- 14 Tahun dari PAUD, dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten;
 - (4) Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*) secara konsisten;
 - (5) Memantapkan **pengembangan sumber daya manusia** dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
 - (6) Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan **komoditas unggulan desa**;
 - (7) Meningkatkan kinerja **kapasitas aparatur** Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
 - (8) Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarSKPD dan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat;
 - (9) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - (10) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran;
 - (11) Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
 - (12) Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur lainnya.

6.2.3 Tahapan Tahun 2018

Tahap pembangunan Tahun 2018 merupakan tahapan untuk **memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan pengembangan UMKMK** dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;



- (2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten;
- (4) Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*) secara konsisten;
- (5) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
- (6) Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan komoditas unggulan desa;
- (7) Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
- (8) Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan, dan pariwisata;
- (9) Menajamkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- (10) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan pemasaran;
- (11) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- (12) Memberdayakan dan menguatkan UMKMK terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.

6.2.4 Tahapan Tahun 2019

Tahap pembangunan Tahun 2019 merupakan tahapan untuk **memantapkan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) pembangunan berbasis industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian di Kabupaten Malinau; serta peningkatan mutu pariwisata.** Tahap pembangunan ini mengutamakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berstandar nasional dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- (1) Melaksanakan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
- (2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK A;
- (3) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten;
- (4) Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*) secara konsisten;
- (5) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
- (6) Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan komoditas unggulan desa;
- (7) Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
- (8) Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan, dan pariwisata;
- (9) Menajamkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- (10) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan pemasaran;
- (11) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- (12) Memberdayakan dan menguatkan UMKMK terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.

6.2.5 Tahapan Tahun 2020

Tahap pembangunan Tahun 2020 merupakan tahapan **Pemantapan, percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) dengan mengembangkan desa wisata berbasis budaya dan kerajinan sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.** Tahap pembangunan ini memastikan semua misi, tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- (1) Meningkatkan kerjasama pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda dan pemudi Malinau;
- (2) Mengembangkan pusat-pusat wirausaha bagi pemuda dan pemudi Malinau;
- (3) Memperluas kesempatan bagi pemuda dan pemudi dalam perintisan dan pengembangan usaha terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, telekomunikasi dan informasi, dan pemasaran;
- (4) Meningkatkan kapasitas masyarakat, Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan desa wisata dan komoditas unggulan desa;
- (5) Meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan mutu desa wisata;
- (6) Mengoptimalkan pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (7) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten.

6.2.6 Tahapan Tahun 2021

Tahap pembangunan Tahun 2021 merupakan tahapan untuk **mewujudkan Malinau yang Maju dan Sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau**. Tahap pembangunan ini memastikan semua misi, tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan pusat-pusat wirausaha bagi pemuda dan pemudi Malinau;
- (2) Mengembangkan desa dan kecamatan sebagai pusat wisata dan kerajinan
- (3) Memperluas kerjasama promosi dan pemasaran wisata;
- (4) Mengembangkan perintisan dan pengembangan usaha bagi pemuda dan pemudi Malinau terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, telekomunikasi dan informasi dan pemasaran;
- (5) Meningkatkan kapasitas masyarakat, Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan desa wisata dan komoditas unggulan desa;
- (6) Meningkatkan standar mutu pelayanan dan prasarana dan sarana perkotaan;
- (7) Mengoptimalkan pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;



- (8) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten.

6.3 Program Pembangun

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan serangkaian program sesuai dengan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Program ini disajikan pada Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Malinau 2016-2021.



Tabel 6.13
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN MALINAU 2016-2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Misi ke Satu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;																
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71		71,29		71,58		71,87		72,16		72,16			
	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah	13,25		13,26		13,27		13,28		13,29		13,29			
		Rata-rata lama sekolah	8,6		8,61		8,62		8,63		8,64		8,64			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	82%	436,08	84%	586,10	85%	707,97	88%	752,40	90%	1.000,00	90%	3.482,54	Dinas Pendidikan	
	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI	82%	34.229,00	84%	37.746,94	86%	50.111,24	88%	60.928,53	90%	66.243,19	90%	249.258,90	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	75,08%	18.291,10	77,04%	4.626,95	78,00%	3.049,26	80,00%	9.000,00	81,00%	10.000,00	81%	44.967,30	Dinas Pendidikan	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,47%	1.301,19	74,71%	15.180,65	76,00%	21.586,18	80,00%	15.555,00	85,00%	16.000,00	85%	69.623,01	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,17		71,5		72		72,5		73		73			
		Prevalensi Balita Stunting	27		26,5		26		25,5		25		24,5			
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	100%	3.871,91	100%	6.820,98	100%	7.836,70	100%	5.500,00	100%	6.000,00	100%	30.029,59	DKPP&KB	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	80,21%	11.564,96	82,00%	28.636,09	82,15%	19.811,30	84,21%	13.582,00	86,15%	10.086,00	86%	83.680,35	DKPP&KB	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa sehat	64%	181,99	67%	50,00	69%	690,07	71%	207,00	73%	215,00	73%	1.344,06	DKPP&KB	



		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan							3.242,00	99%	4.148,00	100%	4.301,00	100%	11.691,00	DKPP&KB
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	80%	91,47	82%	1.414,00	84%		1.180,00	86%	1.556,00	88%	1.613,00	88%	5.854,47	DKPP&KB
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan sesuai standar	74%	681,89	78%	2.250,00			3.310,00	86%	2.300,00	90%	2.500,00	90%	11.041,89	DKPP&KB
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase ketersediaan sarana penunjang di Puskesmas/ Pustu	100%	9.622,14	100%	2.089,83	100%		19.690,03	100%	8.000,00	100%	8.296,00	100%	47.698,00	DKPP&KB
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana Penunjang di Rumah Sakit	2 unit	4.472,37	2 unit	528,03	2 unit		670,86	2 unit	6.015,00	2 unit	7.000,00	2 unit	18.686,26	DKPP&KB
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Anak Balita yang dilayani	24	52,49	24	120,00				24	311,00	24	323,00	24	806,49	DKPP&KB
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang terlayani		-	-					83%	207,00	85%	215,00	85%	422,00	DKPP&KB
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian ibu	90%	165,31	95%	2.533,38			671,00	97%	2.724,00	98%	2.825,00	98%	8.918,69	DKPP&KB
		Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih		-	-					85%	5.185,00	90%	5.200,00	90%	10.385,00	DKPP&KB
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit		-	-					95%	2.000,00	95%	2.500,00	95%	4.500,00	RSUD
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Promosi Layanan kesehatan Rumah Sakit		-	-					100%	100,00	100%	100,00	100%	200,00	RSUD



		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana aparatur	85%	5.677,68	85%	8.517,01	85%	772,08	85%	2.500,00	85%	2.800,00	85%	20.266,77	RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang terpelihara		-		-			100%	950,00	100%	1.100,00	100%	2.050,00	RSUD
		Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	Jumlah kerjasama layanan kesehatan dengan Rumah Sakit	100%	1.234,51	100%	1.846,42	100%	1.152,00	100%	1.350,00	100%	1.350,00	100%	6.932,93	RSUD
		Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	Persentase Tingkat Standar Layanan di Rumah Sakit							100%	1.000,00	100%	1.017,11	100%	2.017,11	RSUD
		Program Peningkatan Profesional SDM	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi secara profesional sesuai bidangnya							85%	1.000,00	85%	1.200,00	85%	2.200,00	RSUD
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (BLUD)	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan dan layanan sarana aparatur	100%	27.493,43	100%	30.426,72	100%	32.488,00	100%	33.000,00	100%	35.000,00	100%	158.408,15	BLUD
					119.367,51		143.373,10		166.968,67		177.870,93		186.884,30		794.464,50	
Misi Ke Dua : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;																
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		91,94		92,38		92,80		93,20		93,57		93,57	
		Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase Penduduk Miskin		8,06		7,62		7,2		6,8		6,43		6,43	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase BUMDES yang dibina	87%	603,65		-			85%	777,75	87%	806,52	87%	2.187,92	PMD
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	528,53	100%	65,00		40,00		-		-	100%	633,53	Bag. Tapem
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	265,48		-							100%	265,48	Bag. Tapem
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	100%	3.058,14	100%	4.381,28	100%	4.196,39	100%	4.673,90	100%	4.704,23	100%	21.013,94	PMD



		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA)	Jumlah ketersediaan pangan utama	88%	2.456,24	90%	1.986,13	91%	296,00			91%	4.738,36	Bagian. Ekonomi				
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	16,56	100%	170,00		170,00	100%	182,81	100%	189,58	100%	728,95	DP3AS		
		Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	549,76	100%	360,00		250,00	100%	387,13	100%	401,46	100%	1.948,35	DP3AS		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Koordinasi dan Monev Bidang Rehabilitasi Kesra	100%	17,55	-	-		-		389,46		403,64	100%	810,65	Bag. Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan layak huni		-	-	-		30,65		19.000,00		50,00		31.000,00	50,00	50.000,00	DPU-PR.PERKIM
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kepersertaan JKN	80%	10.907,33	84%	373,67	88%	15.025,14	92%	15.581,00	96%	18.790,00	96%	60.677,15	DKPP&KB		
		Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	70%	858,42	100,00%	250,00	100%	660,00	100%	350,00	100%	325,00	100%	2.443,42	Bappeda & Litbang		
		Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk. Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang (%)		36,26		36,73		37,44		38,11		40,21		40,21			
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	87%	400,00	90%	1.832,55	92%	1.942,11	94%	1.244,40	96%	1.290,44	96%	6.709,51	PMD		
					19.661,66		9.418,63		22.579,64		42.586,46		57.910,87		152.157,26			
Misi Ke Tiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;																		
		Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar		71,85		80,74		87,15		93,56		99,97		99,97			
		Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik / mantap		20		20		21		23		25,04		25,04			



		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang terbangun	27,25	155.171,31	15,22	76.664,30	16,44	65.908,68	19,23	79.045,33	21,85	81.524,89	2185%	458.314,51	DPU-PR.PERKIM
		Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan dan jembatan yang terpelihara			24%	1.885,00	24%	2.500,00	24%	2.000,00	28%	2.300,00	28%	8.685,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jmlh jaringan jalan dan jembatan yang dapat diakses		-		-			33%	600,00	33%	600,00	33%	1.200,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Terhubungnya kembali akses barang atau jasa yang terputus akibat bencana alam				-			31%	4.000,00	31%	4.000,00	31%	8.000,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	3,40%	1.144,06	19,60%	7.986,77		6.958,96		2.785,49	26,02%	10.400,00	26%	29.275,28	DPU-PR.PERKIM
		Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku	Persentase penduduk berakses air Bersih		-		-				-	63,39	6000,00	63,39	6.000,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan pemukiman masyarakat yang dikembangkan	34%	31.544,17	27%	25.154,97	18%	32.196,61	10%	10.987,06	11%	12.945,00	11%	112.827,82	DPU-PR.PERKIM
		Meningkatkan konektivitas antar kecamatan	Presentase Desa yang terjangkau komunikasi		75		80		85		90		98		98	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikelola		-	100%	2.556,00	100%	2.108,84	100%	4.048,00	100%	4.301,05	100%	13.013,89	Diskominfo
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase prasarana dan fasilitas yang dibangun	100%	855,22	100%	190,53		300,00	100%	646,00	100%	159,72	100%	2.151,48	Diskominfo
					188.714,76		114.437,58		109.973,09		104.111,88		122.230,66		639.467,97	
Misi Ke Empat : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;																
		Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,96		6,05		6,14		6,23		6,32		6,32	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan Perkapita Masyarakat		89,951,955		90,331,820		91,365,071		92,967,479		95,165,610		95,165,610	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase jumlah pengembangan usaha kecil menengah			-	100%	100,00	100%	150,00				100%	250,00	Bagian. Ekonomi	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya fungsi kelembagaan desa			-	100%	178,00	100%	185,00				100%	363,00	Bagian. Ekonomi	
		Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Jumlah pelaku usaha dan BUMD yang terdata	100%	5,39	100%	100%	20,00	100%	60,80				100%	86,19	Bagian. Ekonomi	
		Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi	Cakupan koordinasi dan monev pembangunan di bidang ekonomi					-			100%	1.300,00	100%	1.350,00	100%	2.650,00	Bagian. Ekonomi
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi			-	100,00%	230,00	100%	525,00	100%	200,00	100%	500,00	100%	1.455,00	Bappeda & Litbang
		Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	40,00	100%	100%	150,00	100%	25,00	100%	155,55	100%	200,00	100%	570,55	Dinas Perindag
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase tingkat Pengelolaan Home Industri					-			100%	518,50	100%	537,68	100%	1.056,18	Dinas Perindag
		Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar	Persentase jumlah pasar yang layak digunakan	100%	89,25	100%	100%	99,00			100%	103,70	100%	107,54	100%	399,48	Dinas Perindag
		Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar	Persentase jumlah pasar yang mendapatkan jalin operasi			-	100%	150,00	100%	50,00	100%	155,55	100%	161,31	100%	516,86	Dinas Perindag
		Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini			0,300		0,300			0,298		0,297		0,296		0,296
		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pasar)	Tingkat ketersediaan Infrastruktur Pedesaan								90%	2.699,90	95%	3.900,00	95%	6.599,90	Dinas Perindag
						137,93		934,30			1.002,10		5.140,40		6.763,77		13.957,41



Misi Ke Lima : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat";																
		Meningkatnya produksi pertanian secara luas	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15,80	16,00	19,00	22,00	25,00	25,00							
		Terbukanya Lapangan pekerjaan	Menurunya angka pengangguran	8,52	8,51	8,50	8,49	8,47	8,47							
		<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	100%	30,00	100%	10,00	100%	284,25	100%	298,84	100%	623,09	Dinas PMPTSP&TG	
		<i>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Persentase pengetahuan dan ketrampilan petani	100%	140,13	-	100%	380,00	100%	380,00	100%	380,00	100%	900,13	Dinas Pertanian	
		<i>Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</i>	Persentase teknologi pertanian/perkebunan yang diterapkan	100%	196,16	100%	275,00	100%	396,84	100%	275,00	100%	275,00	100%	1.418,00	Dinas Pertanian
		<i>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</i>	Persentase penyuluh pertanian/lapangan (PPL) yang terampil			-	60%	1.229,00	70%	1.229,00	70%	1.229,00	70%	2.458,00	Dinas Pertanian	
		<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>	Persentase Kenaikan nilai realisasi PMDN			23,70	75%	98,00	80%	207,00	85%	215,00	85%	543,70	Dinas PMPTSP&TG	
		Mengembangkan Produk Unggulan	persentase desa yang memiliki produk unggulan	22,9	27,5	45,9	82,6	100	100							
		<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)</i>	Ketersediaan pangan Utama	88%	632,02	90%	490,00	92%	341,00	94%	500,00	96%	752,76	96%	2.715,78	Dinas Ketahanan Pangan
		<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)</i>	Persentase Produktivitas Pangan	100%	2.923,85	100%	2.228,55	100%	1.295,13				100%	6.447,53	Dinas Pertanian	
		<i>Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan</i>	Persentase Produktifitas Pertanian/Perkebunan	100%	125,84	100%	375,00	100%	120,00	100%	751,00	100%	1.101,00	100%	2.472,84	Dinas Pertanian
		<i>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</i>	Persentase penanganan penyakit ternak	100%	24,35	100%	75,00	100%	75,00	100%	75,00	100%	75,00	100%	324,35	Dinas Pertanian



		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produktifitas hasil peternakan	100%	53,19	100%	240,00	100%	222,90	100%	2.079,00	100%	2.079,00	100%	4.674,09	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan infrastruktur Pertanian	Persentase Infrastruktur Pertanian dalam kondisi baik	100%	22,72	100%	76,50		100,00				100%		199,22	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian	Produktifitas Pertanian	100%	80,70	100%	410,00	100%	270,00				100%		760,70	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase sarana dan prasarana pertanian yang disediakan				-			90%	1.442	100%	1.442	100%	2.884,00	Dinas Pertanian
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	70%	80,07	75%	85,00	80%	165,00	85%	300,00	85%	350,00	85%	980,07	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase luas daerah yang terlayani irigasi	78%	53.870,15	12%	20.338,18	15%	8.437,62	21,00%	33.089,00	16,00%	25.400,00	16%	141.134,95	DPU-PR.PERKIM
		Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kab)	Produksi Benih Perikanan					100%	597,27	100%	750,00	100%	1.000,00	100%	2.347,27	Dinas Perikanan
		Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tingkat sarana prasarana perikanan yang memadai					100%	399,20	100%	750,00	100%	1.000,00	100%	2.149,20	Dinas Perikanan
					58.149,18		24.646,93		12.527,95		42.111,25		35.597,60		173.032,91	
Misi Ke Enam : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;																
		Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		39,95		4,22		4,52		4,84		5,18		5,18	
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		3,45		3,81		4,21		4,65		5,14		5,14	
		Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan		5,04		5,66		6,54		7,41		8,26		8,26	



	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	1:500	1:450	1:400	1:300	1:250	1:250							
	<i>Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial</i>	Cakupan koordinasi dan monev bidang kesra				100%	546,80	100%	570,22	100%	1.117,02	Bag. Kesejahteraan Rakyat			
	<i>Program Fasilitas Perjalanan Ibadah</i>	Perjalanan ibadah yang difasilitasi		100%	20,00	100%	180,00			100%	200,00	Bag. Kesejahteraan Rakyat			
	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase Konflik SARA%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Tingkat penanganan konflik dan gejolak masyarakat						100%	103,70	100%	107,54	100%	211,24	Kesbangpol	
	<i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i>	Persentase penyelesaian kasus tindak kriminal	80%	419,02	85%	100,00	86%	140,00	87%	155,55	88%	161,31	88%	975,88	Kesbangpol
	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	80%	107,05	-	100%		87%	259,25	90%	268,84	90%	635,15	Kesbangpol	
	<i>Program pengembangan wawasan kebangsaan</i>	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	593,50	100%	827,52		260,00				100%	1.681,02	Bag. Tapem	
	<i>Program pengembangan wawasan kebangsaan</i>	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		-	100%	25,00	100%	50,00				100%	75,00	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
	<i>Program pengembangan wawasan kebangsaan</i>	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		-	100%	19,28		-				100%	19,28	Kec. Maisel	
	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	80%	26,85	85%	10,00						85%	36,85	Kec. Sungai Boh	
	<i>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Persentase kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat						83%	259,25	85%	268,84	85%	528,09	Kesbangpol	
			1.146,43	1.001,80	630,00	1.324,55	1.376,75	5.479,52							



Misi Ke Delapan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun															
Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	69		71		72,5		73,5		75		75		
Meningkatkan kualitas air dan udara		Indeks kualitas air	0<IP<5,0		0<IP<5,0		0<IP<1,0		0<IP<1,0		0<IP<1,0		0<IP<1,0		
	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Persentase permukiman yang memiliki sanitasi	31%	6.874,46	42%	9.554,10		4.806,17	18%	4.000,00		-	18%	25.234,73	DPU-PR.PERKIM
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	8.537,42	89,01%	8.942,24	89,01%	9.291,89	89,01%	8.550,00	89,01%	8.600,00	89,01%	43.921,55	Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	10%	123,15		-			20%	311,11	25%	322,61	25%	756,87	Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	100%	410,47	50%	421,40	50%	858,62	50%	518,50	50%	537,68	50%	2.746,68	Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	100%	80,20	35%	85,00	40%	95,00	45%	155,55	50%	161,31	50%	577,05	Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kecamatan Gizi		-	90%	1.175,00	95%	685,60	100%	642,94	100%	1.000,00	100%	3.503,54	DKPP&KB
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola	-	-	-	-	-	-	22,00	550,00	22,00	550,00	22,00	1.100,00	DPU-PR.PERKIM
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam	70%	28,91	80%	100,00		-		600,00		150,00	80%	878,91	Bappeda & Litbang
				16.054,61		20.277,74		15.737,29		15.328,10		11.321,60		78.719,33	
Misi Ke Sembilan : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)															
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi	C		CC		CC		CC		B		B		



		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
				Sakip		B		BB		A		A				
				Nilai LPPD		Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan	100%	230,91	100%	220,00	100%	396,71	100%	200,00	100%	270,00	100%	1.317,62	Bag. Hukum
		Program peningkatan jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase cakupan jaringan dokumentasi dan informasi hukum			100%	61,88	100%	87,40	100%	150,00	100%	240,00	100%	539,28	Bag. Hukum
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Capaian hasil sistem pengawasan dan pengendalian			100%	25,00	100%	226,20	100%	475,00	100%	475,00	100%	1.201,20	Bag. Pembangunan
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tepat waktu dan akuntabel		-	100%	24.974,53		12.000,00					100%	36.974,53	Bag. Umum
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	46.545,50	100%	33.608,00	100%	31.335,00	100%	28.250,00	100%	28.650,00	100%	168.388,50	BPKD
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	43,00		22,00					100%	65,00	Bag. Pembangunan
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	100%	100,00	100%	580,00	100%	415,00	100%	1.095,00	Bag. Organisasi
		Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik	Persentase LHP yang ditindaklanjuti/Persentase PD yang menerapkan SPIP	80%	75,13	85%	357,27	90%	500,91	95%	1.047,37	100%	1.086,12	100%	3.066,79	Inspektorat
		Program Penunjang Pengawasan	Jumlah konsultasi, koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK, Ijren, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya	1 aplikasi (up-graded)	240,55	15 Kecamatan + 5 Lembaga	500,40	15 Kecamatan + 5 Lembaga	400,51					15 Kecamatan + 5 Lembaga	1.141,46	Inspektorat
		Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan	Persentase PD, Desa dan RT yang menjadi obyek Pemeriksaan	53 SKPD + 109 Desa + 381 RT	476,41	85%	2.200,91	90%	2.254,91	95%	3.012,49	100%	3.123,95	100%	11.068,68	Inspektorat



		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM, ORMAS, OKP, dan Partai Politik	100%	112,46	100%	1.024,67	100%	750,00	100%	680,00	100%	700,00	100%	3.267,12	Kesbangpol
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio petugas satpol dan linmas	100%	16.552,62	87%	15.099,92	100%	15.100,75	100%	17.625,00	100%	17.575,00	100%	81.953,30	Satpol-PP
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani	100%	76,45	100%	80,00	100%	389,80	100%	450,00	100%	450,00	100%	1.446,25	Satpol-PP
		Program Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase Dokumen pembangunan yang di evaluasi dan dikendalikan	40%			-		-	100%	450,00		850,00		1.300,00	Bappeda & Litbang
					64.310,03		78.195,58		63.564,20		52.919,86		53.835,07		312.824,73	
Misi Kesepuluh : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah																
		Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah	Indek Pembangunan Gender		84%		85%		90%		100%		100%		100%	
		Meningkatnya Kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender		84%		85%		90%		100%		100%		100%	
		Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak yang dihasilkan				-	80%		83%	155,55	85%	161,31	85%	316,86	DP3AS
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	108,83	100%	28,80	-	-	100%	300,00	100%	350,00	100%	787,63	DP3AS, Kec. Malinau Kota, Kec. Mentarang
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
		Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak yang dihasilkan				-	80%		83%	155,55	85%	161,31	85%	316,86	DP3AS
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	350,15	100%	233,18	-	-	-	-	-	-	100%	583,33	Kec. Maltara, Malbar, Mentarang Hulu, Pujungan, Kayan Hulu, Sei Boh, Bahau Hulu, Kayan Selatan, Sei Tubu, Malsel, Masehi
		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan perdesaan	87%	924,15	90%	1.900,00		1.670,60	94%	1.900,00	96%	1.950,00	96%	8.344,76	PMD
		Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		65%		75%		80%		90%		95%		95%	



		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan			80%	398,00	90%	998,00	95%	602,65	100%	684,00	100%	2.682,65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha baru			-				95%	250,00	100%	250,00	100%	500,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka	Persentase pramuka yang dibina			-			236,55	100%	75,00	100%	100,00	100%	411,55	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
							1.383,12		2.559,98		2.905,15		3.438,75		3.656,61	13.943,61	
Misi Ke Sebelas : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah																	
		Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			1,8		2,5		2,6		2,8		3,1		3,1	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan			5,630		6,500		7,000		7,500		8,000		8,000	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan			-	100%	75,00	100%	713,48	100%	155,00	100%	161,31	100%	1.104,79	Disbudpar
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola	100%	3.161,11	100%	2.300,00	100%	3.379,76	100%	2.385,10	100%	2.473,35	100%	13.699,31	Disbudpar	
		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Indeks kepuasan pelayanan perizinan	100%	207,90	100%	70,00	100%	35,00	100%	141,69	100%	132,00	100%	586,59	Dinas PMPTSP&TG	
		Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase Sanggar Seni yang aktif			85		90		95		100		100		100	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang ditingkatkan			-		-	75%	284,75	80%	570,35	85%	841,45	85%	1.696,55	Disbudpar
		Program pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelestarian jumlah warisan budaya dan cagar budaya			71%	1.940,55			100%	2.000,00	100%		71%	3.940,55	Bag. Humas dan Protokol	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Cagar Budaya)			43		57		71		86		100		100	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan			-	1 kali	4.374,62	1 kali	350,00	1 kali	2.488,80	1 kali	2.080,89	1 kali	9.294,31	Disbudpar
						3.369,01		8.760,17		4.762,98		7.740,94		5.689,00		30.322,11	



Misi Ke Dua Belas : Memantapkan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat															
	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	C		CC		B		B		B		B		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	C		CC		B		B		B		B		
	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah</i>	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					480,30	100%	259,25	100%	268,84	100%	1.008,39	Bag. Humas dan Protokol	
	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang difasilitasi	100%	18.231,34	85%	27.656,25	90%	14.764,88	93%	24.000,00	96%	25.000,00	96%	109.652,47	Setwan
	<i>Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah</i>	Jumlah peningkatan kapasitas kelenbagaan perencanaan daerah			100%	60,00	100%	500,00	85%	-	90%	-	90%	560,00	Bappeda & Litbang
	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan	70%	1.411,96	100%	4.914,32	100%	1.703,55	100%	1.925,00	100%	1.550,00	100%	11.504,83	Bappeda & Litbang
	<i>Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan</i>	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					100%	2.734,76	100%	4.992,35	100%	5.177,07	100%	12.904,18	15 Kecamatan dan 2 Perwakilan Kecamatan
	<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	Persentase aparat desa yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa				-	85%	1.400,00	100%	2.492,50	100%	2.488,42	100%	6.380,92	BPKD
	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	82%	189,36	85%	820,49	90%	601,76	95%	365,00	100%	395,00	100%	2.371,61	BKPP
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	2.328,93	85%	2.075,17	90%	1.391,55	95%	1.381,85	100%	1.432,98	100%	8.610,48	BKPP
	<i>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</i>	Persentase aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	100%	3.058,14	100%	4.381,28	100%	4.196,39	100%	4.673,90	100%	4.704,23	100%	21.013,94	PMD
	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</i>	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan			95%	2.106,51	95%	4.758,18	95%	1.970,03	95%	2.043,02	95%	10.877,74	Diskominfo
	<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</i>	Persentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	-		1 laporan	2.918,91	1 laporan		1 laporan	100,00	1 laporan	100,00	1 laporan	3.118,91	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	<i>Program Fasilitasi Informasi Kedewanan</i>	Persentase fasilitasi informasi kegiatan kedewanan				-	-	65%	126,75	70%	135,75	70%	262,50	Setwan	
	TOTAL		-	499.732,60	-	455.175,15	-	436.094,15	-	496.896,34	-	531.136,82	-	2.419.013,96	



6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Dengan mempertimbangkan sinergi RPJMD Kabupaten Malinau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis baik pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan penguatan daya dukung lingkungan. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional kabupaten Malinau, yaitu Kawasan Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Ibu Kota Kabupaten Malinau di Malinau Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan prioritas sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta industri.

Sementara itu, pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Kabupaten Malinau diutamakan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang meliputi: (1) pengembangan Klaster: pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan; (2) pengembangan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian serta perkebunan; (3) pengelolaan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; (4) pengembangan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan optimalisasi kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2011-2016 diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), dan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) serta kawasan strategis kabupaten. Fokus penataan ruang dilakukan dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan kota pusat pertumbuhan.

Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: (1) pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah; (2) pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang; (3) pengembangan pertanian



dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten; (4) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (5) pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah.

Tabel 6.14
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Strategi	Arah Kebijakan
1. Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah	a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa sekolah unggulan dan kejuruan serta perguruan tinggi; b. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan; c. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan; d. Membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi; e. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara, surya dan angin; f. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengelolaan sumber air minum; dan g. Membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.
2. Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang	a. Memantapkan fungsi PKW, PKS, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal; b. Mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang; d. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya; e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; f. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan



Strategi	Arah Kebijakan
	<p>agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah.</p> <p>g. Menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan, pembangunan prasarana dan sarana transportasi khusus serta jalur evakuasi, keperluan logistik dan pengembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan</p> <p>h. Memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan dan mengembangkan instalasi pengolahan limbah terpadu.</p>
<p>3. Pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten</p>	<p>a. Mengembangkan klaster-klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA;</p> <p>b. Mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;</p> <p>c. Membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;</p> <p>d. Mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.</p>
<p>4. Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan</p>	<p>a. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan;</p> <p>b. Memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;</p> <p>c. Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;</p> <p>d. Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;</p> <p>e. Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang; dan</p> <p>f. Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumberdaya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.</p>
<p>5. Pemanjapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah</p>	<p>a. Memantapkan fungsi kawasan lindung dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;</p> <p>b. Mengembangkan kerjasama dan penelitian dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan;</p>



Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none">c. Meningkatkan pelibatan masyarakat didalam dan sekitar hutan dalam program perlindungan hutan termasuk pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun;d. Mengembangkan program-program penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor;e. Mengembangkan fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang dan hutan lindung sebagai laboratorium alam megabiodiversity hutan tropika basah; danf. Memantapkan dukungan negara donatur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program kompensasi jasa lingkungan hutan dalam reduksi emisi karbon.

6.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan

(1) Pengembangan Wilayah Kecamatan Sungai Boh

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Sungai Boh diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perkebunan, peternakan dan perikanan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Sungai Boh dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan karet, kopi, kakao dan nanas;
- b. Pengembangan peternakan dan perikanan;
- c. Pengembangan pertanian tanaman pangan;
- d. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- e. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- f. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara;
- g. Pengembangan seni, budaya serta kepemudaan dan olah raga;
- h. Pengembangan prasarana pariwisata ;
- i. Penataan perumahan dan permukiman.

(2) Pengembangan Wilayah Kecamatan Kayan Selatan

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Selatan diarahkan peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari pertanian dan perkebunan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Selatan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan;



- b. Pengembangan perkebunan inisiatif rakyat, kopi, kakau, karet, nanas dan teh;
- c. Pengembangan jalan dari sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Pengembangan infrastruktur pariwisata ;
- e. Pengembangan kerajinan lokal;
- f. Peningkatan jalan antardesa dan antarkecamatan;
- g. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- h. Penataan permukiman.

(3) Pengembangan Wilayah Kecamatan Kayan Hulu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Hulu diarahkan peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari pertanian dan perkebunan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Hulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan;
- b. Pengembangan perkebunan inisiatif rakyat, kopi, kakau, karet, nanas dan teh;
- c. Pengembangan jalan dari sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Pengembangan infrastruktur pariwisata ;
- e. Pengembangan kerajinan lokal;
- f. Peningkatan jalan antardesa dan antarkecamatan;
- g. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- h. Penataan permukiman.

(4) Pengembangan Wilayah Kecamatan Kayan Hilir

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Hilir diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari industri rumah tangga, pertanian dan perkebunan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Hilir dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri rumah tangga
- b. Pengembangan perkebunan;
- c. Pengembangan pertanian;
- d. Pembangunan jalan Long Nawang - Data Dian;
- e. Pengembangan transportasi antardesa dan antarkecamatan;
- f. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- g. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan udara khususnya Bandara Data Dian;



h. Penataan perumahan dan permukiman.

(4) Pengembangan Wilayah Kecamatan Sungai Tubu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Sungai Tubu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari peternakan; dan kerajinan atau industri rumah tangga. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Kayan Hilir dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan peternakan ayam dan babi;
- b. Pengembangan kerajinan anyaman;
- c. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- e. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara;
- f. Pengembangan prasarana pariwisata;
- g. Penataan perumahan dan permukiman.

(5) Pengembangan Wilayah Kecamatan Pujungan

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Pujungan diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari pariwisata, pertanian dan perkebunan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Pujungan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pariwisata;
- b. Penataan tempat wisata khususnya ekowisata;
- c. Pengembangan pertanian;
- d. Pengembangan perkebunan;
- e. Pengembangan jalan dari dan menuju tempat wisata;
- f. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- g. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara;
- h. Penataan perumahan dan permukiman;
- i. Penataan pinggiran sungai.

(6) Pengembangan Wilayah Kecamatan Bahau Hulu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Bahau Hulu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari diarahkan pada



pengembangan perkebunan dan pariwisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Bahau Hulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan kopi dan hortikultura;
- b. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- c. Penyediaan air bersih, listrik, irigasi dan telekomunikasi;
- d. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat, sungai dan udara;
- e. Pengembangan prasarana ekowisata Laut Birai;
- f. Pengembangan konservasi;
- g. Penguatan tebing sungai;
- h. Penataan perumahan dan permukiman.

(7) Pengembangan Wilayah Kecamatan Mentarang Hulu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang Hulu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari diarahkan pada pengembangan perkebunan dan pariwisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang Hulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian;
- b. Pengembangan perkebunan;
- c. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- e. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi;
- f. Pengembangan prasarana wisata alam;
- g. Penataan perumahan dan permukiman.

(8) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perikanan, industri kecil, pariwisata dan peternakan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan budidaya perikanan dan karamba ex danau batubara;
- b. Pengembangan industri kecil dan kerajinan
- c. Pengembangan ekowisata;

- d. Pengembangan peternakan;



- e. Pengembangan jalan;
- f. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- g. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat
- h. Penataan wilayah ibukota kecamatan;
- i. Penataan perumahan dan permukiman.

(9) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Selatan

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perikanan, industri kecil, pariwisata dan peternakan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan budidaya perikanan dan karamba ex danau batubara;
- b. Pengembangan industri kecil dan kerajinan
- c. Pengembangan ekowisata;
- d. Pengembangan peternakan;
- e. Pengembangan jalan;
- f. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- g. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat
- h. Penataan wilayah ibukota kecamatan;
- i. Penataan perumahan dan permukiman.

(10) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perikanan, industri kecil, pariwisata dan peternakan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan budidaya perikanan dan karamba ex danau batubara;
- b. Pengembangan industri kecil dan kerajinan
- c. Pengembangan ekowisata;
- d. Pengembangan peternakan;
- e. Pengembangan jalan;
- f. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;



- g. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat
- h. Penataan wilayah ibukota kecamatan;
- i. Penataan perumahan dan permukiman.

(11) Pengembangan Wilayah Kecamatan Mentarang

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perkebunan, pertanian dan peternakan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan karet, sawit dan gaharu;
- b. Pengembangan peternakan burung walet;
- c. Pengembangan perikanan darat dan kerambah;
- d. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- e. Penyediaan air bersih, telekomunikasi dan listrik tenaga air dan tenaga surya di lima desa di Paking;
- f. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi antardesa dan antarkecamatan;
- g. Perlindungan mata air;
- h. Perlindungan daerah rawan bencana dan beresiko;
- i. Penataan perumahan dan permukiman.

(12) Pengembangan Wilayah Kecamatan Mentarang Hulu

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang Hulu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari pertanian, peternakan dan pariwisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mentarang Hulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian;
- b. Pengembangan perkebunan;
- c. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- e. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat dan Sungai;
- f. Pengembangan prasarana wisata alam;
- g. Penataan perumahan dan permukiman.



(13) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Utara

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Utara diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari pertanian dan perkebunan. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Utara dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan karet dan sawit;
- b. Pengembangan pertanian tanaman pangan;
- c. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- d. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- e. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat;
- f. Penataan perumahan dan permukiman.

(14) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Barat

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Barat diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perkebunan, pertanian dan pariwisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Barat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan kako, karet dan sawit;
- b. Pengembangan pertanian tanaman pangan padi;
- c. Penataan dan pengembangan arboretum KM 8,
- d. Penataan dan pengembangan wisata S. Setaban
- e. Penataan dan pengelolaan hutan pinus;
- f. Pengembangan jalan dari pusat sentra produksi ke pusat pemasaran;
- g. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat;
- h. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- i. Pengembangan perumahan dan permukiman;
- j. Pembangunan perumahan Korpri;

(15) Pengembangan Wilayah Kecamatan Malinau Kota

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Kota diarahkan pada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan pendapatan dari perdagangan, pariwisata dan jasa. Kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Malinau Kota dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan jalan;
- b. Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi;



- c. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi sungai, darat dan udara;
- d. Pengembangan seni, budaya serta kepemudaan dan olah raga;
- e. Penataan perumahan, penataan sanitasi lingkungan dan permukiman;
- f. Peningkatan bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

6.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Peningkatan pembangunan wilayah perbatasan diarahkan agar wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Kabupaten Malinau. Kebijakan pengembangan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

(1) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Serawak Malaysia

- a. Pengembangan kawasan ekonomi bilateral dengan membuka perdagangan formal antara Kabupaten Malinau (Kaltara–Indonesia) dan negara bagian Serawak, Malaysia;
- b. Pengembangan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dalam bidang sosial ekonomi antara Indonesia (Kabupaten Malinau–Kaltara) dan Malaysia (Negara Bagian Serawak);
- c. Pembukaan Pos Lintas Batas (PBL) bagi pelintas batas yang resmi atau diakui oleh kedua negara berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi Indonesia dan Malaysia.
- d. Pengembangan kerjasama dan kemitraan yang baik dalam meningkatkan pariwisata dalam rangka mendukung dan memperkenalkan tempat wisata dan kebudayaan masyarakat setempat.

(2) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan KTT

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan KTT;
- b. Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
- c. Penataan dan pengelolaan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengamanan air baku, pembangunan dan rehabilitasi waduk dan normalisasi sungai, serta rehabilitasi jaringan irigasi;



- d. Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Malinau-KTT dan pembangunan informasi tenaga kerja;
- e. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah dan pembangunan tugu batas;
- f. Penataan ruang dengan fokus koordinasi pengaturan fungsi kawasan pada batas kabupaten;
- g. Pengelolaan lingkungan hidup dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
- h. Pengembangan pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata terpadu;
- i. Peningkatan perhubungan dengan fokus pengaturan dan pengendalian pemanfaatan jalan dan penataan terminal serta trayek angkutan;
- j. Peningkatan perdagangan dan jasa dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan distribusi barang.

(3) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Mahakam Hulu

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
- c. Penataan dan pengelolaan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS dan perlindungan sumber daya air;
- d. Pengembangan ekonomi dengan fokus mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan di Kecamatan Sungai Boh;
- e. Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pengembangan perkebunan dan pengendalian tambang tradisional.
- f. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah dan pembangunan tugu batas;
- g. Pengembangan pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata terpadu;
- h. Peningkatan perhubungan dengan fokus peningkatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan penataan terminal serta trayek angkutan.



- i. Peningkatan perdagangan dan jasa dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan distribusi barang.

(4) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;
- b. Pengembangan transportasi regional dengan fokus kerjasama percepatan pembangunan jalan Malinau-Paking-Semamu-Long Midang.
- c. Pengembangan ekonomi dengan fokus mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan di Kecamatan Malinau Utara dan Mentarang Hulu;
- d. Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pengembangan kerjasama sektor perkebunan;
- e. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah dan pembangunan tugu batas;
- f. Pengembangan pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata terpadu;
- g. Peningkatan perhubungan dengan fokus peningkatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan penataan terminal serta trayek angkutan pada ruas jalan Malinau-Simenggaris;
- h. Peningkatan perdagangan dan jasa dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan distribusi barang;
- i. Penguatan pertahanan keamanan dengan fokus peningkatan kerjasama pengamanan lintas batas.

(5) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Timur

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Timur;
- b. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah.

(6) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan;



- b. Pengembangan transportasi regional dengan fokus kerjasama percepatan pembangunan jalan Malinau–Sekatak Buji–Tanjung Selor;
- c. Penataan dan pengelolaan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS dan perlindungan sumber daya air;
- d. Pengembangan ekonomi dengan fokus mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Malinau Selatan;
- e. Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pengembangan kerjasama sektor perkebunan;
- f. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah;
- g. Pengembangan pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata terpadu;
- h. Peningkatan perhubungan darat dengan fokus peningkatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan penataan terminal serta trayek angkutan pada ruas jalan Malinau–Bulungan.
- i. Peningkatan perhubungan sungai dengan fokus peningkatan intensitas dan kualitas layanan angkutan sungai;
- j. Peningkatan perdagangan dan jasa dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan distribusi barang.

(7) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Kertanegara

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kertanegara;
- b. Penataan dan pengelolaan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS dan perlindungan sumber daya air;
- c. Penanganan tenaga kerja kependudukan dan sosial dengan fokus pengendalian tambang tradisional;
- d. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah;
- e. Pengembangan pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata terpadu.



(8) Wilayah Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau

- a. Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Timur;
- b. Penetapan batas wilayah dengan fokus penegasan dan penetapan tapal batas wilayah;
- c. Penataan dan pengelolaan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS dan perlindungan sumber daya air.



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021, maka disusun perkiraan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perkiraan belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan bantuan kepada pemerintah desa dalam bentuk Dana Gerdema yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja langsung selama lima (5) tahun diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Perkiraan alokasi belanja bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun.

Pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021, jumlah organisasi perangkat daerah SKPD adalah 57 unit. Saat ini jumlah OPD berubah menjadi 53 unit sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016.



Tabel 7.1
Perubahan Struktur Organisasi
Pemerintah Kabupaten Malinau

NO	PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	PERANGKAT DAERAH BARU
1	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
a	Pendidikan	a	Pendidikan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1	Dinas Pendidikan
b	Kesehatan	b	Kesehatan
1	Dinas Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	RSUD	2	RSUD
3	BLUD	3	BLUD
c	Pekerjaan Umum	c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Dinas Pekerjaan Umum	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
d	Penataan Ruang		
2	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran		
e	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	d	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f	Sosial	e	Sosial
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
a	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
		b	Ketahanan Pangan
			Dinas Ketahanan Pangan



NO	PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	PERANGKAT DAERAH BARU
b	Lingkungan Hidup	c	Lingkungan Hidup
	Badan Lingkungan Hidup Daerah		Dinas Lingkungan Hidup
c	Kependudukan dan Catatan Sipil	d	Administasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d	Pemberdayaan Masyarakat Desa	e	Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
e	Perhubungan	f	Perhubungan
1	Dinas Perhubungan, Konunikasi dan Informatika	1	Dinas Perhubungan
f	Komunikasi dan Infomatika	g	Komunikasi dan Infomatika
1	Kantor Pusat Data Elektronik	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
g	Tenaga Kerja	h	Penanaman Modal
1	Kantor Pelayanan Terpadu	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		i	Kepemudaan dan Olah Raga
		1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
h	Kebudayaan	j	Kebudayaan
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
i	Perpustakaan dan Kearsipan	k	Perpustakaan dan Kearsipan
	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
		a	Kelautan dan Perikanan
		1	Dinas Perikanan



NO	PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	PERANGKAT DAERAH BARU
a	Pertanian	b	Pertanian
1	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	Dinas Pertanian
2	Dinas Perkebunan		
b	Kehutanan	c	Kehutanan
1	Dinas Kehutanan		
c	Energi dan Sumber Daya Mineral	d	Energi dan Sumber Daya Mineral
1	Dinas Pertambangan dan Energi		
d	Perindustrian dan Perdagangan	f	Perindustrian dan Perdagangan
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
a	Sekretariat Daerah	a	Sekretariat Daerah
1	Bagian Umum dan Aset	1	Bagian Umum
2	Bagian Tata Pemerintahan	2	Bagian Tata Pemerintahan
3	Bagian Humas dan Protokol	3	Bagian Humas dan Protokol
4	Bagian Penyusunan Program	4	Bagian Pembangunan
5	Bagian Ekonomi	5	Bagian Ekonomi
6	Bagian Hukum	6	Bagian Hukum
7	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	7	Bagian Organisasi
8	Bagian Sosial	8	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9	Bagian Pertanahan		
10	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	10	Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara
		11	Bagian Perlengkapan
11	Sekretariat DPRD	12	Sekretariat DPRD
12	Sekretariat KPU	13	Sekretariat KPU
13	Sekretariat Korpri	14	Sekretariat Korpri



NO	PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	PERANGKAT DAERAH BARU
14	Dinas Pendapatan Daerah		
b	Kecamatan	b	Kecamatan
1	Kecamatan Malinau Kota	1	Kecamatan Malinau Kota
2	Kecamatan Malinau Utara	2	Kecamatan Malinau Utara
3	Kecamatan Malinau Barat	3	Kecamatan Malinau Barat
4	Kecamatan Mentarang	4	Kecamatan Mentarang
5	Kecamatan Mentarang Hulu	5	Kecamatan Mentarang Hulu
6	Kecamatan Pujungan	6	Kecamatan Pujungan
7	Kecamatan Kayan Hilir	7	Kecamatan Kayan Hilir
8	Kecamatan Kayan Hulu	8	Kecamatan Kayan Hulu
9	Kecamatan Sungai Boh	9	Kecamatan Sungai Boh
10	Kecamatan Bahau Hulu	10	Kecamatan Bahau Hulu
11	Kecamatan Kayan Selatan	11	Kecamatan Kayan Selatan
12	Kecamatan Sungai Tubu	12	Kecamatan Sungai Tubu
13	Kecamatan Malinau Selatan	13	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
14	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	14	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
c	Pengawasan	c	Pengawasan
1	Inspektorat	1	Inspektorat
d	Pembangunan	d	Perencanaan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
d	Kuangan	d	Kuangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
e	Kepegawaian	e	Kepegawaian
14	Badan Kepegawaian Daerah	13	Badan Kepegawaian, Pendiidkan dan Pelatihan



Perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Malinau tersebut menyebabkan perubahan perkiraan alokasi belanja daerah dalam RPJMD 2016-2021. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan selama lima tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2017-2021
Kabupaten Malinau

KODE	KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	KAPASITAS RILL KEUANGAN	1.385.534.789.567,75	1.411.068.916.661,07	1.438.139.314.366,64	1.506.008.732.996,85	1.554.592.766.619,70
B	BELANJA	1.385.534.789.567,75	1.411.068.916.661,07	1.438.139.314.367	1.506.008.732.997	1.554.592.766.620
C	Belanja Tidak Langsung	722.821.432.128,53	791.439.310.250,32	846.283.751.298	847.005.607.066	849.397.159.428
1	Belanja Pegawai	437.886.519.765,00	485.479.171.465,32	508.885.186.907,67	509.902.957.281,49	510.922.763.196,05
2	Belanja Subsidi	6.036.814.177,00	3.973.874.400,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3	Belanja Hibah	16.821.604.703,53	29.181.210.785,00	23.317.689.570,00	19.367.311.321,00	20.284.055.081,24
4	Belanja Bantuan Sosial	1.447.787.400,00	2.049.731.600,00	2.500.000.000,00	1.849.882.769,00	2.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemda lainnya	260.628.706.083,00	270.318.724.000,00	304.580.874.820,00	304.885.455.694,82	305.190.341.150,52
6	Belanja Tidak Terduga		436.598.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
D	Belanja Langsung	662.713.357.439,22	619.629.606.410,75	591.855.563.068,97	659.003.125.930,54	705.195.607.191,89
1	Belanja Pegawai	93.881.369.981,00	113.227.457.091,00	103.492.187.747,00	114.693.494.493,93	118.971.561.838,55
2	Belanja Barang dan Jasa	239.675.136.316,45	323.626.925.677,00	306.710.003.192,00	275.965.577.261,87	277.345.405.148,17
3	Belanja Modal	329.156.851.141,77	182.775.223.642,75	181.653.372.129,97	268.344.054.174,75	308.878.640.205,17



Tabel 7.3
Realisasi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4		5
	URUSAN WAJIB				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			489.500,40	
	PENDIDIKAN				
	DINAS PENDIDIKAN				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	75%	2.370,94	Dinas Pendidikan
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	75	1.100,67	Dinas Pendidikan
	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	Angka partisipasi kasar (APK)PAUD	80%	244,38	Dinas Pendidikan
	<i>Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	Angka partisipasi kasar (APK)	80%	10.455,70	Dinas Pendidikan
	<i>Program Pendidikan Menengah</i>	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, SMK, MA)	80,21%	10.915,36	Dinas Pendidikan
	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	Persentase guru layak mengajar	74,21%	21.961,33	Dinas Pendidikan
	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,23%	446,22	Dinas Pendidikan



	Program Pendidikan Non-Formal	Menurunnya Buta Aksara Meningkatnya Warga Belajar Paket A, B dan C			Dinas Pendidikan
	KESEHATAN				
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Administrasi Perkantoran	Jumlah Dinas dan UPT yang tersedia jasa administrasi perkantorannya	75%	7.367,05	DKPP&KB
	Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Data yang dapat Dikases	0,00%	-	DKPP&KB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	113,93	DKPP&KB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pelayanan manajemen program dan SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	13.502,12	DKPP&KB
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk kesehatan masyarakat	100%	2.249,07	DKPP&KB
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	79,13%	5.645,86	DKPP&KB
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa dan Kecamatan sehat	62%	45,88	DKPP&KB
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	80%	717,50	DKPP&KB
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular	77%	185,99	DKPP&KB



	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	71%	200,25	DKPP&KB
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Ketersediaan Sarana Penunjangt di Faskes	100%	8.200,86	DKPP&KB
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kemitraaan peningkatan pelayanan kesehatan	76%	16.417,88	DKPP&KB
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Lansia yang dilayani	70%	43,09	DKPP&KB
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Jumlah TPM yang memenuhi syarat dan diperiksa	85%	37,58	DKPP&KB
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	angka Kematian ibu	87%	130,48	DKPP&KB
	RSUD MALINAU				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	75%	7.369,04	RSUD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	1.039,47	RSUD
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terlaksananya pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	100%	22.454,29	RSUD
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100%	265,97	RSUD



	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlaksananya kemitraan dalam pelayanan kesehatan	100%	2.378,67	RSUD
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (BLUD)	Terlaksananya pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	100%	-	BLUD
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN				
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	993,12	DPU-PR.PERKIM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	153,35	DPU-PR.PERKIM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan program untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	176,05	DPU-PR.PERKIM
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan dan jembatan yang terbangun	76%	184.794,93	DPU-PR.PERKIM
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah titik genangan air	38%	3.353,77	DPU-PR.PERKIM
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan Jalan dan Jembatan yang dapat diakses	0%	-	DPU-PR.PERKIM



	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase luas daerah yang terlayani irigasi	76%	91.297,78	DPU-PR.PERKIM
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum dan jaringan air limbah	73,87%	13.273,19	DPU-PR.PERKIM
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan kawasan pemukiman masyarakat	63%	12.717,31	DPU-PR.PERKIM
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Kab. Malinau dan kawasan hutan Lindung	100%	142,30	DPU-PR.PERKIM
	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Persentase pembangunan Sanitasi Pemukiman	63%	2.601,68	DPU-PR.PERKIM
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	63%	13.299,39	DPU-PR.PERKIM
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	175,36	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas sumber daya aparatur	100%	139,17	Kesbangpol
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian kasus tindak kriminal	75%	152,53	Kesbangpol



	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	75%	97,60	Kesbangpol
	<i>Program pendidikan politik masyarakat</i>	Persentase pembinaan karakter masyarakat	100%	747,73	Kesbangpol
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50,08	Kesbangpol
	<i>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</i>				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar	70%	4.845,09	Satpol-PP
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	749,44	Satpol-PP
	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	Tingkat kedisiplinan aparat	100%	293,00	Satpol-PP
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Tingkat kapasitas sumber daya aparatur	100%	126,47	Satpol-PP
	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	14.158,13	Satpol-PP
	<i>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</i>	Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	100%	224,57	Satpol-PP
	<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>				
	<i>Program pengembangan wawasan Kebangsaan</i>	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan	100%	233,25	Bag. Tapem



	KECAMATAN MENTARANG				
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang aktif dalam bela negara	100%	50,00	Kec.Mentarang
	SOSIAL				
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka Waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	119,81	BPBD
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	218,33	BPBD
	Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Jangka waktu mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	75%	419,08	BPBD
	Pengadaan kebutuhan Tanggap darurat	Jangka waktu penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan tanggap darurat Penanggulangan Bencana	100%	7.481,77	BPBD
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	100%	188,28	Bag. Kesejahteraan Rakyat
	Sosial				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	42,68	DP3AS



	Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	0%	-	DP3AS
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial	100%	130,90	DP3AS
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Presentase Tingkat Kesejahteraan Para Penyandang cacat dan taruna	100%	74,94	DP3AS
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Presentase Pembinaan Panti Asuhan	100%	47,63	DP3AS
	Program Keluarga Sejahtera			72,11	DP3AS
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			85.614,61	
	TENAGA KERJA				
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	29,83	Dinas PMPTSP&TG
	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Persentase perlindungan & Pengembangan Lembaga TK	100%	175,78	Dinas PMPTSP&TG
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka Waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	216,02	DP3AS
	KECAMATAN MALINAU KOTA				



	<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</i>	Presentasipartisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah	100%	49,96	Kec. Malkot
	KECAMATAN MALINAU UTARA				
	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	59,73	Kec. Maltara
	KECAMATAN MALINAU BARAT				
	<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	30,00	Kec. Malbar
	KECAMATAN MENTARANG HULU				
	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Presentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah	100%	27,00	Kec. Mentarang Hulu
	KECAMATAN MALINAU SELATAN				
	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	29,92	Kec. Malsel
	KECAMATAN PUJUNGAN				
	<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	49,44	Kec. Pujungan
	KECAMATAN KAYAN HULU				
	<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	30,00	Kec. Kayan Hulu
	KECAMATAN BAHAU HULU				
	<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	20,00	Kec. Bahau Hulu
	KECAMATAN KAYAN SELATAN				



	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	25,40	Kec. Kayan Selatan
	KECAMATAN SUNGAI TUBU				
	<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	15,00	Kec. Sei Tubu
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR				
	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	36,22	Kec. Masehi
	PANGAN				
	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA)</i>	Meningkatnya Ketahanan Pangan	88%	1.475,88	Bagian Ekonomi
	PERTANAHAN				
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	<i>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	Persentase Tanah masyarakat yang memiliki sertifikat	76,00%	501,23	DPU-PR.PERKIM
	<i>Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum</i>	Persentase Kepemilikan Tanah untuk kepentingan masyarakat	76,00%	-	DPU-PR.PERKIM
	LINGKUNGAN HIDUP				
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				



	Program Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	Jumlah Infrastruktur Bangunan yang diakses	100%	40.127,30	DPU-PR.PERKIM
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aktivitas aparatur yang kondusif	75%	53,95	Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengembangan kinerja penegelolaan persampahan		13.299,39	Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		825,77	Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100%	252,85	Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	25%	2,72	Lingkungan Hidup
	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	15%	861,63	Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran	75%	228,16	Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				



	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	562,80	Dukcapil
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	33,85	Dukcapil
	<i>Program Penataan Administrasi Kependudukan</i>	Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK)	60%	1.040,20	Dukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	1.206,01	PMD
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	42,11	PMD
	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	Tingkat partisipasi pembinaan lembaga masyarakat		985,31	PMD
	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	Tingkat partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat	85%	1.037,45	PMD
	<i>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</i>	Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa	100%	6.406,22	PMD



	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase peran perempuan dalam pembangunan pedesaan	85%	1.969,94	PMD
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Tingkat perbaikan gizi masyarakat	100%	15,30	PMD
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tingkat kemampuan penguasaan teknologi industri	100%	127,56	PMD
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	849,52	Bag. Tapem
	KECAMATAN MALINAU BARAT				
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya Program Pengembangan dan Lembaga ekonomi Pedesaan	0%	-	Kec. Malbar
	KECAMATAN PUJUNGAN				
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga pedesaan yang aktif	100%	41,00	Kec. Pujungan
	KECAMATAN KAYAN HILIR				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	100%	20,00	Kec. Kayan Hilir
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU				



	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Presentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah	70%	-	Kec. Masel
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			379,90	Kec. Masel
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			40,00	Kec. Masel
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			29,92	Kec. Masel
	KECAMATAN SUNGAI TUBU				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan			Kec. Sei Tubu
	PERHUBUNGAN				
	DINAS PERHUBUNGAN				
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat pelayanan transportasi antar moda	35%	2.861,01	Dishub
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tingkat kualitas sarana dan prasarana perhubungan	50%	43,50	Dishub
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat Kepenuhan (load factor) penumpang angkutan umum perkotaan Kabupaten Malinau	35%	110,84	Dishub
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tingkat pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	50%	909,17	Dishub
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tingkat pengendalian dan pengamanan lalu lintas	50%	43,30	Dishub



	Program Peningkatan Pelayanan Udara Daerah Terisolir	Tingkat pelayanan angkutan udara	50%	594,92	Dishub
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		2.954,32	Dishub
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Peningkatan Pelayanan Udara Daerah Terisolir	Persentase akses Transportasi udara daerah perbatasan dan pedalaman	100%	69,54	Bagian Ekonomi
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	70,00	Diskominfo
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi	100%	2.524,82	Diskominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase tingkat Pengelolaan Home Industri	100%	-	Dinas Perindag
	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Produktifitas dan investasi UMKM	100%	98,55	Dinas Perindag
	SEKRETARIAT DAERAH				



	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>	Persentase tingkat kerja sama investasi	100%	49,99	Bagian Ekonomi
	PENANAMAN MODAL				
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>	Persentase tingkat kerja sama investasi	100%	49,99	Dinas PMPTSP&TG
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka Waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	50,00	Dinas PMPTSP&TG
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	200,00	Dinas PMPTSP&TG
	<i>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</i>	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah	100%	60,00	Dinas PMPTSP&TG
	<i>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</i>	Tingkat pelayanan perijinan		116,81	Dinas PMPTSP&TG
	SEKRETARIAT DAERAH				
	<i>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</i>	Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	100%	60,00	Bagian Ekonomi
	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD</i>	Jumlah pelaku usaha dan BUMD yang terdata	100%	40,39	Bagian Ekonomi
	STATISTIK				
	SEKRETARIAT DAERAH				



	<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah dalam pembangunan	100%	93,50	Bagian Ekonomi
	KEBUDAYAAN				
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	546,13	Disbudpar
	<i>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</i>	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya	65%	70,11	Disbudpar
	<i>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</i>	Persentase pusat - pusat seni yang terbangun	60%	53,23	Disbudpar
	PERPUSTAKAAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	<i>Program pemasyarakatan perpustakaan</i>	Tingkat pemasyarakatan perpustakaan	100%	118,00	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	<i>Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka</i>	Tingkat pengembangan dan pelestarian bahan pustaka	100%	13,18	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	<i>Program penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi berbasis IT Perpustakaan</i>	Tingkat penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi	100	28,36	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				



	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran	100%	399,54	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	<i>Program Pemindahan Arsip dari Instansi Pemerintah (Sekretariat, Dinas, dan Lembaga Teknis)</i>	Tingkat penatakelolaan arsip daerah	100%	60,38	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	<i>Program pengolahan arsip in aktif dengan menggunakan media komputer</i>	Tingkat pengelolaan arsip daerah	100%	96,40	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	<i>Program pembinaan ke instansi pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten Malinau</i>	Tingkat pembinaan Kearsipan daerah tingkat nasional, provinsi dan kab malinau	100%	18,36	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PILIHAN			33.494,04	
	DINAS PERIKANAN				
	<i>Program Pengembangan Kawasan Budidaya/Air Laut, Payau dan Air Tawar</i>	Persentase Produktifitas Hasil Ternak		85,19	Dinas Perikanan
	<i>Program peningkatan SDM Perikanan dan Pengawasan</i>	Jumlah SDM perikanan dan pengawasan	100%	175,69	Dinas Perikanan
	<i>Program penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan</i>	cakupan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	75%	19.509,13	Dinas Perikanan
	PARIWISATA				
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	<i>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	Tingkat pemasaran pariwisata	100%	324,24	Disbudpar
	<i>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	100%	142,33	Disbudpar



PERTANIAN					
DINAS PERTANIAN					
	<i>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Meningkatnya Kesejahteraan petani	100%	274,86	Dinas Pertanian
	<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)</i>	Persentase Produktivitas Pangan	100%	5.093,57	Dinas Pertanian
	<i>Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</i>	Peningkatan Penyuluhan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100%	245,54	Dinas Pertanian
	<i>Program peningkatan produksi hasil peternakan</i>	Persentase Produktifitas Hasil Ternak		925,86	Dinas Pertanian
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran	100%	490,26	Dinas Pertanian
	<i>Program Pengembangan SDM Pertanian</i>	Persentase Jumlah Petani yang terlatih	0%	937,19	Dinas Pertanian
	<i>Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian</i>	Persentase Produktifitas Hasil Pertanian	0%	-	Dinas Pertanian
	<i>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</i>			113,92	Dinas Pertanian
	<i>Program Peningkatan Sumber Daya Penyuluh</i>			1.668,76	Dinas Pertanian
	<i>Program Peningkatan Mutu Layanan Sekolah SPP Negeri Malinau</i>			251,67	
	<i>Program Pemberdayaan Petani/Masyarakat</i>			86,56	
	<i>Program penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan</i>			113,59	Dinas Pertanian



	SEKRETARIAT DAERAH				
	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Migas</i>	Jumlah pelaku usaha Migas yang terbina	100%	281,56	Bagian Ekonomi
	PERDAGANGAN				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan</i>	Meningkatnya Pelayanan Perdagangan	100%	1.717,47	Dinas Perindag
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	80%	610,40	Dinas Perindag
	<i>Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan</i>	Persentase Kelayakan Barang Konsumsi	100%	229,33	Dinas Perindag
	PERINDUSTRIAN				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	<i>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>	Persentase Home Industri yang berkembang	100%	216,92	Dinas Perindag
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			147.988,55	
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	50,00	Bagian Ekonomi



	<i>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Persentase Peraturan Daerah yang di Tetapkan	100%	779,96	Bag. Hukum
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	84%	112,36	Bag. Humas dan Protokol
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	26,25	Bag. Humas dan Protokol
	<i>Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</i>	Persentase Pelayanan Kepala Daerah	100%	117,45	Bag. Humas dan Protokol
	<i>Program kerjasama informasi dan media massa</i>	Tingkat Kerjasama Informasi dengan media massa	100%	1.575,03	Bag. Humas dan Protokol
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	160,13	Bag. Kesejahteraan Rakyat
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</i>	Jumlah Aparatur yang terdidik dan Terlatih	100%	166,39	Bag. Kesejahteraan Rakyat
	<i>Program Fasilitas Perjalanan Ibadah</i>	Tersedianya Fasilitas dan Administrasi peserta perjalanan Ibadah Religi	100%	141,909	Bagian. Kesejahteraan Rakyat
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	196,43	Bag. Organisasi
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	75,00	Bag. Organisasi



	Program peningkatan disiplin aparat	Tingkat kedisiplinan aparat	100%	139,42	Bag. Organisasi
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	435,50	Bag. Organisasi
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur yang terdidik dan Terlatih	100%	97,78	Bag. Organisasi
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Capaian Laporan Keuangan daerah	100%	61,35	Bag. Organisasi
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang di Tetapkan	100%	143,07	Bag. Organisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	935,65	Bag. Pembangunan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	85%	239,81	Bag. Pembangunan
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan		217,79	Bag. Umum
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	673,56	Bag. Pembangunan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		410,98	Bag. Pengelola Perbatasan Negara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		160,44	Bag. Pengelola Perbatasan Negara



	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	32,65	Bag. Tapem
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	626,40	Bag. Tapem
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</i>	Jumlah Aparatur yang terdidik dan Terlatih	100%	372,11	Bag. Tapem
	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	97,93	Bag. Tapem
	<i>Program Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	227,96	Bag. Tapem
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	10.795,56	Bag. Umum
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	10.973,40	Bag. Umum
	<i>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</i>				
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	8.821,32	Sekwan
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	1.199,10	Sekwan



	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas sumberdaya aparat	100%	386,83	Sekwan
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat kapasitas lembaga perwakilan daerah	100%	16.854,93	Sekwan
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media massa	Tingkat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media massa	100%	-	Sekwan
	Program kerjasama informasi dan media massa	Tingkat Kerjasama Informasi dengan media massa	0%	368,40	Sekwan
	SEKRETARIAT KORPRI				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	296,31	Set. Korpri
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparat	100%	56,08	Set. Korpri
	KECAMATAN MALINAU KOTA				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintah	70%	336,25	Kec. Malkot
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	70%	4,00	Kec. Malkot



	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Presentase pelayanan Terpadu satu pintu pemerintah kepada masyarakat pemerintah	100%	33,20	Kec. Malkot
	KECAMATAN MALINAU BARAT				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	375,38	Kec. Malbar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	10,00	Kec. Malbar
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran Aparatur dalam melaksanakan tugas	80%	20,00	Kec. Malbar
	KECAMATAN MENTARANG				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	379,92	Kec.Mentarang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	13,95	Kec.Mentarang
	KECAMATAN KAYAN HULU				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	461,13	Kec. Kayan Hulu
	KECAMATAN SUNGAI TUBU				



	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	472,80	Kec. Sei Tubu
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	80%	7,20	Kec. Sei Tubu
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	382,92	Kec. Masehi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			Kec. Masehi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	21,00	Kec. Masehi
	KECAMATAN MALINAU UTARA				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	319,65	Kec. Maltara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	66,50	Kec. Maltara
	KECAMATAN MALINAU SELATAN				



	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	379,90	Kec. Malsel
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	40,00	Kec. Malsel
	KECAMATAN MENTARANG HULU				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintah	75%	276,11	Kec. Mentarang Hulu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	75%	196,78	Kec. Mentarang Hulu
	KECAMATAN PUJUNGAN				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	307,66	Kec. Pujungan
	KECAMATAN KAYAN HILIR				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	472,73	Kec. Kayan Hilir
	KECAMATAN SEI BOH				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	500,00	Kec. Sungai Boh
	KECAMATAN KAYAN SELATAN				



	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	474,54	Kec. Kayan Selatan
	PERWAKILAN KECAMATAN LONG SULE				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	249,02	Perwakilan. Kec. Long Sule
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintah	75%	355,58	Kec. Masehu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	75%	123,97	Kec. Masehu
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			20,00	Kec. Masehu
	KECAMATAN BAHAU HULU				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	465,03	Kec. Bahau Hulu
	PENGAWASAN				
	INSPEKTORAT				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	664,74	Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	75%	1.291,15	Inspektorat



	<i>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i>	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100%	169,44	Inspektorat
	PERENCANAAN				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG				
	Program Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah				Bappeda & Litbang
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	950,08	Bappeda & Litbang
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	68,43	Bappeda & Litbang
	<i>Program pengembangan data/informasi daerah</i>	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	70%	449,77	Bappeda & Litbang
	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan	70,00%	1.629,19	Bappeda & Litbang
	<i>Program perencanaan pembangunan ekonomi</i>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	70,00%	38,25	Bappeda & Litbang
	<i>Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya</i>	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial dan budaya	70,00%	539,06	Bappeda & Litbang
	<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>	Tingkat partisipasi dalam kerjasama pembangunan daerah	70%	143,87	Bappeda & Litbang



	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase desa yang mempunyai rencana detail tata ruang	40%	219,12	Bappeda & Litbang
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	70%	943,83	Bappeda & Litbang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang	40%	48,89	Bappeda & Litbang
	KEUANGAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	217,80	Bag. Umum
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	2.252,81	BPKD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.524,66	BPKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas sumberdaya aparat	100%	2.536,81	BPKD
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	55.830,74	BPKD
	KEPEGAWAIAN				
	BADAN KEPEGAWAIAAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				



	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	417,24	BKPP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	85%	64,50	BKPP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparat	85%	386,86	BKPP
	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase kelancaran pindah/purna tugas PNS	100%	469,11	BKPP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur	100%	10.491,62	BKPP
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi		179,43	BKPP
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	81%	1.670,70	BKPP
TOTAL				756.597,60	



Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Wajib														
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		493.418,22	378.867,84	395.306,19	449.345,12	489.668,36	2.206.605,74							
	Pendidikan														
	DINAS PENDIDIKAN														
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.088,59	100%	1.859,18	100%	1.486,89	100%	1.460,10	100%	1.500,00	100%	8.394,76	Dinas Pendidikan
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			85%	36,53	90%	40,00	95%	41,48	100%	43,01	100%	161,02	Dinas Pendidikan
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			75%	99,28	80%	127,79	90%	134,81	95%	139,80	95%	501,68	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	82%	436,08	84%	586,10	85%	707,97	88%	752,40	90%	1.000,00	90%	3.482,54	Dinas Pendidikan
	<i>Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	APM SD/MI	82%	34.229,00	84%	37.746,94	86%	50.111,24	88%	60.928,53	90%	66.243,19	90%	249.258,90	Dinas Pendidikan
	<i>Program Pendidikan Menengah</i>	Persentase kinerja pemerataan dan pemerluasan pendidikan menengah (SMA, SMK, MA)	81,36%	6.308,41		-		-					81,36%	6.308,41	Dinas Pendidikan



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pendidikan Non-Formal	Menurunnya buta aksara meningkatnya warga belajar paket A, B, dan C							80,00%	2.000,00	85,00%	2.074,00	85%	4.074,00	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	75,08%	18.291,10	77,04%	4.626,95	78,00%	3.049,26	80,00%	9.000,00	81,00%	10.000,00	81%	44.967,30	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,47%	1.301,19	74,71%	15.180,65	76,00%	21.586,18	80,00%	15.555,00	85,00%	16.000,00	85%	69.623,01	Dinas Pendidikan
		Non Program (Dana BOS)	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,47%	15.508,76										15.508,76	Dinas Pendidikan
		Kesehatan														
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
		Program Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.358,61	100%	8.156,32	100%	8.277,60	95%	10.370,00	100%	10.754,00	100%	45.916,53	DKPP&KB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	3.722,61	85%	90,00	90%	100,00	95%	97,00	100%	100,00	100%	4.109,61	DKPP&KB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	13.434,61	100%	20.088,56	100%	16.936,15	100%	16.643,00	100%	17.259,00	100%	84.361,32	DKPP&KB



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-	85%	40,00			95%	43,00	100%	45,00	100%	128,00	DKPP&KB
		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data yang dapat diakses			-	82,48%	205,00	84,00%	350,00	86,00%	220,00	87,00%	228,14	87%	1.003,14	DKPP&KB
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	100%	3.871,91	100%		6.820,98	100%	7.836,70	100%	5.500,00	100%	6.000,00	100%	30.029,59	DKPP&KB
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	80.21%	11.564,96	82,00%		28.636,09	82,15%	19.811,30	84,21%	13.582,00	86,15%	10.086,00	86%	83.680,35	DKPP&KB
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat dan Makanan yang diawasi								72%	1.037,00	75%	1.075,37	75%	2.112,37	DKPP&KB
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa sehat	64%	181,99	67%		50,00	69%	690,07	71%	207,00	73%	215,00	73%	1.344,06	DKPP&KB
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan					-		3.242,00	99%	4.148,00	100%	4.301,00	100%	11.691,00	DKPP&KB
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kecamatan Gizi			-	90%	1.175,00	95%	685,60	100%	642,94	100%	1.000,00	100%	3.503,54	DKPP&KB



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	80%	91,47	82%	1.414,00	84%	1.180,00	86%	1.556,00	88%	1.613,00	88%	5.854,47	DKPP&KB
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Fasilitas kesehatan sesuai standar	74%	681,89	78%	2.250,00		3.310,00	86%	2.300,00	90%	2.500,00	90%	11.041,89	DKPP&KB
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase ketersediaan sarana penunjang di Puskesmas/ Pustu	100%	9.622,14	100%	2.089,83	100%	19.690,03	100%	8.000,00	100%	8.296,00	100%	47.698,00	DKPP&KB
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana Penunjang di Rumas Sakit	2 unit	4.472,37	2 unit	528,03	2 unit	670,86	2 unit	6.015,00	2 unit	7.000,00	2 unit	18.686,26	DKPP&KB
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kepersertaan JKN	80%	10.907,33	84%	373,67	88%	15.025,14	92%	15.581,00	96%	18.790,00	96%	60.677,15	DKPP&KB
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Anak Balita yang dilayani	24	52,49	24	120,00			24	311,00	24	323,00	24	806,49	DKPP&KB
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Presentase Lansia yang terlayani	-	-	-				83%	207,00	85%	215,00	85%	422,00	DKPP&KB
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TPM yang memenuhi syarat dan diperiksa	86%	31,83		-			90%	104,00	93%	108,00	93%	243,83	DKPP&KB



		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian ibu	90%	165,31	95%	2.533,38	671,00	97%	2.724,00	98%	2.825,00	98%	8.918,69	DKPP&KB	
		Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih		-		-		85%	5.185,00	90%	5.200,00	90%	10.385,00	DKPP&KB	
		Program Keluarga Berencana	Persentase akseptor KB	65%	62,98	67%	2.458,19		71%	2.643,00	72%	2.741,00	72%	7.905,17	DKPP&KB	
		Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan yang berkualitas sebagai rumah sakit rujukan	90%	56,00					0		-	90%	56,00	DKPP&KB	
		Non Program (Dana JKN)	Persentase kepesertaan JKN	75%	3.678,87									3.678,87	DKPP&KB	
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Masyarakat yang mengikuti Pelayanan KB/KR					72%	3.738,07					3.738,07	DKPP&KB	
		RSUD MALINAU										-	-	-		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.046,89	100%	7.737,64	100%	6.293,34	100%	6.492,53	100%	6.600,00	100%	32.170,41	RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		-		-		95%	300,00	100%	400,00	100%	700,00	RSUD	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-				100%	173,56	100%	182,23	100%	355,79	RSUD
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit			-				95%	2.000,00	95%	2.500,00	95%	4.500,00	RSUD
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Promosi Layanan kesehatan Rumah Sakit			-				100%	100,00	100%	100,00	100%	200,00	RSUD
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana aparatur	85%	5.677,68	85%	8.517,01	85%	772,08	85%	2.500,00	85%	2.800,00	85%	20.266,77	RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang terpelihara			-				100%	950,00	100%	1.100,00	100%	2.050,00	RSUD
		Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	Jumlah kerjasama layanan kesehatan dengan Rumah Sakit	100%	1.234,51	100%	1.846,42	100%	1.152,00	100%	1.350,00	100%	1.350,00	100%	6.932,93	RSUD
		Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	Presentase Tingkat Standar Layanan di Rumah Sakit							100%	1.000,00	100%	1.017,11	100%	2.017,11	RSUD
		Program Peningkatan Profesional SDM	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi secara profesional sesuai bidangnya							85%	1.000,00	85%	1.200,00	85%	2.200,00	RSUD
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (BLUD)	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan dan layanan sarana aparatur	100%	27.493,43	100%	30.426,72	100%	32.488,00	100%	33.000,00	100%	35.000,00	100%	158.408,15	BLUD



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.531,07	100%	4.750,83	100%	6.719,41	100%	4.148,00	100%	4.301,48	100%	23.450,79	DPU-PR.PERKIM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	50%	948,82	70%	463,70	80%	1.669,76	90%	2.731,20	100%	2.220,00	100%	8.033,48	DPU-PR.PERKIM
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	-	9%	36,75	59%	61,63	21%	90,00	12%	50,00	12%	238,38	DPU-PR.PERKIM	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	60%	230,00	70%	300,00	80%	130,00	100%	130,00	100%	790,00	DPU-PR.PERKIM	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang terbangun	27,25	155.171,31	15,22	76.664,30	16,44	65.908,68	19,23	79.045,33	21,85	81.524,89	2185%	458.314,51	DPU-PR.PERKIM
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jumlah genangan air yang tertangani	100%	1.585,82		224,74		1.100,00				100%	2.910,56	DPU-PR.PERKIM	
		Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan dan jembatan yang terpelihara			24%	1.885,00	24%	2.500,00	24%	2.000,00	28%	2.300,00	28%	8.685,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jmlh jaringan jalan dan jembatan yang dapat diakses			-	-			33%	600,00	33%	600,00	33%	1.200,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Terhubungnya kembali akses barang atau jasa yang terputus akibat bencana alam							31%	4.000,00	31%	4.000,00	31%	8.000,00	DPU-PR.PERKIM



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan yang disediakan	-	100%	8.525,91		13.279,26				100%	21.805,17	DPU-PR.PERKIM		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase luas daerah yang terlayani irigasi	78%	53.870,15	12%	20.338,18	15%	8.437,62	21,00%	33.089,00	16,00%	25.400,00	16%	141.134,95	DPU-PR.PERKIM
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	3,40%	1.144,06	19,60%	7.986,77		6.958,96		2.785,49	26,02%	10.400,00	26%	29.275,28	DPU-PR.PERKIM
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan pemukiman masyarakat yang dikembangkan	34%	31.544,17	27%	25.154,97	18%	32.196,61	10%	10.987,06	11%	12.945,00	11%	112.827,82	DPU-PR.PERKIM
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kecamatan wilayah perkotaan yang mempunyai rencana detail tata ruang	1%	212,02	8%	1.100,00	41%	1.224,06	28%	3.825,00	22%	3.025,00	22%	9.386,08	DPU-PR.PERKIM
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase ruang Perkotaan dan pedesaan yang dimanfaatkan			16%	1.200,00			29%	2.200,00	27%	2.100,00	27%	5.500,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Kab. Malinau dan kawasan hutan Lindung							23%	490,00	34%	725,00	34%	1.215,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Persentase permukiman yang memiliki sanitasi	31%	6.874,46	42%	9.554,10		4.806,17	18%	4.000,00		-	18%	25.234,73	DPU-PR.PERKIM
		Program pengembangan kinerja pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum	Persentase taman perkotaan dan pemakaman umum yang dikelola	16%	3.441,22	11%	2.983,34	24%	5.076,96	25%	5.889,51	26%	5.889,51	26%	23.280,54	DPU-PR.PERKIM
		Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku	Persentase penduduk berakses air Bersih									63,39	6000,00	63,39	6.000,00	DPU-PR.PERKIM
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi dengan baik									100%	3.000,00	100%	3.000,00	DPU-PR.PERKIM



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN														
	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Persentase perumahan layak huni	-	-	-	-	-	30,65	19.000,00	50,00	31.000,00	50,00	50.000,00	DPU-PR.PERKIM	
	<i>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</i>	Persentase Ketersediaan Areal Pemakam Umum	-	-	-	-	-	37,00	550,00	37,00	550,00	37,00	1.100,00	DPU-PR.PERKIM	
	<i>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	Persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola	-	-	-	-	-	22,00	550,00	22,00	550,00	22,00	1.100,00	DPU-PR.PERKIM	
	<i>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</i>	Persentase kawasan yang memiliki PJU yang berfungsi dengan baik	56%	20.766,41	14%	5.642,71	9%	880,24	8%	2.910,00	13%	5.010,00	13%	35.209,36	DPU-PR.PERKIM
	Pertanahan														
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN														
	<i>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	Persentase luas lahan milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	-	-	8%	500,00	28%	500,00	28,00%	1.200,00	35%	1.400,00	35%	3.600,00	DPU-PR.PERKIM
	<i>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</i>	Persentase Kasus Konflik Pertanahan yang terselesaikan	-	-	-	-	-	33%	300,00	33%	300,00	33%	600,00	DPU-PR.PERKIM	
	<i>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</i>	Persentase Sistem Informasi Tanah yang dapat diakses	-	-	-	-	-	33%	200,00	33%	200,00	33%	400,00	DPU-PR.PERKIM	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Persentase Kepemilikan Tanah untuk kepentingan umum	10,00%	560,55	21,00%	1.180,00			23,00%	1.397,98	24%	1.449,70	24%	4.588,23	DPU-PR.PERKIM
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	214,09	85%	482,71	86%	250,00	87%	207,40	88%	215,07	88%	1.369,26	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	61,72	-	100%	55,00	-	-	-	100%	116,72	100%	116,72	Kesbangpol
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penanganan konflik dan gejolak masyarakat	-	-	-	-	-	100%	103,70	100%	107,54	100%	211,24	Kesbangpol	
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian kasus tindak kriminal	80%	419,02	85%	100,00	86%	140,00	87%	155,55	88%	161,31	88%	975,88	Kesbangpol
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	80%	107,05	-	100%	-	87%	259,25	90%	268,84	90%	635,15	Kesbangpol	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat	-	-	-	-	-	83%	259,25	85%	268,84	85%	528,09	Kesbangpol	
		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM, ORMAS, OKP, dan Partai Politik	100%	112,46	100%	1.024,67	100%	750,00	100%	680,00	100%	700,00	100%	3.267,12	Kesbangpol



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	17,25		-						100%	17,25	Kesbangpol	
		<i>Program Ketahanan ekonomi, Sosial, budaya dan ormas</i>	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki kompetensi bidangnya	100%	79,91		176,02						100%	255,94	Kesbangpol	
		<i>Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Persentase Pembinaan Ormas					100%	139,39					139,39	Kesbangpol	
SEKRETARIAT DAERAH																
		<i>Program pengembangan wawasan Kebangsaan</i>	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	593,50	100%	827,52		260,00				100%	1.681,02	Bag. Tapem	
		<i>Program pengembangan wawasan Kebangsaan</i>	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		-	100%	25,00	100%	50,00				100%	75,00	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
KECAMATAN MALINAU SELATAN																
		<i>Program pengembangan wawasan Kebangsaan</i>	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		-	100%	19,28		-				100%	19,28	Kec. Malsel	
KECAMATAN SUNGAI BOH																
		<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	80%	26,85	85%	10,00						85%	36,85	Kec. Sungai Boh	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.158,51	100%	5.652,87	100%	5.353,56	100%	6.519,00	100%	9.020,00	100%	31.703,94	Satpol-PP



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur						200,00	100%	2.380,00	100%	2.430,00	100%	5.010,00	Satpol-PP
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur				169,30			100%	313,65	100%	1.372,65	100%	1.855,60	Satpol-PP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				-			100%	625,00	100%	375,00	100%	1.000,00	Satpol-PP
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio petugas satpol dan linmas	100%	16.552,62	87%	15.099,92	100%	15.100,75	100%	17.625,00	100%	17.575,00	100%	81.953,30	Satpol-PP
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani	100%	76,45	100%	80,00	100%	389,80	100%	450,00	100%	450,00	100%	1.446,25	Satpol-PP
		KECAMATAN PUJUNGAN														
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	100%	16,38		-		-					100%	16,38	Kec.Pujungan
		Sosial														
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	395,64	100%	172,75	100%	255,00	100%	235,00	100%	235,00	100%	1.293,40	BPBD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur	100%	26,86		-							100%	26,86	BPBD
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase sarana dan prasarana posko bencana yang disediakan	100%	196,52		-	100%						100%	196,52	BPBD



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persentase desa tangguh bencana	80%	420,48	85%	334,78	90%	10,00	95%	250,00	100%	300,00	100%	1.315,26	BPBD
		Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi					100%		100%	350,00	100%	200,000	100%	550,00	BPBD
		Pengadaan Kebutuhan Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan					100%	17,47						17,47	BPBD
		Program Tanggap Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi					100%	266,60						266,60	BPBD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL																
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	16,56	100%	170,00		170,00	100%	182,81	100%	189,58	100%	728,95	DP3AS
		Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	108,74	100%	20,00							100%	128,74	DP3AS
		Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	549,76	100%	360,00		250,00	100%	387,13	100%	401,46	100%	1.948,35	DP3AS
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Koordinasi dan Monev Bidang Rehabilitasi Kesra	100%	17,55		-				389,46		403,64	100%	810,65	Bag. Kesejahteraan Rakyat
KECAMATAN PUJUNGAN																
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	27,26	100%	29,24				-		-	100%	56,50	Kec. Pujungan



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			38.597,88		58.301,86		52.041,11		53.120,62		52.511,79		254.573,26	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	149,99	100%	185,84	100%	406,04	100%	191,85	100%	198,94	100%	1.132,66	DP3AS
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	85%	50,06	90%	50,00	100%	50,00	100%	150,06	DP3AS
	Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak yang dihasilkan				-	80%		83%	155,55	85%	161,31	85%	316,86	DP3AS
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase organisasi perempuan yang dibina	75,00%	274,69	88%	40,00	88,00%	30,00	89%	103,70	90%	107,54	90%	555,93	DP3AS
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	-	-	2%	20,00	2%		2%	21,51	2%	22,30	2%	63,81	DP3AS
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	32,22		-			100%	300,00	100%	350,00	100%	682,22	DP3AS



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

KECAMATAN MALINAU KOTA													-	-
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	26,61	100%	18,80						100%	45,41	Kec. Malkot
KECAMATAN MENTARANG													-	-
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	50,00	100%	10,00						100%	60,00	Kec. Mentarang
KECAMATAN MALINAU UTARA													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	20,91	100%	20,00						100%	40,91	Kec. Maltara
KECAMATAN MALINAU BARAT													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	50,00	100%	15,00						100%	65,00	Kec. Malbar
KECAMATAN MENTARANG HULU													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	27,00	-	-						100%	27,00	Kec. Mentarang Hulu
KECAMATAN PUJUNGAN													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	46,40	100%	48,18						100%	94,58	Kec. Pujungan
KECAMATAN KAYAN HULU													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	26,97	100%	20,00						100%	46,97	Kec. Kayan Hulu
KECAMATAN SUNGAI BOH													-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	25,00	100%	20,00						100%	45,00	Kec. Sungai Boh



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

KECAMATAN BAHAU HULU																
		<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	15,00	100%	10,00						100%	25,00	Kec. Bahau Hulu	
KECAMATAN KAYAN SELATAN																
		<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	20,00	100%	30,00						100%	50,00	Kec. Kayan Selatan	
KECAMATAN SUNGAI TUBU																
		<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	30,00	100%	10,00						100%	40,00	Kec. Sei Tubu	
KECAMATAN MALINAU SELATAN																
		<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	29,92	100%	20,00						100%	49,92	Kec. Malsel	
KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR																
		<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	58,95	100%	40,00						100%	98,95	Kec. Masehi	
Pangan																
DINAS KETAHANAN PANGAN																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	358,34	100%	244,50	100%	239,27	100%	248,13	100%	215,67	100%	1.305,90	Dinas Ketahanan Pangan
		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur				-		100%	25,92	100%	26,88	100%	52,80	Dinas Ketahanan Pangan	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		<i>Program Peningkatan disiplin aparatur</i>	Tingkat Kedisiplinan Aparatur							94%	29,04	96%	30,11	96%	59,15	Dinas Ketahanan Pangan
		<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)</i>	Ketersediaan pangan Utama	88%	632,02	90%	490,00	92%	341,00	94%	500,00	96%	752,76	96%	2.715,78	Dinas Ketahanan Pangan
SEKRETARIAT DAERAH																
		<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA)</i>	Jumlah ketersediaan pangan utama	88%	2.456,24	90%	1.986,13	91%	296,00					91%	4.738,36	Bagian. Ekonomi
Lingkungan Hidup																
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	175,08	100%	244,70	100%	294,50	100%	263,14	100%	272,88	100%	1.250,30	Lingkungan Hidup
		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	72,69	100%	1.704,00	100%	413,86	100%	450,00	100%	500,00	100%	3.140,55	Lingkungan Hidup
		<i>Program Peningkatan disiplin aparatur</i>	Tingkat Kedisiplinan Aparatur					100%	282,00					100%	282,00	Lingkungan Hidup
		<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		-	6%	40,00			9%	51,85	9%	53,77	9%	145,62	Lingkungan Hidup
		<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	8.537,42	89,01%	8.942,24	89,01%	9.291,89	89,01%	8.550,00	89,01%	8.600,00	89,01%	43.921,55	Lingkungan Hidup
		<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	100%	410,47	50%	421,40	50%	858,62	50%	518,50	50%	537,68	50%	2.746,68	Lingkungan Hidup



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	10%	123,15	-		20%	311,11	25%	322,61	25%	756,87	Lingkungan Hidup		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	100%	80,20	35%	85,00	40%	95,00	45%	155,55	50%	161,31	50%	577,05	Lingkungan Hidup
		Admistrasi Kependudukan dan Cakil														
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	385,72	100%	285,00	100%	241,88	100%	306,48	100%	317,82	100%	1.536,90	Dukcapil
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	166,94	60%	13,66					60%	180,60		Dukcapil	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	70%	833,10	75,06%	1.684,86	80,25%	1.031,07	85,43%	1.008,18	91%	1.135,07	91%	5.692,28	Dukcapil
		KECAMATAN PUJUNGAN													-	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	50%	25,92	55%	28,03					-	55%	53,95	Kec.Pujungan	
		Pemberdayaan Masyarakat Desa														
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	87%	1.009,60	90%	680,00	92%	267,03	94%	266,39	96%	276,25	96%	2.499,27	PMD



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	104,31		-		75%	50,00	75%	100,00	75%	254,31	PMD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				-		75%	150,00	75%	250,00	75%	400,00	PMD	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase BUMDES yang dibina	87%	603,65		-		85%	777,75	87%	806,52	87%	2.187,92	PMD	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	87%	400,00	90%	1.832,55	92%	1.942,11	94%	1.244,40	96%	1.290,44	96%	6.709,51	PMD
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	100%	3.058,14	100%	4.381,28	100%	4.196,39	100%	4.673,90	100%	4.704,23	100%	21.013,94	PMD
		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan perdesaan	87%	924,15	90%	1.900,00		1.670,60	94%	1.900,00	96%	1.950,00	96%	8.344,76	PMD
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	528,53	100%	65,00		40,00		-		-	100%	633,53	Bag. Tapem
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	265,48		-							100%	265,48	Bag. Tapem
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya fungsi kelembagaan desa		-	100%	178,00	100%	185,00					100%	363,00	Bagian. Ekonomi
KECAMATAN MALINAU KOTA																
		Program Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Presentase evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa pemerintah	100%	7,30									100%	7,30	Kec. Malkot



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

KECAMATAN MALINAU BARAT																
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya Program Pengembangan dan Lembaga ekonomi Pedesaan	100%	7,00	-	-	-	-	-	-	100%	7,00	Kec. Malbar		
KECAMATAN PUJUNGAN																
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat	70%	30,38	75%	16,85	-	-	-	-	75%	47,23	Kec. Pujungan		
KECAMATAN KAYAN HILIR																
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	100%	10,00	105%	10,00	-	-	-	-	100%	20,00	Kec. Kayan Hilir		
Perhubungan																
DINAS PERHUBUNGAN																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	2.524,53	65%	2.233,80	70%	2.130,60	75%	3.200	80%	3.500,00	80%	13.588,93	Dishub
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	40%	2.339,75	-	-	-	60%	1.200,00	70%	1.300,00	70%	4.839,75	Dishub	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang layak pakai	60%	178,35	70%	186,10	80%	187,00	90%	250,00	95%	300,00	95%	1.101,45	Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	36,57%	16,96	39%	59,29	40,12%	24,99	60,00%	70,00	68,46%	100,00	68%	271,24	Dishub
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun	60%	3.390,24	70%	8.187,98	80%	8.545,40	90%	4.127,00	95%	3.789,00	95%	28.039,63	Dishub



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	60%	60,01	70%	80,00	80%	60,00	90%	1.400	95%	1.600,00	95%	3.200,01	Dishub
		Program Peningkatan Pelayanan Udara Daerah Terisolir	Persentase Lapangan Terbang yang dipelihara	60%	299,75	70%	300,00	80%	1.500,50	90%	350	95%	400,00	95%	2.850,25	Dishub
		Keselamatan Lalu Lintas	Angka Kecelakaan Lalu Lintas			70%	834,11								834,11	Dishub
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Peningkatan Pelayanan Udara Daerah Terisolir	Prosentase bandar udara yang mendapatkan pengawasan subsidi transportasi udara daerah terisolir	100%	12,46	100%	370,00	100%	50,00					100%	432,46	Bagian. Ekonomi
		Komunikasi dan Informatika														-
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														-
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.661,24	100%	790,00	100%	962,07	100%	819,23	100%	849,54	100%	5.082,08	Diskominfo
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		-	75%	305,00	89%	110,00	89%	316,03	89%	327,10	89%	1.058,13	Diskominfo
		Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	53,52		-							100%	53,52	Diskominfo
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				2 org	196,00	67,02	2 org	203,00	2 org	210,08	2 org	676,09	Diskominfo
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	Persentase aplikasi berbasis tehnologi informasi yang dikelola		-	100%	2.556,00	100%	2.108,84	100%	4.048,00	100%	4.301,05	100%	13.013,89	Diskominfo



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan			95%	2.106,51	95%	4.758,18	95%	1.970,03	95%	2.043,02	95%	10.877,74	Diskominfo
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase prasarana dan fasilitas yang dibangun	100%	855,22	100%	190,53		300,00	100%	646,00	100%	159,72	100%	2.151,48	Diskominfo
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Persentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	-		1 laporan	2.918,91	1 laporan		1 laporan	100,00	1 laporan	100,00	1 laporan	3.118,91	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
Penanaman Modal																
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	152,89	100%	159,78	100%	272,61	100%	181,00	100%	175,00	100%	941,28	Dinas PMPTSP&TG
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana apartur	100%	219,55	100%	25,00	100%	212,00	100%	35,00	100%	70,07	100%	561,62	Dinas PMPTSP&TG
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	60,00	100%	47,50	100%		100%	41,48	100%	60,00	100%	208,98	Dinas PMPTSP&TG
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase kerjasama investasi yang terealisasi				20,00	100%		100%	200,00	100%	250,00	100%	470,00	Dinas PMPTSP&TG



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Kenaikan nilai realisasi PMDN				23,70	75%	98,00	80%	207,00	85%	215,00	85%	543,70	Dinas PMPTSP&TG
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan daerah yang disediakan	-	-	100%	40,50	100%	20,00	100%	100,00	100%	150,00	100%	310,50	Dinas PMPTSP&TG
		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Indeks kepuasan pelayanan perizinan	100%	207,90	100%	70,00	100%	35,00	100%	141,69	100%	132,00	100%	586,59	Dinas PMPTSP&TG
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Jumlah pelaku usaha dan BUMD yang terdata	100%	5,39	100%	20,00	100%	60,80					100%	86,19	Bagian. Ekonomi
Tenaga Kerja																
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	100%		30,00	100%	10,00	100%	284,25	100%	298,84	100%	623,09	Dinas PMPTSP&TG
		Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-				100%	50,00	100%	300,03	100%	280,20	100%	630,23	Dinas PMPTSP&TG
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase kualitas dan produktifitas tenaga kerja					100%	120,00					100%	120,00	Dinas PMPTSP&TG
Kepemudaan dan Olah Raga																
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	489,26	100%	305,17	100%	403,35	100%	300,00	100%	300,00	100%	1.797,78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	100%	14,20			100%	15,00	100%	15,70	100%	44,90	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan		80%	398,00	90%	998,00	95%	602,65	100%	684,00	100%	2.682,65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha baru			-			95%	250,00	100%	250,00	100%	500,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga	Cakupan pembinaan olahraga	-	60,00%	175,00	63,00%	458,15	65%	73,28	70,00%	25,00	70%	731,43	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memadai			-			100%	207,40	100%	215,07	100%	422,47	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka	Persentase pramuka yang dibina			-		236,55	100%	75,00	100%	100,00	100%	411,55	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
SEKRETARIAT DAERAH															
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana penunjang olahraga yang tersedia	-	0%	-							100%	-	Bag. Umum
Statistik															
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase sektor yang memiliki data/informasi/statistik yang mutakhir		75%	300,00	80%	260,00	85%	311,01	90%	322,06	90%	1.193,07	Diskominfo



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

SEKRETARIAT DAERAH																
		<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah dalam pembangunan	100%	74,73	100%	120,00	100%	89,00				100%	283,73	Bagian. Ekonomi	
Kabudayaan																
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	357,45	100%	382,59	100%	707,31	100%	566,97	100%	587,94	100%	2.602,26	Disbudpar
		<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	Persentase nilai budaya yang dikembangkan	-	1 kali	4.374,62	1 kali	350,00	1 kali	2.488,80	1 kali	2.080,89	1 kali	9.294,31	Disbudpar	
		<i>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</i>	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang ditingkatkan	-	-	75%	284,75	80%	570,35	85%	841,45	85%	1.696,55	Disbudpar		
		<i>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</i>	Persentase pusat-pusat seni yang terbangun	-	-	75%	80%	155,55	85%	161,31	85%	316,86	Disbudpar			
SEKRETARIAT DAERAH																
		<i>Program pengelolaan Keragaman Budaya</i>	Persentase pelestarian jumlah warisan budaya dan cagar budaya	71%	1.940,55			100%	2.000,00	100%		71%	3.940,55	Bag. Humas dan Protokol		
Pariwisata																
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
		<i>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	-	100%	75,00	100%	713,48	100%	155,00	100%	161,31	100%	1.104,79	Disbudpar	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola	100%	3.161,11	100%	2.300,00	100%	3.379,76	100%	2.385,10	100%	2.473,35	100%	13.699,31	Disbudpar
		Perpustakaan														
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														-
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	170,58	100%	285,00	100%	193,57	100%	295,55	100%	306,48	100%	1.251,18	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
		Program pemyarakatan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	100%	37,91	100%	30,00	100%	20,00	100%	51,85	100%	53,77	100%	193,53	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
		Program pengembangan kualitas SDM perpustakaan	Tingkat pengembangan kualitas SDM perpustakaan	20 org	28,86	28 org	20,00	28 org	10,00	29 org	20,74	30 org	21,51	30 org	101,11	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
		Program penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi berbasis IT Perpustakaan	Tingkat penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi	100%	26,68								100%	26,68	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	
		Kearsipan														
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														-
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tingkat pengelolaan kearsipan	100%	14,88	100%	20,00	100%	61,86				100%	96,74	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	
		Program peningkatan pengelolaan kearsipan	Persentase Arsip Yang dikelola	100%	81,49	100%	50,00			100%	72,59	100%	75,00	100%	279,08	Dinas perpustakaan dan Kearsipan



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		<i>Program pembinaan dan pengawasan kearsipan</i>	Jumlah OPD dan Kecamatan yang dibina	100%	27,71	100%	20,00	100%	20,00	100%	31,11	100%	32,26	100%	131,08	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN					7.911,66		13.636,36		17.176,67		13.909,70		16.265,58		68.899,97	
DINAS PERIKANAN															-	
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	277,09	64%	188,47	100%	320,71	100%	155,55	100%	161,31	100%	1.103,12	Dinas Perikanan
		<i>Program pengembangan budidaya perikanan</i>	Produksi perikanan budidaya	70%	80,07	75%	85,00	80%	165,00	85%	300,00	85%	350,00	85%	980,07	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap							75%	100,00	80%	150,00	80%	250,00	Dinas Perikanan
		<i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)</i>	Persentase Produktifitas Pengelolaan Pangan	100%	213,81		-							100%	213,81	Dinas Perikanan
		<i>Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kab)</i>	Produksi Benih Perikanan					100%	597,27	100%	750,00	100%	1.000,00	100%	2.347,27	Dinas Perikanan
		<i>Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)</i>	Tingkat sarana prasarana perikanan yang memadai					100%	399,20	100%	750,00	100%	1.000,00	100%	2.149,20	Dinas Perikanan
Pertanian																
DINAS PERTANIAN																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	253,03	100%	477,92	100%	409,13	100%	385,00	100%	460,00	100%	1.985,08	Dinas Pertanian
		<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	648,00	100%	1.206,00	100%	1.218,62					100%	3.072,62	Dinas Pertanian



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pengetahuan dan ketrampilan petani	100%	140,13		-		100%	380,00	100%	380,00	100%	900,13	Dinas Pertanian	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	Persentase Produktivitas Pangan	100%	2.923,85	100%	2.228,55	100%	1.295,13				100%	6.447,53	Dinas Pertanian	
		Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase teknologi pertanian/perkebunan yang diterapkan	100%	196,16	100%	275,00	100%	396,84	100%	275,00	100%	275,00	100%	1.418,00	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Persentase Produktivitas Pertanian/Perkebunan	100%	125,84	100%	375,00	100%	120,00	100%	751,00	100%	1.101,00	100%	2.472,84	Dinas Pertanian
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh pertanian/lapangan (PPL) yang terampil				-			60%	1.229,00	70%	1.229,00	70%	2.458,00	Dinas Pertanian
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan penyakit ternak	100%	24,35	100%	75,00	100%	75,00	100%	75,00	100%	75,00	100%	324,35	Dinas Pertanian
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produktivitas hasil peternakan	100%	53,19	100%	240,00	100%	222,90	100%	2.079,00	100%	2.079,00	100%	4.674,09	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi pertanian	Produksi pertanian				-	100%	497,18					100%	497,18	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan data dan Informasi	Persentase Sistem informasi manajemen yang dapat diakses	100%	93,86	100%	200,00	100%	385,58	100%	105,00	100%	105,00	100%	889,44	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan infrastruktur Pertanian	Persentase Infrastruktur Pertanian dalam kondisi baik	100%	22,72	100%	76,50		100,00					100%	199,22	Dinas Pertanian



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pengembangan SDM Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian	100%	53,50		-						100%	53,50	Dinas Pertanian	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian	Produktifitas Pertanian	100%	80,70	100%	410,00	100%	270,00				100%	760,70	Dinas Pertanian	
		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase sarana dan prasarana pertanian yang disediakan				-			90%	1.442	100%	1.442	100%	2.884,00	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya/Air Laut, Payau, dan Air Tawar yang dikembangkan	Persentase Kawasan Budidaya/Air Laut, Payau, dan Air Tawar yang dikembangkan	100%	54,601									54,60	Dinas Pertanian	
		Program Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif					75%	200,00					200,00	Dinas Pertanian	
Perindustrian																
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Home Industri yang berkembang	100%	19,82	100%	371,86	100%	2.493,70	100%	155,55	100%	161,31	100%	3.202,24	Dinas Perindag
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tingkat kemampuan penguasaan teknologi industri				-			85%	155,55	100%	161,31	100%	316,86	Dinas Perindag
		Program Pengembangan sentra - sentra industri potensial	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berkembang	100%	47,06	100%	240,36			100%	259,25	100%	268,84	100%	815,52	Dinas Perindag
Perdagangan																
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	205,67	100%	500,53	100%	348,54	100%	311,10	100%	322,61	100%	1.688,45	Dinas Perindag



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

		Program Perlindungan Konsumen dan Pngaman Perdagangan	Persentase toko yang diperiksa tanggal kedaluwarsa barangnya	100%	117,22	100%	250,00	100%	1.339,50	100%	259,25	100%	268,84	100%	2.234,81	Dinas Perindag
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pedagang UMKM				100,00			80%	207,40	85%	215,07	85%	522,47	Dinas Perindag
		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pasar)	Tingkat ketersediaan Infrastruktur Pedesaan							90%	2.699,90	95%	3.900,00	95%	6.599,90	Dinas Perindag
		Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pedagang	100%	2.151,74	100%	5.340,00			100%	151,85	100%	153,77	100%	7.797,36	Dinas Perindag
		Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar	Persentase jumlah pasar yang layak digunakan	100%	89,25	100%	99,00			100%	103,70	100%	107,54	100%	399,48	Dinas Perindag
		Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar	Persentase jumlah pasar yang mendapatkan ijin operasi		-	100%	150,00	100%	50,00	100%	155,55	100%	161,31	100%	516,86	Dinas Perindag
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai					100%	6.594,55					100%	6.594,55	Dinas Perindag
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														-
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase tingkat Pengelolaan Home Industri							100%	518,50	100%	537,68	100%	1.056,18	Dinas Perindag



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	40,00	100%	150,00	100%	25,00	100%	155,55	100%	200,00	100%	570,55	Dinas Perindag
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase jumlah pengembangan usaha kecil menengah	-		100%	100,00	100%	150,00				100%	250,00	Bagian. Ekonomi	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					122.785,60		168.823,50		127.331,76		142.627,68		146.749,87		708.318,41	
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	13.804,05	100%	17.224,93	100%	14.731,04	100%	30.350,00	100%	31.027,20	100%	107.137,22	Bag. Umum
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana apartur	75%	3.845,31	80%	12.524,56	85%	11.696,42	90%	12.268,10	95%	12.771,67	95%	53.106,06	Bag. Umum
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	59,04	100%	272,34	100%	140,22	100%	103,70	100%	107,54	100%	682,83	Bag. Tapem
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatutur	75%	34,97	80%	30,00		75,69				0%	140,66	Bag. Tapem	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahah	100%	79,25	100%	60,00		75,00				0%	214,25	Bag. Tapem	
		Program Aministrasi Pemerintahan Umum	Cakupan Koordinasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa							100%	538,70	100%	642,54	100%	1.181,24	Bag. Tapem



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan daerah yang disediakan			100%	116,61							116,61	Bag. Tapem	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan			100%	195,00	100%	410,40					605,40	Bag. Tapem	
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	95,05	100%	638,00	100%	535,00	100%	409,80	100%	430,15	100%	2.108,00	Bag. Humas dan Protokol
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	88%	109,15		-	100%	55,00				88%	164,15	Bag. Humas dan Protokol	
		Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						480,30	100%	259,25	100%	268,84	100%	1.008,39	Bag. Humas dan Protokol
		Program kerjasama informasi dan media massa	Tingkat Kerjasama Informasi dengan media massa	100%	3.973,14	100%	4.062,90	100%	2.717,34	100%	2.074,00	100%	2.150,74	100%	14.978,12	Bag. Humas dan Protokol
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	529,46	100%	490,20	100%	156,13	100%	170,00	100%	250,00	100%	1.595,79	Bag. Pembangunan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	250,00	-	-	-	-	-	-	-	90%	250,00	Bag. Pembangunan	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	43,00		22,00				100%	65,00	Bag. Pembangunan	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Capaian hasil sistem pengawasan dan pengendalian			100%	25,00	100%	226,20	100%	475,00	100%	475,00	100%	1.201,20	Bag. Pembangunan



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	471,98	100%	160,00	100%	98,96	100%	400,00	100%	475,00	100%	1.605,94	Bag. Pembangunan
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	75%	50,00	100%	50,00	100%	50,03	100%	101,85	100%	150,00	100%	401,88	Bagian. Ekonomi
		Program Pembinaan dan Pengawasan Migas	Prosentase kecamatan yang mendapatkan pengawasan subsidi migas	100%	7,17	100%	370,47	100%	450,00				100%	827,64	Bagian. Ekonomi	
		Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi	Cakupan koordinasi dan monev pembangunan di bidang ekonomi				-			100%	1.300,00	100%	1.350,00	100%	2.650,00	Bagian. Ekonomi
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	50,00	100%	19,98			100%	250,00	100%	250,00	100%	569,98	Bag. Hukum
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan	100%	230,91	100%	220,00	100%	396,71	100%	200,00	100%	270,00	100%	1.317,62	Bag. Hukum
		Program peningkatan jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase cakupan jaringan dokumentasi dan informasi hukum			100%	61,88	100%	87,40	100%	150,00	100%	240,00	100%	539,28	Bag. Hukum
		Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM serta Kesadaran Hukum Masyarakat	Persentase kapasitas hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia serta pelaksanaan HAM dan Kesadaran hukum	100%	47,73	90%	155,00	100%	146,03	100%	300,00	100%	300,00	100%	948,75	Bag. Hukum



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	240,04	100%	170,15	100%	115,80	100%	112,40	100%	131,00	100%	769,39	Bag. Organisasi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana apartur				-			100%	70,00		-	100%	70,00	Bag. Organisasi
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur							100%	55,00	100%	60,00	100%	115,00	Bag. Organisasi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	100%	764,25	100%	115,00	100%	177,60	100%	350,00	100%	1.406,85	Bag. Organisasi
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	100%	100,00	100%	580,00	100%	415,00	100%	1.095,00	Bag. Organisasi
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan					100%					100%		-	Bag. Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	162,20	100%	180,00	100%	180,00	100%	80,00	100%	80,00	100%	682,20	Bag. Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			75%	7,02	80%	8,64	85%	7,26	90%	7,53	90%	30,45	Bag. Kesejahteraan Rakyat



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					80%	30,00					30,00	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
		Program Fasilitas Perjalanan Ibadah	Perjalanan ibadah yang difasilitasi			100%	20,00	100%	180,00				100%	200,00	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
		Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Cakupan koordinasi dan monev bidang kesra							100%	546,80	100%	570,22	100%	1.117,02	Bag. Kesejahteraan Rakyat
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	71,71	100%	1.041,69	100%	483,40	100%	731,84	100%	794,12	100%	3.122,76	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	119,02	100%	258,50	100%	262,98	100%	500,00	100%	500,00	100%	1.640,50	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	96,24	100%	107,85	100%	159,86	100%	111,10	100%	150,00	100%	625,05	Bag. Pengelola Perbatasan Negara
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			85%	27,00	90%	15,00	95%	25,93	100%	30,00	100%	97,93	Bag. Pengelola Perbatasan Negara
		Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola							100%	300,00	100%	300,00	100%	600,00	Bag. Pengelola Perbatasan Negara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	199,67	100%	631,22	100%	540,81	100%	311,10	100%	322,61	100%	2.005,41	Bag. Perlengkapan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	85%	2.538,40	90%	20,00	95%	2.650,00	100%	1.650,00	100%	6.858,40	Bag. Perlengkapan	
SEKRETARIAT DAERAH																
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.353,10	100%	6.327,97	100%	3.852,42	100%	3.000,00	100%	3.500,00	100%	24.033,49	Setwan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana apartur	80%	1.252,31	90%	1.993,90	93%	1.389,08	96%	518,49	98%	537,67	98%	5.691,44	Setwan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	397,89	85%	290,00	90%	60,00	95%	93,33	98%	96,78	98%	938,01	Setwan
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang difasilitasi	100%	18.231,34	85%	27.656,25	90%	14.764,88	93%	24.000,00	96%	25.000,00	96%	109.652,47	Setwan
		Program Fasilitasi Informasi Kedewanan	Persentase fasilitasi informasi kegiatan kedewanan	-	-	-	-	-	65%	126,75	70%	135,75	70%	262,50	Setwan	
		Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa	Prosentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100%	534,38	100%	370,00	100%	150,00	-	-	100%	-	1.054,38	Setwan	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

SEKRETARIAT DAERAH																
SEKRETARIAT KORPRI																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	127,72	100%	145,20	100%	138,22	100%	155,55	100%	175,00	100%	741,69	Set. Korpri
		<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	58,68	100%	59,24	100%	59,24	100%	150,00	100%	200,00	100%	527,16	Set. Korpri
KECAMATAN																
KECAMATAN MALINAU KOTA																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	310,63	100%	184,00	100%	256,20	100%	191,85	100%	198,94	100%	1.141,61	Kec. Malkot
		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	75%	79,20	80%	5,00		20,00	90%	5,19	95%	5,38	95%	114,76	Kec. Malkot
		<i>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</i>	Persentase izin usaha skala kecil yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	66,60	100%	21,72						-	100%	88,32	Kec. Malkot
		<i>Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan</i>	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	182,79	100%	302,97	100%	314,18	100%	799,95	Kec. Malkot
KECAMATAN MALINAU UTARA																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	327,55	100%	289,04	100%	226,58	100%	233,33	100%	241,96	100%	1.318,44	Kec. Maltara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur					100%	3,76					100%	3,76	Kec. Malkot	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					-	100%	220,14	100%	266,67	100%	276,54	100%	763,35	Kec. Maltara
KECAMATAN MALINAU BARAT																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	284,16	100%	247,28	100%	209,92	100%	176,29	100%	182,81	100%	1.100,46	Kec. Malbar	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	7,00	85%	7,00	90%	11,20	95%	7,53	100%	7,81	100%	40,53	Kec. Malbar	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					-	100%	230,00	100%	316,18	100%	327,88	100%	874,06	Kec. Malbar
KECAMATAN MENTARANG																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	241,08	100%	259,28	100%	242,12	100%	197,03	100%	204,32	100%	1.143,82	Kec. Mentarang	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90%	49,85		-		23,00					90%	72,85	Kec. Mentarang	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					-	100%	185,00	100%	302,97	100%	314,17	100%	802,14	Kec. Mentarang



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

KECAMATAN MENTARANG HULU																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	253,61	100%	202,77	100%	201,75	100%	286,21	100%	285,00	100%	1.229,34	Kec. Mentarang Hulu
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	115,00	85%	40,00	90%	99,00	95%	45,00	100%	45,00	100%	344,00	Kec. Mentarang Hulu
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	172,91	100%	218,78	100%	226,88	100%	618,57	Kec. Mentarang Hulu
KECAMATAN PUJUNGAN																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	231,61	100%	146,98	100%	35,56	95%	176,29	100%	182,81	100%	773,25	Kec. Pujungan
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	446,55	100%	373,71	100%	387,54	100%	1.207,80	Kec. Pujungan
KECAMATAN KAYAN HILIR																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	389,29	100%	206,27	100%	464,27	100%	238,51	100%	247,33	100%	1.545,67	Kec. Kayan Hilir
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%		100%	311,49	100%	323,02	100%	634,51	Kec. Kayan Hilir
		Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya						11,00						11,00	Kec. Kayan Hilir



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

KECAMATAN KAYAN HULU																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	373,04	100%	196,27	100%	385,45	100%	238,51	100%	247,33	100%	1.440,59	Kec. Kayan Hulu
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	88,20	100%	311,49	100%	323,02	100%	722,71	Kec. Kayan Hulu
KECAMATAN SUNGAI BOH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	348,15	100%	199,52	100%	429,56	100%	238,51	100%	247,33	100%	1.463,07	Kec. Sungai Boh
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	41,25	100%	311,49	100%	323,02	100%	675,76	Kec. Sungai Boh
KECAMATAN BAHAU HULU																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	384,54	100%	219,52	100%	203,26	100%	248,88	100%	258,09	100%	1.314,28	Kec. Bahau Hulu
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	270,00	100%	301,12	100%	312,26	100%	883,38	Kec. Bahau Hulu
KECAMATAN KAYAN SELATAN																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	360,91	100%	186,27	100%	191,58	100%	230,00	100%	238,00	100%	1.206,76	Kec. Kayan Selatan



*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021*

		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	282,07	100%	320,00	100%	331,84	100%	933,91	Kec. Kayan Selatan
		KECAMATAN SUNGAI TUBU														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	345,80	100%	206,27	100%	419,87	100%	228,14	100%	236,58	100%	1.436,66	Kec. Sei Tubu
		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	24,20		-		25,00				85%	49,20	Kec. Sei Tubu	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	30,00	100%	321,86	100%	333,77	100%	685,63	Kec. Sei Tubu
		KECAMATAN MALINAU SELATAN														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	344,85	100%	219,00	100%	185,72	100%	230,00	100%	238,51	100%	1.218,08	Kec. Malsel
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	25,00	80%	11,00	85%	65,00	90%	11,00	95%	11,41	95%	123,41	Kec. Malsel
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	215,00	100%	309,00	100%	320,43	100%	844,43	Kec. Malsel



KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	320,83	100%	216,03	100%	134,33	100%	228,14	100%	236,58	100%	1.135,90	Kec. Masehi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur					100%	122,00				100%	122,00	Kec. Malsei	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	13,77		-		-				100%	13,77	Kec. Masehi	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu				-	100%	185,00	100%	321,86	100%	333,77	100%	840,63	Kec. Masehi
KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	304,97	100%	176,06	100%	150,50	100%	128,30	100%	132,00	100%	891,82	Kec. Masehu
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	80%	94,00	85%	79,97	90%	132,04	95%	108,40	100%	112,70	100%	527,10	Kec. Masehu



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					-	100%	160,00	100%	313,30	100%	324,89	100%	798,19	Kec. Masehu
		PERWAKILAN KECAMATAN LONG SULE										-		-		-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	194,86	100%	150,00	100%	200,00	100%	55,55	100%	61,31	100%	661,72	Perwakilan. Kec. Long Sule	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,00	Perwakilan. Kec. Long Sule	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					100%		100%	194,45	100%	201,64	100%	396,09	Perwakilan. Kec. Long Sule	
		KANTOR PERSIAPAN KECAMATAN MALINAU UTARA TIMUR									-		-		-		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	198,05	100%	150,00	100%	127,62	100%	55,00	100%	60,00	100%	590,67	Kantor Persiapan Kec. Malinau Utara Timur	
		Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu					100%	25,86	100%	195,00	100%	202,22	100%	423,08	Kantor Persiapan Kec. Malinau Utara Timur	
		Pengawasan															
		INSPEKTORAT														-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	119,67	100%	419,34	100%	163,29	100%	389,39	100%	403,80	100%	1.495,49	Inspektorat	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	80%	35,71								80%	35,71	Inspektorat	
		Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik	Persentase LHP yang ditindaklanjuti/Persentase PD yang menerapkan SPIP	80%	75,13	85%	357,27	90%	500,91	95%	1.047,37	100%	1.086,12	100%	3.066,79	Inspektorat
		Program Penunjang Pengawasan	Jumlah konsultasi, koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK, BPKP, Ijren, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya	1 aplikasi (up graded)	240,55	15 Kecamatan + 5 Lembaga	500,40	15 Kecamatan + 5 Lembaga	400,51				15 Kecamatan + 5 Lembaga	1.141,46	Inspektorat	
		Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan	Persentase PD, Desa dan RT yang menjadi obyek Pemeriksaan	53 SKPD + 109 Desa + 381 RT	476,41	85%	2.200,91	90%	2.254,91	95%	3.012,49	100%	3.123,95	100%	11.068,68	Inspektorat
Perencanaan																
SEKRETARIAT DAERAH																
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	persentase pengembangan wilayah	100%	85,67	100%	100,00	100%	100,00				100%	285,67	Bag. Pengelola Perbatasan Negara	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	75%	650,48	80%	524,42	85%	1.933,07	90%	1.461,39	95%	1.485,68	95%	6.055,04	Bappeda & Litbang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	75%	54,26	100%	45,00		120,00	100%	45,00	100%	50,00	100%	314,26	Bappeda & Litbang



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program pengembangan data/informasi daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	70%	321,19	100%	260,00	100%	250,00	100%	200,00	100%	300,00	100%	1.331,19	Bappeda & Litbang
		Program Kerjasama Pembangunan	Tingkat partisipasi dalam kerjasama pembangunan daerah	70%	191,21		-		-						191,21	Bappeda & Litbang
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase data perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar			100%	500,00	100%	300,00	100%	600,00		1.000,00	100%	2.400,00	Bappeda & Litbang
		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah			100%	60,00	100%	500,00	85%	-	90%	-	90%	560,00	Bappeda & Litbang
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan	70%	1.411,96	100%	4.914,32	100%	1.703,55	100%	1.925,00	100%	1.550,00	100%	11.504,83	Bappeda & Litbang
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi		-	100,00%	230,00	100%	525,00	100%	200,00	100%	500,00	100%	1.455,00	Bappeda & Litbang
		Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	70%	858,42	100,00%	250,00	100%	660,00	100%	350,00	100%	325,00	100%	2.443,42	Bappeda & Litbang
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam	70%	28,91	80%	100,00		-		600,00		150,00	80%	878,91	Bappeda & Litbang
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	70%	371,15		-		-					70%	371,15	Bappeda & Litbang



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		<i>Program Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah</i>	Persentase Dokumen pembangunan yang di evaluasi dan dikendalikan	40%						100%	450,00		850,00	1.300,00	Bappeda & Litbang	
Keuangan																
SEKRETARIAT DAERAH																
		<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	-	100%	24.974,53		12.000,00					100%	36.974,53	Bag. Umum	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.585,47	100%	5.032,00	100%	3.150,00	100%	2.882,86	100%	2.989,53	100%	17.639,85	BPKD
		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.888,56	100%	3.120,00	100%	1.134,00	100%	1.355,50	100%	1.413,05	100%	8.911,11	BPKD
		<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	100%	4.403,33	100%	4.880,00	100%	2.350,00	100%	2.392,50	100%	2.488,42	100%	16.514,25	BPKD
		<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	Persentase aparat desa yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa					85%	1.400,00	100%	2.492,50	100%	2.488,42	100%	6.380,92	BPKD
		<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	46.545,50	100%	33.608,00	100%	31.335,00	100%	28.250,00	100%	28.650,00	100%	168.388,50	BPKD
Kepegawaian																
BADAN KEPEGAWIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																



BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Malinau diukur dari capaian kinerja setiap tahun dan akumulasi kinerja selama lima tahun (2016-2021). Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau 2005-2025, (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2005-2025, (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, (4) agenda Nawacita dalam RPJMN 2015-2019, dan (5) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau disajikan pada Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja sasaran RPJMD sebagaimana dimuat dalam Bab V dokumen ini.



Sedangkan IKK Kabupaten Malinau disajikan pada Tabel 8.2 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Malinau

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
TUJUAN					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71	71,29	71,58	71,87	72,16
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,94	92,38	92,80	93,20	93,57
Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	71,85	80,74	87,15	93,56	99,97
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,96	6,05	6,14	6,23	6,32
Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	15,8	16,00	19,00	22,00	25,00
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	3,95	4,22	4,52	4,84	5,18
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,45	3,81	4,21	4,65	5,14
Persentase Konflik SARA yang diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Indek kualitas lingkungan hidup	69	71	72,5	73,5	75
Indek Reformasi birokrasi	C	CC	CC	CC	B
Indek pembangunan gender	84%	85%	90%	100%	100%
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,8	2,5	2,6	2,8	3,1
Indeks Kepuasan Masyarakat	C	CC	B	B	B



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

Indikator Tujuan/Sasaran	SASARAN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan lama sekolah	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
Rata-rata lama sekolah	8,6	8,61	8,62	8,63	8,64
Angka harapan hidup	71,17	71,5	72	72,5	73
Prevalensi Balita Stunting	27	26,5	26	25,5	25
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,62	7,2	6,80	6,43
Tk.Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang (%)	36,26	36,73	37,44	38,11	40,21
Persentase Jalan dalam kondisi baik/mantap	20	20	21	23	25,04
Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas (%)	48	69	81	100	100
Persentase desa yang terjangkau Komunikasi	75	80	85	90	98,1
Pendapatan Perkapita Masyarakat (Rp)	89.951.955	90.331.820	91.365.071	92.967.479	95.165.610
Indeks Gini	0,300	0,300	0,298	0,297	0,296
Menurunnya angka pengangguran	8,52	8,51	8,5	8,49	8,47
Persentase desa yang memiliki produk unggulan (%)	22,9	27,5	45,9	82,6	100
Tingkat pertumbuhan perdagangan (%)	5,04	5,66	6,54	7,41	8,26
Tingkat Pertumbuhan Industri (%)	16,75	17,01	17,36	18,03	18,70
Rasio tempat ibadah per penduduk	1:500	1:450	1:400	1:300	1:250
Persentase Konflik SARA	0%	0%	0%	0%	0%
Indeks kualitas air	0<IP<5,0	0<IP<5,0	0<IP<1,0	0<IP<1,0	0<IP<1,0
Indeks kualitas udara (ISPU)	51-100	0-50	0-50	0-50	0-50
Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Sakip	CC	B	BB	A	A
Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Indek pembangunan gender	84%	85%	90%	100%	100%
Indek pemberdayaan gender	65%	70%	75%	80%	85%
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	65%	75%	80%	90%	95%
Jumlah wisatawan	5,63	6500	7000	7500	8000
Persentase sanggar seni yang aktif (%)	85	90	95	100	100
Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Cagar Budaya) (%)	43	57	71	86	100
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	C	CC	B	B	B

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
A	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	3,67	1,71	5.96	6.05	6.14	6.23	6.32	6.32
2	Laju Inflasi	%	3,42	4,31	2,77	3,54	4,00	4,00	4,00	4,00
3	PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	Rp. Juta	6.925.128	7.249.660	7.457.892	7.717.405	8.032.825	8.409.929	8.855.818	8.855.818
4	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010	Rp. Juta	6.445.618	6.555.931	6.707.841	6.903.997	7.147.805	7.443.620	7.796.871	7.796.871
5	Pendapatan perkapita harga berlaku	Rp. 000	89.366	89.926	89.852	90.332	91.365	92.967	95.165	95.165
6	Pendapatan perkapita harga konstan 2010	Rp. 000	72.126	72.904	80.815	80.811	81.299	82.285	83.785	83.786
7	Indeks Gini		0,30	0,300	0,300	0,300	0,298	0,297	0,296	0,296



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	Penduduk dan Pembangunan Manusia									
1	Penduduk									
1)	Jumlah Penduduk	Jiwa	77.492	80.619	83.002	85.434	87.920	90.461	93.057	93.057
2)	Laju Pertumbuhan penduduk	%	4,06	4,04	2.95	2.93	2.91	2.89	2.87	2.87
2	Kemiskinan									
1)	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	5.630	5.710	6.690	6.507	6.328	6.153	5.982	5.982
2)	Persentase Penduduk Miskin	%	7,26	7,15	8.06	7.62	7.20	6.80	6.43	6.43
3	Pengangguran									
1)	Penduduk yang Menganggur	Jiwa	3.220	3.219	3.218	3.217	3.216	3.215	3.214	3.214
2)	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,53	8,53	8,52	8,51	8,50	8,49	8,47	8,47



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Indeks Pembangunan Manusia									
1)	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,15	70,71	71,00	71,29	71,58	71,87	72,16	72,16
2)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp.000	9.415,1 ₃	9.529,00	9.558,49	9.592,84	9.632,12	9.676,37	9.725,28	9.725,28
3)	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,24	71,31	71,34	71,38	71,45	71,52	71,52
C	Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pendidikan									
1)	Angka Melek Huruf	%	69,00	73,03	73,04	73,05	73,06	73,07	73,08	73,08
2)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,26	13,28	13,30	13,33	13,35	13,37	13,37



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,56	8,56	8,59	8,59	8,62	8,62	8,62
4)	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
	• APK SD/MI	%	107,14	107,15	107,17	107,19	107,20	107,22	107,23	107,23
	• APK SLTP/MTs	%	97,56	97,57	97,59	97,60	97,61	97,63	97,64	97,64
5)	Angka Partisipasi Murni (APM)									
	• APM SD/MI	%	96,25	95,06	95,08	95,10	95,12	95,14	95,16	95,16
	• APM SLTP/MTs	%	76,69	80,43	80,45	80,47	80,49	80,51	80,53	80,53
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)									
	• APS Usia 7-12 tahun	%	99,30	99,39	99,48	99,57	99,66	99,75	99,84	99,84



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• APS Usia 13-15 Tahun	%	90,66	98,81	98,82	98,83	98,84	98,85	98,86	98,86
6)	Angka Kelulusan									
	• SD/MI	%	100,00	100	100	100	100	100	100	100
	• SMP/MTs	%	98,95	98,97	98,98	99,00	99,01	99,03	99,04	99,04
7)	Angka Putus Sekolah									
	• SD/MI	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• SMP/MTs	%	3,03	2,97	2,91	2,85	2,79	2,74	2,68	2,68
	• SMA/MAN	%	17,46	17,11	16,77	16,44	16,11	15,79	15,47	15,47
8)	Angka Pendidikan yang ditamatkan									
	• Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	%	26,47	25,94	25,42	24,91	24,41	23,93	23,45	23,45



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• SD/MI sederajat	%	22,90	22,44	22,00	21,56	21,12	20,70	20,29	20,29
	• SMP/MTs	%	18,04	18,20	18,37	18,53	18,70	18,87	19,04	19,04
	• SMA/MA dan SMK	%	23,88	24,63	25,35	26,05	26,74	27,40	28,04	28,04
	• Diploma dan Sarjana	%	8,71	8,79	8,87	8,94	9,03	9,11	9,19	9,19
2	Kesehatan									
1)	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	13	12	11	10	9	8	7	7
2)	Jumlah Kematian Balita	Jiwa	4	4	3	3	2	2	2	2
3)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Jiwa	0	1	1	0	0	0	0	0
4)	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,03	71,10	71,17	71,24	71,31	71,38	71,45	71,45
5)	Persentase Balita Gizi Buruk	%	1,17	1,17	1,14	1,12	1,10	1,08	1,05	1,05



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6)	Angka Kesakitan	%	10,41	10,20	10,00	9,80	9,60	9,41	9,22	9,22
3	Ketenagkerjaan									
1)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	88,49	88,63	88,77	88,92	89,06	89,20	89,34	89,34
2)	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	91,47	91,76	92,11	92,47	92,84	93,21	93,59	93,59
D	Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan									
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kelompok Seni dan Budaya	%	75,00	78,00	81,12	84,36	87,74	91,25	94,90	94,90
2	Pemuda dan Olahraga									



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Olahraga	%	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11
E	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan									
1)	Rasio Guru/Murid									
	• SD/MI	Rasio	6	6	6	6	6	6	6	6
	• SMP/MTs	Rasio	7	7	7	7	7	7	7	7
	• SMA/SMK/MAN	Rasio	19	19	19	19	19	19	19	19
2)	Rasio Murid/Klas									
	• SD/MI	Rasio	29	30	29	28	27	26	25	25
	• SMP/MTs	Rasio	34	35	34	33	32	31	30	30



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• SMA/SMK/MAN	Rasio	19	20	20	20	20	20	20	20
3)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S1									
	• SD/MI	%	27	28	40	60	70	80	90	90
	• SMP/MTs	%	24	25	40	60	70	80	90	90
	• SMA/SMK/MAN	%	39	40	55	70	85	90	95	95
2	Kesehatan									
1)	Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	%	75	78	82	86	91	95	100	100
2)	Pertase Penduduk yang Berobat Jalan									
	• Rumah sakit	%	24,18	24,49	24,81	25,14	25,46	25,79	26,13	26,13



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• Tenaga Kesehatan (Termasuk Praktek Dokter)	%	19,38	19,59	19,81	20,03	20,25	20,47	20,70	20,70
	• Puskesmas/Pustu	%	49,51	49,26	48,99	48,70	48,40	48,08	47,75	47,75
	• Lainnya	%	6,93	6,65	6,39	6,13	5,89	5,65	5,43	5,43
3)	Cakupan Balita menurut Penolong Kelahiran									
	• Dokter	%	29,46	29,84	30,23	30,62	31,02	31,42	31,83	31,83
	• Bidan	%	57,88	58,52	59,16	59,81	60,47	61,13	61,81	61,81
	• Dukun Bersalin	%	11,48	10,51	9,52	8,52	7,51	6,48	5,44	5,44
	• Keluarga	%	1,18	1,13	1,09	1,04	1,00	0,96	0,92	0,92
4)	Persentase Desa yang Mencapai "Universal Child	%	50	50	55	60	65	75	85	85



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Immunization" (UCI)									
5)	Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	%	80	83	87	95	100	100	100	100
6)	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sesuai standar	%	10	12	43	61	77	94	94	94
7)	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekalan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8)	Cakupan pelayanan kesehatan									
	• RSUD Malinau	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	• Puskesmas	Unit	14,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• Puskesmas Pembantu	Unit	68,00	82,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	• Posyandu	Unit	53,00	53,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
9)	Jumlah Tenaga Kesehatan									
	• Dokter Spesialis	Jiwa	15	12	13	13	13	13	13	13
	• Dokter Umum	Jiwa	49	42	43	43	43	43	43	43
	• Dokter Gigi	Jiwa	12	14	15	15	15	15	15	15
	• Perawat	Jiwa	221	249	253	257	261	265	269	269
	• Bidan	Jiwa	182	193	196	198	200	202	204	204
	• Tenaga Farmasi	Jiwa	9	25	27	29	31	33	35	37
	• Ahli Gizi	Jiwa	16	18	20	23	26	29	32	32
10)	Jumlah kasus HIV/AIDS	Jiwa	24	17	12	9	6	4	3	3



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11)	Prevalensi kasus HIV/AIDS	%	1	1,00	0,80	0,70	0,50	0,40	0,40	0,40
12)	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	0	0,00	12,50	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13)	Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun	%	7	7,00	6,50	5,90	5,40	5,00	4,70	4,70
14)	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	30	30,00	60,00	75,00	80,00	85,00	95,00	95,00
15)	Cakupan tempat pengelolaan makan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi	%	79	79,00	83,00	87,00	90,00	93,00	95,00	95,00
16)	Persentase RT kategori sehat per desa	%	30	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
3	Pengendalian Penduduk									



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	dan Keluarga Berencana									
1)	Rata-rata anggota rumah tangga	Jiwa	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
2)	Jumlah akseptor KB aktif	Jiwa	6.577	1.890	1.891	1.892	1.893	1.894	1.895	1.895
3)	Jumlah pasangan Usia subur	Jiwa	14.648	13.948	13.949	13.950	13.951	13.952	13.953	13.953
4)	Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap Usia Pasangan Subur	Jiwa	44,90	13,55	13,57	13,59	13,61	13,63	13,65	13,65
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Sanitasi Dasar									
1)	Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	%	85,36	85,70	86,04	86,39	86,73	87,08	87,43	87,43



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2)	Persentase desa tertinggal	%	76,15	74,62	73,13	71,67	70,24	68,83	67,45	67,45
	Sumberdaya Air									
1)	Produksi Perusahaan Air Minum	ribu m3	3.132	3.437	3.772	4.139	4.542	4.984	5.470	5.470
2)	Jumlah Penjualan Air Minum	ribu m3	2.595	3.356	3.382	3.409	3.435	3.462	3.489	3.489
3)	Susut atau Hilang Air Minum	ribu m3	536	80	68	63	59	54	50	46
4)	Jumlah Pelanggan Air minum	buah	6.903	7.561	7.582	7.603	7.624	7.646	7.667	7.667
5)	Persentase desa dengan polusi air	%	30	30	30	20	20	20	20	20
6)	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,1428 99	100,1428 99
	• Air isi ulang	%	33,71	44,51	44,63	44,75	44,87	44,99	45,11	45,11



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• Leding meteran	%	24,89	25,07	25,25	25,43	25,62	25,80	25,99	25,99
	• Sumur/Mata Air Terlindung	%	5,65	1,37	1,14	1,08	1,01	0,95	0,90	0,90
	• Sumur/Mata Air tak Terlindung/Sungai/Air Hujan dan lainnya	%	24,73	25,19	24,71	24,56	24,40	24,25	24,09	24,09
	Listrik									
1)	Produksi listrik	ribu kwh	49.654	53.221	57.044	61.142	65.534	70.242	75.288	75.288
2)	Penjualan listrik	ribu kwh	47.210	51.179	55.482	60.146	65.203	70.684	76.627	76.627
3)	Susut	ribu kwh	2.444	2.042	1.706	1.425	1.191	995	831	831
4)	Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik	%	98,47	98,57	98,67	98,77	98,87	98,97	99,06	99,06
	Batubara									



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1)	Volume ekspor batubara	ribu metrik ton	5.790	5.261	5.262	5.262	5.262	5.263	5.263	5.263
2)	Nilai ekspor batubara	US\$ ribu	220.257	220.279	220.301	220.323	220.345	220.367	220.389	220.389
	Jalan		1841,1	1861,1	1901	1941	1981	2021	2061	2061
1)	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1,339	919,23	919,43	919,63	919,83	920,03	920,23	920,23
2)	Persentase Jalan Kabupaten yang Kondisi Baik	%	15,78	15,55	17,10	18,81	20,69	22,76	25,04	25,04
5	Perumahan									
1)	Persentase rumahtangga menurut tempat pembuangan akhir tinja		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	• Tangki/Spal		13,12	14,95	16,75	18,51	20,22	21,91	23,55	23,55



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	• Sungai		9,87	9,58	9,29	9,01	8,74	8,48	8,23	8,23
	• Lubang tanah		76,71	75,18	73,68	72,20	70,76	69,34	67,96	67,96
	• Tanah lapang		0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
	Angka Kriminalitas	%	0,002	0,003	0,003	0,003	0,02	0,002	0,001	0,001
F	Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
1	Ketenagakerjaan									
	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	34.523	34.634	34.769	34.905	35.046	35.189	35.335	35.335
	Angkatan Kerja	Jiwa	37.743	37.745	37.747	37.749	37.750	37.752	37.754	37.754



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Penduduk usia kerja	Jiwa	52.944	52.951	52.958	52.965	52.972	52.978	52.985	52.985
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,29	71,28	71,28	71,27	71,26	71,26	71,25	71,25
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	65	66	72	72	84	90	96	96
3	Pertanahan									
	Jumlah konflik pertanahan	Konflik	22	20	18	16	15	14	13	13
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%								



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tingkat partisipasi Pengurus RT	%	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	100,0
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan GERDEMA		78,0	80,7	83,6	86,5	89,5	92,6	95,9	95,9
8	Perhubungan									
1)	Transportasi Darat									
	Persentase desa dengan akses angkutan darat	%	65,00	66,95	68,96	71,03	73,16	75,35	77,61	77,61
3)	Transportasi Sungai									
	Arus Penumpang									
	• Datang	orang	74.452	74.824	75.198	75.574	75.952	76.332	76.714	76.714
	• Berangkat	orang	80.109	80.510	80.912	81.317	81.723	82.132	82.543	82.543



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4)	Transportasi Udara									
	Arus Penumpang									
	· Datang	orang	28.602	28.745	28.889	29.033	29.178	29.324	29.471	29.471
	· Berangkat	orang	30.353	30.505	30.657	30.811	30.965	31.119	31.275	31.275
9	Komunikasi dan Informatika									
	Cakupan Akses Internet Penduduk 5 tahun ke atas	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Handphone	%	66,08	66,41	66,74	67,08	67,41	67,75	68,09	68,09
	Kantor	%	21,53	21,64	21,75	21,85	21,96	22,07	22,18	22,18
	Rumah	%	4,19	4,21	4,23	4,25	4,27	4,30	4,32	4,32
	Sekolah	%	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,18	2,20	2,20



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Warnet	%	6,13	5,65	5,16	4,68	4,20	3,70	3,21	3,21
10	Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah									
	Jumlah Koperasi	unit	115	115	115	115	115	115	115	115
	Jumlah KUD	unit	3	3	5	7	9	11	13	13
	Jumlah Koperasi non KUD	unit	112	118	120	122	124	126	128	128
11	Penanaman Modal									
1)	Penanaman Modal	%	0	1	1	2	2	2	2	2
2)	Nilai Investasi PMDN	Rp.Miliar	82	84	87	89	92	95	97	97
3)	Jumlah Usaha PMDN	unit	192	194	196	198	200	202	204	204
4)	Jumlah Tenaga Kerja lokal	jiwa	3.037	3.052	3.067	3.083	3.098	3.114	3.129	3.129



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13	Statistik									
	Buku Kabupaten Malinau Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1
	Buku PDRB Kabupaten Malinau	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Kebudayaan									
1)	Jumlah warisan budaya benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan	Unit	16	3	3	3	3	3	3	3
2)	Jumlah museum	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Perpustakaan									
1)	Jumlah Perpustakaan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
2)	Jumlah Pengunjung	orang	6.000	7.000	85.000	10.000	12.000	15.000	16.000	16.000



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Perpustakaan Per Tahun									
G	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan									
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	373,60	136,86	191,427	226,394	267,749	316,659	374,502	374,502
	Produksi Perikanan Umum	Ton	291,70	171,78	214,109	239,037	266,867	297,938	332,627	332,627
2	Pariwisata									
	Jumlah Kunjungan Wisata	%	5	8	9	11	12	15	18	18
3	Pertanian									
	Luas Panen Padi sawah	Ha	3.078	2.371	2.596	2.717	2.843	2.974	3.112	3.112
	Produksi padi sawah	Ton	7.397	7.433	7.471	7.508	7.546	7.583	7.621	7.621



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Luas Panen Padi Ladang	Ha	5.255	4.821	4.922	4.973	5.024	5.076	5.129	5.129
	Produksi Padi Ladang	Ton	10.195	10.246	10.297	10.348	10.400	10.452	10.504	10.504
	Produksi Palawija	Ton	1.682	1.692	1.705	1.716	1.727	1.738	1.749	1.749
	Produksi Sayuran	Ton	332	2.335	2.340	2.345	2.350	2.355	2.360	2.360
	Produksi buah-buahan	Kwintal	20.713	20.728	20.747	20.764	20.783	20.802	20.819	20.819
	Populasi Ternak	Ekor	14.434	14.309	14.359	14.384	14.409	14.434	14.460	14.460
	Produksi Daging Ternak	Ton	73.14	99.99	137	187	255	349	477	477
	Populasi Unggas	Ekor	247.471	428.750	443.114	450.345	457.693	465.161	472.751	472.751
	Produksi Telur Unggas	Ton	72.701	36.562	47.241	53.699	61.040	69.040	78.868	78.868
4)	Perkebunan									
	Luas Tanaman Perkebunan	Ha	7.195	6.811	6.932	6.993	7.054	7.116	7.179	7.179



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Produksi Tanaman perkebunan	Ton	9.879	9.856	9.896	9.916	9.936	9.956	9.977	9.977
5	Prindustrian									
	Jumlah UMKM yang terbina	Unit	1527	1550	1575	1600	1625	1650	1675	1675
	Jumlah ases permodalan bagi UMKM	unit	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah usaha IKM yang dilatih	unit	20	20	40	40	40	40	40	40
6	Perdagangan									
1)	Perdagangan									
	Jumlah Pedagang Besar	unit				1	2	2	3	3



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Pedagang Menengah	unit	13	13	13	15	18	22	24	24
	Jumlah Pedagang Kecil	unit	150	182	200	210	220	230	240	240
	Jumlah Pedagang Mikro	unit	1663	1691	1.773	1.880	2015	2181	2.388	2.388
H	Fokus Layanan Urusan Penunjang									
1	Perencanaan Pembangunan									
1)	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2)	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	dengan Perda									
3)	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Layanan Masyarakat									
1)	Indeks Kepuasan Masyarakat		C	C	C	CC	B	B	B	B
2)	Cakupan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		64	65,0	67,6	70,3	73,1	76,0	79,1	79,1
3)	Cakupan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan kecamatan		74	75,0	78,0	81,1	84,4	87,7	91,2	91,2



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	yang baik									
3	Kepegawaian									
	Persentase PNS D menurut pendidikan									
	• SD/MI	persen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	• SMP/MTs	persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	• SMA/MA/SMK	persen	30,21	30,08	29,94	29,81	29,67	29,54	29,40	29,40
	• D1-D3	persen	21,88	22,02	22,15	22,29	22,42	22,56	22,69	22,69
	• D4-S1	persen	43,09	43,01	42,93	42,85	42,76	42,68	42,60	42,60
	• S2 dan S3	persen	3,11	3,22	3,33	3,44	3,54	3,65	3,76	3,76



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
II	Aspek Daya Saing Daerah									
A	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1)	Pengeluaran rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	9.415,13	9.416,14	9.417,15	9.418,16	9.419,17	9.420,19	9.421,20	9.421,20
2)	Jumlah hotel	unit	11	12	17	17	18	18	19	19
3)	Nilai Tabungan	Rp.Juta	936.122	938.931	941.748	944.573	947.407	950.249	953.100	953.100
4)	Nilai kredit yang disalurkan	Rp.Juta	60.981	61.165	61.348	61.532	61.717	61.902	62.088	62.088
C	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1)	Luas wilayah Produktif	Ha	3.647	3.647	3.647	3.648	3.647	3.649	3.650	3.650



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja/Sasaran					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2)	Luas Wilayah Budidaya	Ha	3.341	3.342	3.342	3.343	3.344	3.345	3.346	3.346
3)	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	%	83,75	83,92	84,08	84,24	84,39	84,55	84,85	84,85
4)	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	%	98,47	98,57	98,67	98,77	98,87	98,97	99,06	99,06
5)	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan internet	%	89,84	89,93	90,02	90,11	90,20	90,29	90,38	90,38
6)	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan handphone/telpon	%	94,38	94,48	94,57	94,67	94,76	94,86	94,95	94,95



BAB 9

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan revisi dokumen RPJMD sebelumnya. RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021 yang memuat strategi dan arah kebijakan perwujudan misi, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah, serta kerangka investasi dan pendanaan. Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau setiap tahunnya. Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus menjadi instrumen penting yang untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan dalam tiga tahun kedepan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar hukum penyusunan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 berakhir, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau, serta memperhatikan arah kebijakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara dan RKP untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2022 memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan



permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya;

- (3) Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malinau untuk masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 -2021 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Malinau dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara; dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Tabel 9.1

Program Utama Transisi

No	Program Utama	Sasaran	Indikator
1	Pengembangan Pendidikan	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan menengah 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional dan internasional	1. Angka partisipasi sekolah 2. Angka kelulusan 3. Angka melek huruf
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan	1. Angka kematian bayi 2. Angka kematian ibu 3. Angka harapan hidup 4. Angka kecukupan 5. Persentase balita bergizi buruk
4	Pembangunan Pertanian	1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya kesempatan	1. Tingkat produktivitas pertanian 2. Jumlah tenaga kerja



No	Program Utama	Sasaran	Indikator
		kerja 3. Meningkatnya pendapatan petani 4. Terwujudnya swasembada pangan dan lumbung pangan 5. Meningkatnya ekspor pertanian	3. Jumlah pendapatan petani 4. Cadangan Pangan 5. Nilai ekspor hasil pertanian
5	Pembangunan Industri Pengolahan	1. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan 2. Meningkatnya pendapatan pekerja dan pengusaha 3. Meningkatnya ekspor hasil industri pengolahan 4. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Tingkat Produktivitas industri pengolahan 2. Pendapatan pekerja 3. Penerimaan pengusaha 4. Nilai ekspor hasil industri pengeolahan 5. Pendapatan daerah
6	Pengembangan Pariwisata	1. Meningkatnya produktivitas pariwisata 2. Meningkatnya kesempatan kerja 3. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pariwisata 4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Tingkat produktivitas pariwisata 2. Jumlah tenaga kerja 3. Jumlah pendapatan pelaku usaha pariwisata 4. Pertumbuhan nilai tambah pariwisata
7	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan antardesa dan antar kecamatan	1. Berkurangnya angka kemiskinan 2. Berkurangnya desa tertinggal	1. Jumlah dan persentase penduduk miskin 2. Jumlah desa tertinggal



No	Program Utama	Sasaran	Indikator
8	Perluasan Kerjasama Perdagangan dan Investasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan daya saing daerah2. Meningkatnya daya tarik daerah3. Meningkatkan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA)4. Meningkatnya kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai investasi PMDN2. Nilai Investasi PMA3. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN4. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA
9	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur2. Meningkatnya mutu layanan publik3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kecepatan layanan2. Tingkat ketepatan layanan3. Tingkat kepuasan
10	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Terjaganya daya dukung lingkungan2. Berkurangnya lahan kritis3. Berkurangnya tingkat pencemaran	<ol style="list-style-type: none">1. Rasio ruang terbuka hijau2. Rasio lahan kritis3. Tingkat pencemaran

Sumber: Analisis 2016

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil



- Bupati Malinau dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Malinau dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau;
 - (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
 - (4) Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
 - (5) Setiap Pemerintah Desa perlu menyusun dan atau melakukan pembaharuan RPJMDesa dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
 - (6) Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau;
 - (7) Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - (8) RKPD Kabupaten Malinau harus menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
 - (9) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Malinau merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - (10) Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (Renja-OPD);



- (11) Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, setiap OPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Malinau, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
- (12) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dan penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - c. Pembangunan sistem informasi perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*), pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*);
 - d. Penguatan peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
 - f. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD;
 - g. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - h. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran OPD periode sebelumnya;
 - i. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
 - j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat



pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

- (14) Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau dalam kurun waktu tahun 2016-2021.



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau 2016-2021

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	233,00	100%	390,24	100%	287,90	100%	297,76	100%	308,77	100%	1.517,66	BKPP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka waktu pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	90%	212,51		-		1.519,00					90%	1.731,51	BKPP
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	266,70	100%	363,71	100%	150,00	100%	107,54	100%	111,52	100%	999,46	BKPP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	2.328,93	85%	2.075,17	90%	1.391,55	95%	1.381,85	100%	1.432,98	100%	8.610,48	BKPP
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	82%	189,36	85%	820,49	90%	601,76	95%	365,00	100%	395,00	100%	2.371,61	BKPP
		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase PNS yang difasilitasi pindah/purna tugas	100%	36,52	85%	100,00	90%	50,00	95%	618,00	100%	625,00	100%	1.429,52	BKPP
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi		-	100%	70,00	100%	65,10					100%	135,10	BKPP
TOTAL					662.713,36	-	619.629,57	-	591.855,72	-	659.003,12	-	705.195,60	-	3.238.397,37	